

kaleidoskop

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2014 - 2019

The background image shows the United Nations Secretariat Building in New York City, with a large number of national flags on poles in the foreground. The building's facade features the text 'UNITED NATIONS' and 'NATIONS UNIES' flanking the UN emblem.

JELAJAH DIPLOMASI PARLEMEN

Diterbitkan oleh:
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tim Penyusun

Pengarah

Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
Juliari P. Batubara
Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.
H. Achmad Farial

Penanggung Jawab

Endah T. D. Retnoastuti, S.S., M.Phil.

Redaktur

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS.
Drs. Robert Juheng Purba
Sartomo, S.S., M.Si.

Editor

Rd. Anne Widyana, S.S., M.Si.
Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Pembuat Artikel

Dewi Amelia Tresna Wijayanti, M.A.
Heriyono Adi Anggoro
Annisa Mariana, M.Si.

Tide Aji Pratama
Rochmi Hamdani Akbar

Design Grafis & Fotografer

Haryanti, S.A.B., M.A.P.
Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M.

Wiryawan Narendro Putro
Miranti Widiani, S.Sos.

Sekretariat

Aan Yulianingsih, S.Sos.
Rifan Rachman SA., S.Sos., M.H.
Hilda Kurnia Ningsih, S.H.
Gadis Anggiani Marha, S.Sos.

Anie Pujie Lestari
Ahmadi
Siti Masitoh

Kaleidoskop BKSAP DPR RI Periode 2014 - 2019:
Jelajah Diplomasi Parlemen

c Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain termasuk organisasi regional / internasional yang menghimpun parlemen - parlemen dan / atau anggota - anggota parlemen negara lain.

Lebih lanjut lihat www.ksap.dpr.go.id

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak - hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI
Gedung Nusantara III Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Indonesia

Tel. : 021-5715814, 5715907

Faks. : 021-5734460

Email : biro_ksap@dpr.go.id

246 halaman; 21cm x 29.7cm

ISBN : 978-602-51087-1-6



Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua DPR RI	7
Kata Pengantar Pimpinan BKSAP DPR RI	11
Sekilas BKSAP	14
Diplomasi Parlemen	18
DPR RI di Organisasi Internasional / Regional	22
Inisiatif - Inisiatif DPR RI	26
<hr/>	
Fokus Diplomasi	
• Menjawab Tantangan Pencapaian SDGs melalui Peran Parlemen	40
• Lingkungan dan Perubahan Iklim	47
• Ekonomi dan Perdagangan Internasional	51
• Digitalisasi dan Revolusi Industri	58
• Demokrasi: Partisipasi Pemuda dan Anti-korupsi	61
• Gender dan Partisipasi Perempuan - <i>Women in Politics Map</i>	75
• Isu Palestina, Krisis Kemanusiaan Rohingnya, Perlindungan HAM Pekerja Migran	82
<hr/>	
BKSAP dalam Dinamika Politik Internasional	
• Integrasi Regional dan Kerja Sama Kawasan	97
• Sorotan Spesifik:	
- <i>Fighting Unfair Trade Practices</i> : Diplomasi Kelapa Sawit di tengah terpaan Kampanye Negatif	102
- Diplomasi Kedaulatan Negara oleh DPR RI melalui penyelenggaraan <i>Indonesia Pacific Parliamentary Partnership</i>	107
<hr/>	
Diplomasi Bilateral	115
Menjangkau Publik	121
Diplomasi DPR RI ke Depan	127
Anggaran dan Realisasi BKSAP DPR RI Periode 2014 - 2019	135
Mereka yang Datang dan Pergi	137
Anggota BKSAP DPR RI Periode 2014 - 2019	147
<i>BKSAP in Frames</i>	164



Kata Pengantar Ketua DPR RI



H. Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabaraktuh
Salam sejahtera untuk kita semua,

Selama lima tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi second-track diplomacy yang dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah menorehkan berbagai prestasi dan pencapaian penting dalam mendukung diplomasi yang dilakukan Pemerintah. Dengan perencanaan dan strategi diplomasi yang tepat sasaran, disertai dengan kepemimpinan yang efektif, BKSAP mampu memainkan peranan yang signifikan dalam ranah diplomasi parlemen, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional.

Periode keanggotaan DPR RI masa bakti 2014-2019 bertepatan dengan berbagai momentum dan peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. Pada September 2015, para kepala pemerintahan menyepakati sebuah deklarasi berjudul *Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*, suatu rangkaian agenda pembangunan global yang ambisius, terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, yang secara tegas mengakui dan menekankan pentingnya peran parlemen dalam mencapai *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). DPR RI melalui BKSAP menjadi salah satu parlemen di dunia yang pertama kali membentuk Panitia Kerja (Panja) yang didedikasikan khusus untuk mendukung SDGs. Sesuai tugas dan fungsinya, Panja SDGs telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian SDGs di Indonesia, antara lain dengan mendukung pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN.



Pada tahun 2016, dunia dikagetkan oleh terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Sejak tahun 1970an, sebanyak satu juta warga Rohingya telah meninggalkan tempat tinggalnya secara terpaksa akibat persekusi dan diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Ribuan diantaranya mengungsi ke wilayah Indonesia. Dalam kasus ini, DPR RI secara konsisten membela hak-hak fundamental etnis Rohingya untuk hidup dengan damai di tanah kelahirannya dan mendapatkan keadilan atas kekerasan yang mereka alami. DPR RI adalah satu-satunya parlemen di kawasan Asia Tenggara yang mampu mengkonfrontasi parlemen Myanmar terkait penderitaan yang dialami etnis Rohingya. Saya meyakini bahwa perjuangan DPRRI untuk etnis Rohingya tidak akan berhenti.

DPR RI senantiasa menjadi yang terdepan dalam membela hak asasi manusia. Hal ini juga tercermin dari komitmen DPR RI dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pada akhir tahun 2017, DPR RI mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan sepihak yang dilontarkan Presiden AS merupakan pelanggaran atas sejumlah instrumen dan hukum internasional. Sebagai respons atas kejadian tersebut, DPR RI bersama negara-negara anggota *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)* dengan tegas menyatakan *East Jerusalem (Al-Quds)* sebagai ibukota Palestina dan menolak segala upaya yang dilakukan oleh AS untuk mengubah status Jerusalem. Dengan semangat yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengakui hak bangsa Palestina untuk merdeka dan memiliki negara yang berdaulat, sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Perbatasan 1967.

Di akhir tahun 2018, dunia kembali diwarnai oleh isu kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, China. Berbagai propaganda yang diluncurkan pemerintah China telah mengarah pada cultural genocide. DPR RI bersikeras



bahwa hak-hak asasi etnis Uighur harus dipenuhi dan tekanan yang dilakukan pemerintah China harus dihentikan. Selain menyuarakan isu-isu kemanusiaan, DPR RI juga telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif kerja sama regional dan internasional. *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* yang pertama kali diselenggarakan di Bali pada tahun 2017 merupakan forum antarpemerintahan satu-satunya di dunia yang secara khusus membahas isu-isu pembangunan berkelanjutan. Sementara itu di tahun 2018, DPR RI mengadakan pertemuan *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* sebagai salah satu langkah strategis untuk mengukuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di antara negara-negara Pasifik.

Saudara-Saudara Sekalian,

Dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks telah memberikan banyak tantangan bagi kita semua, termasuk DPR RI, dalam membela kepentingan nasional di ranah internasional. Melalui buku ini, DPR RI berupaya untuk merangkum rangkaian kebijakan yang telah ditempuh selama periode 2014-2019 sebagai rujukan atas penyusunan strategi dan langkah diplomasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan DPR RI, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan, anggota, pejabat, tenaga ahli, dan staf BKSAP atas komitmen dan kerja keras mereka dalam menunjang fungsi diplomasi parlemen yang proaktif, responsif, dan efektif. Saya percaya bahwa diplomasi parlemen merupakan ujung tombak kebijakan luar negeri yang inklusif dan berpihak pada masyarakat.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabaraktuh



Kata Pengantar Pimpinan BKSAP



Dr. H. Nurhayati Ali Assegaf
Ketua BKSAP DPR RI /
Fraksi P.Demokrat

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabaraktuh
Salam Sejahtera,

Tepat pada September 2019 ini, periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 berakhir. Ini berarti, berakhir pula pengabdian kami selama bersama-sama menjadi nakhoda BKSAP. Telah banyak perjuangan, lobi dan kegiatan kami lalui dalam diplomasi parlemen hingga menuju saat ini. Selama lima tahun pula kami memotret ragam perkembangan internasional yang memiliki dampak signifikan bagi politik nasional.

Melalui beragam agenda dan dedikasi, banyak di antara para "diplomat parlemen" ini mendapat amanat ataupun mampu meraih prestasi internasional dalam beragam forum antarparlemen multilateral. Tentu posisi-posisi prestisius di level internasional tersebut tidak lain dan tidak bukan BKSAP persembahkan untuk Indonesia. Posisi-posisi prestisius baik di *Inter-Parliamentary Union*, *Women In Politics* dan juga *Women Political Leaders Global Forum*, *Parliamentarians for Al-Quds*, *Parliamentary Conference on the WTO*, *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* hingga sejumlah raihan penghargaan atas peran aktif kita di kawasan, seperti AIPA Award, menjadi medan pertempuran perjuangan DPR di luar negeri untuk segala kepentingan Indonesia.

Tidak lupa pula kami berupaya menerobos "rutinitas" aktivitas BKSAP melalui upaya membumikan peran internasional DPR (BKSAP). Program seperti *BKSAP Day*, cuitan kegiatan di media sosial hingga jalinan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, masyarakat sipil dan organisasi think tank merupakan usaha perwujudan BKSAP untuk menjangkau publik. Ragam inisiatif baik dalam bentuk Panitia Kerja (Panja) SDGs dan juga Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) hingga menjadi tuan rumah beragam forum



Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Fraksi PDI.Perjuangan



Dave Akbarshah Fikarno, ME
Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Fraksi P.Golkar

global parlemen, termasuk menginisiasi satu forum yakni World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD), juga bagian dari kerja keras BKSAP dalam berjuang di jalur diplomasi.

Jejak waktu lima tahun yang kami miliki ini merupakan wujud keberlanjutan peran DPR dalam dunia internasional dan sebagai upaya menutup defisit demokrasi terkait agenda-agenda internasional. Kerap kali kita mendengar bahwa segala kebijakan di level internasional yang berujung pada pelaksanaan di level domestik itu ditentukan segalanya oleh kalangan eksekutif (pemerintah). Padahal parlemen menjadi kunci persetujuan ragam agenda multilateral itu melalui proses konstitusi di level nasional.

Ke depan, dalam arah tugas dan kewenangan BKSAP, kiranya cukup ideal bila BKSAP mampu berperan untuk mendukung proses pengawasan berbagai komitmen internasional yang sudah disetujui pemerintah. Hakikatnya, kami sebagai gerbang internasional DPR dapat memiliki peran tersebut sebagai upaya checks and balances komitmen internasional dengan kebijakan pemerintah di level nasional. Kiranya ini dapat menjadi sebuah food for thought bagi DPR ke depan dalam memperkuat perannya di dunia internasional.

Apresiasi dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para Anggota DPR yang pernah menjadi Pimpinan BKSAP 2014-2019, seperti Meutya Hafidz, Tantowi Yahya, Siti Hediati Soeharto, Teguh Juwarno, Rofi Munawar, Nurhayati Monoarfa, Saifullah Tamliha, dan Hazrul Azwar atas dedikasi dan pengabdianya dalam memimpin BKSAP. Kami menyampaikan pula terima kasih atas dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Kerja Sama Antar-Parlemen (KSAP) dan para Tenaga Ahli BKSAP yang tak kenal lelah memberikan karya terbaiknya demi memperlancar



Dr. KH. Surahman Hidayat
Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Fraksi PKS



jalannya tugas DPR dan BKSAP.

Melalui buku ini, kami merekam antologi waktu dari segala ikhtiar yang dilakukan para Pimpinan dan Anggota BKSAP sepanjang satu periode 2014-2019. Buku ini menghadirkan nuansa yang lebih menarik karena selain menghadirkan highlight aktivitas juga infografis dari ide, aspirasi dan peran yang dilakukan BKSAP. Semoga buku ini dapat menjadi bagian sejarah dari peran DPR di dunia internasional sekaligus catatan kiprah dan karya BKSAP selama lima tahun. Kami yakin, dengan dokumen ini, BKSAP dapat meneruskan beragam mandat yang diamanatkan demi peran aktif Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selamat membaca!

"History will be kind to me for I intend to write it." – *Winston S. Churchill*

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabaraktuh
Pimpinan BKSAP 2014-2019



Sekilas BKSAP DPR RI

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk melalui berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antarparlemen.

Ketika menghadiri berbagai sidang baik di kawasan maupun di forum internasional, BKSAP menyuarkan kepentingan nasional Indonesia dan memperjuangkan berbagai resolusi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Selain berkiprah di luar negeri, BKSAP menerima kunjungan delegasi negara sahabat (baik dari unsur parlemen maupun pemerintah), termasuk duta besar negara sahabat yang menjadi tamu DPR, untuk menjaga hubungan baik dan mendukung penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara.

BKSAP juga membentuk Panitia Kerja untuk menindaklanjuti isu-isu yang menjadi perhatian BKSAP, terutama yang berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals dan peningkatan kerja sama ekonomi regional.

Sepanjang periode ini, BKSAP telah menginisiasi DPR RI untuk menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Asia Afrika, *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* dan sidang *Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership*. Selain itu juga menginisiasi pembentukan struktur khusus yang membahas isu-isu perempuan dalam berbagai organisasi antar parlemen seperti *Meeting of Women Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*, *Meeting of Women Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, dan *Meeting of Women Asian Parliamentary Assembly (APA)*.

Dalam kerangka penguatan hubungan bilateral, BKSAP membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Negara-negara Sahabat. Pada periode 2014-2019, BKSAP telah membentuk 51 (lima puluh satu) GKSB dengan maksud dan tujuan, antara lain, menyuarkan kepentingan nasional Indonesia, terutama dengan mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat yang merupakan salah satu peran DPR dalam pelaksanaan *multitrack diplomacy*, di samping tentunya bertukar praktik



cerdas dan pengalaman terkait isu-isu global yang menjadi fokus bersama seperti SDGs, gender, demokrasi, HAM, Perubahan iklim, kejahatan transnasional terorganisasi dan korupsi.

Pada periode ini pula, BKSAP memfasilitasi peran diplomasi individu dalam kerangka bilateral. Diplomasi individu merupakan konsep diplomasi yang baru diimplementasikan oleh DPR RI guna memberikan ruang diplomasi melalui pendekatan personal (*one-on-one approach*). Pada praktiknya, diplomasi individu dapat menjembatani pending matters yang muncul dalam hubungan Indonesia dengan negara sahabat.

Dalam menjalankan peran diplomasi parlemen ini, BKSAP selalu berupaya untuk berperan aktif dalam forum antarparlemen baik regional maupun multilateral yang

diikuti, serta mengupayakan untuk dapat menduduki berbagai posisi strategis di organisasi parlemen regional/multilateral serta mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan menghadiri sidang/pertemuan internasional.

BKSAP adalah pintu DPR ke dunia internasional yang dapat memberikan perspektif baru dari sisi aspirasi konstituen yang diawali oleh anggota parlemen dan memberikan ruang bagi peningkatan fungsi parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas.







Diplomasi Parlemen

Dalam tatanan dunia saat ini yang semakin global di mana ketergantungan antarnegara semakin tinggi, diplomasi memiliki kedudukan yang penting tidak hanya sebagai sebuah instrumen untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi efektif antarnegara dalam rangka mengatasi berbagai isu internasional yang dianggap sebagai permasalahan bersama. Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu internasional, aktor diplomasi berkembang tidak lagi hanya terfokus pada pemerintah tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, terutama parlemen. Sebagai lembaga demokrasi yang menyuarakan aspirasi rakyat, parlemen diharapkan memiliki peran signifikan dalam penyelesaian isu-isu internasional yang dapat membawa dampak sosial, politik, dan ekonomi secara langsung kepada rakyat sebagai konstituen.

Di Indonesia diplomasi parlemen menjadi salah satu mandat DPR RI, yang merupakan implementasi dari *multitrack diplomacy*, dengan tujuan untuk memperkuat diplomasi eksekutif (dalam hal ini pemerintah), dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks negara demokrasi yang memiliki karakter parlemen lebih lentur dan tidak terikat protokoler kenegaraan, diplomasi dapat dilakukan dengan lebih terbuka oleh parlemen sebagai sarana penyampaian aspirasi beragam pandangan bilamana perwakilan eksekutif (pemerintah) tidak bisa menyampaikan agenda kepentingan nasional secara lebih terbuka.

Misalnya, pada isu yang sensitif antara Indonesia dengan negara sahabat, ketika ada hal-hal yang tidak mungkin disampaikan secara vulgar oleh Eksekutif, maka DPR bisa melakukan diplomasi dengan melobi *counterpart*-nya di



negara tersebut dengan gaya parlemen yang lebih lentur. Sebagai contoh: DPR RI menyelenggarakan *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*, yaitu suatu forum regional negara-negara di Pasifik yang dimotori oleh DPR RI dalam membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Namun demikian, kepentingan nasional Indonesia yang menjadi landasan utama dibentuknya IPPP oleh DPR RI tersebut adalah isu Papua. DPR RI melakukan diplomasi parlemen untuk menggalang parlemen negara-negara Pasifik agar mereka tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok separatis Papua. Upaya ini dilakukan pada saat diplomasi pemerintah tengah mengalami kebuntuan komunikasi.

DPR memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Diterangkan dalam Pasal tersebut, bahwasannya penyelenggara Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Non-pemerintah yang dimaksud termasuk pula DPR sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam bagian penjelasan. Selain itu, peran diplomasi DPR diatur juga dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), di mana fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.

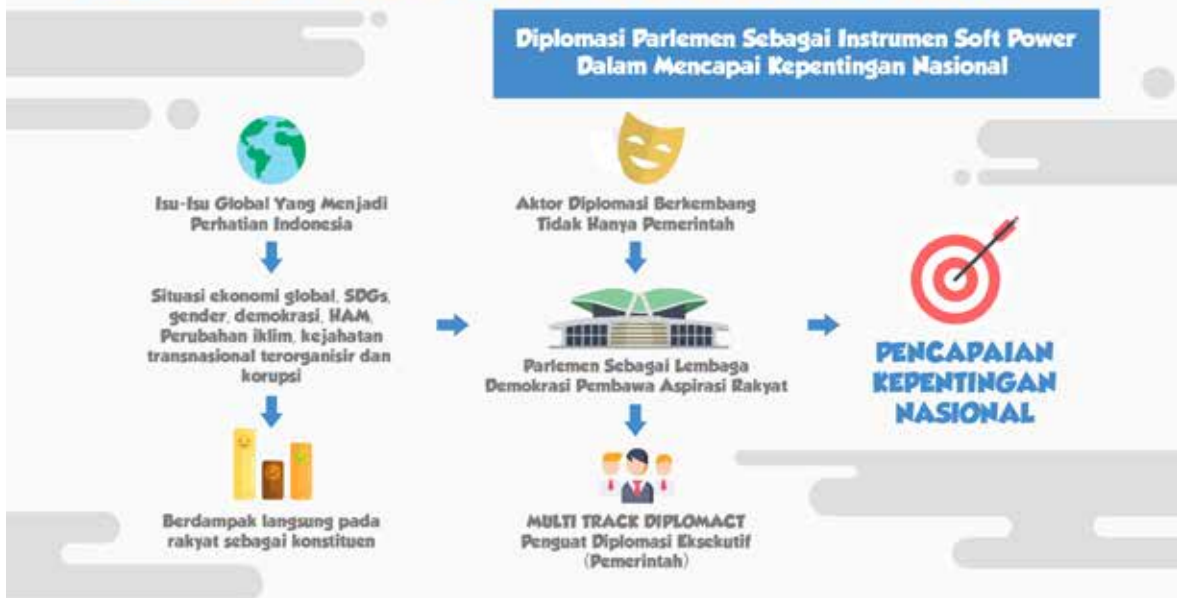
Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI membentuk Alat Kelengkapan Dewan yakni Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), yang mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk melalui berbagai fora internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. Fora internasional, khususnya fora antarparlemen yang kerap

digunakan oleh BKSAP DPR RI untuk menjalankan fungsi diplomasi parlemen, diantaranya adalah *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Asian Pacific Parliament Forum (APPF)*, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, dan *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*. Di fora internasional inilah, DPR RI melalui BKSAP memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan aktif membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

BKSAP DPR RI juga terafiliasi dengan institusi keuangan, perdagangan, dan pembangunan internasional melalui *Parliamentary Committee of the World Trade Organization (PCWTO)*, dan *Parliamentary Network on IMF and World Bank*, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang inklusif melalui berbagai agenda di setiap pertemuan yang diadakan sekaligus membangun sinergi institusi-institusi tersebut dengan Indonesia. Dalam pertemuan *IMF-World Bank* pada tahun 2018 misalnya, BKSAP DPR RI memastikan peningkatan investasi dalam Human Capital dan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BKSAP DPR RI juga merupakan inisiator *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)*, sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan spirit *no one left behind*. Melalui WPFSD yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini, BKSAP DPR RI mendorong dan memastikan komitmen para pemangku kepentingan dan negara-negara sahabat dalam pencapaian Agenda 2030 terutama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



BAGAIMANA DPR MENJALANKAN FUNGSI DIPLOMASI?



Nilai Strategis Diplomasi Parlemen DPR RI



Pelaksanaan Diplomasi Parlemen DPR RI

Sebagai penjurur dari diplomasi di DPR RI, BKSAP diberikan mandat sesuai dengan UU MD3 yang menegaskan fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri, sekaligus juga dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja politik luar negeri pemerintah

Merespon Peluang & Tantangan Global

Diplomasi Perorangan,
 Diplomasi Bilateral,
 Diplomasi Multilateral

Membentuk Panja untuk Menghadapi Isu Khusus

Panja MDGs, Panja SDGs, Panja MEA, dan
 Panja KER (Kerjasama Ekonomi Regional)





DPR RI di Organisasi Regional / Internasional



DPR RI dikancah Organisasi Regional / Internasional

1. *Member of Steering Committee of Inter-Parliamentary Union (IPU) on Parliamentary Conference on WTO*
2. *Member of Executive Committee on Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*

Sebagaimana amanat UU MD3 Pasal 69 ayat 2 dan Tata tertib DPR RI Bab II Pasal 4 ayat 2, parlemen juga memiliki fungsi diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional baik melalui organisasi regional maupun internasional, khususnya fora antarparlemen. Kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh Indonesia mencakup berbagai isu, baik itu terkait dengan isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun isu-isu strategis lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia dan juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal tersebut diantaranya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemberantasan korupsi, perdagangan internasional, perubahan iklim, pemberantasan narkoba, penguatan hubungan dengan parlemen dengan negara-negara pasifik, perlindungan HAM pengungsi Rohingya, hingga kemerdekaan Palestina.

Fora antarparlemen tingkat regional yang menjadi ajang diplomasi Indonesia adalah *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, dan *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*. Sementara di tingkat internasional, ajang diplomasi dilakukan

DPR di *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*, *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*, *MIKTA Speakers' Consultation*, *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)*, *Parliamentary for Al-Quds*, *Women Political Leaders (WPL)*, *Parliamentary Network on International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB)*, *Parliamentary Conference on World Trade Organization (WTO)*, dan *Parliamentary Network on Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Di berbagai forum internasional tersebut, DPR melakukan lobi intensif, membahas isu-isu internasional serta mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan global. Kegigihan, keberhasilan, integritas, dan keaktifan Anggota DPR RI dalam berbagai fora antarparlemen tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional. Berikut ini adalah daftar Anggota DPR RI yang mendapatkan penghargaan dan kepercayaan untuk menduduki posisi strategis pada fora antarparlemen.



DR. H. Fadli Zon, SS., M.Sc
*Chair of the Executive Committee
on Global Organization Parliamentarians Against Corruption
(GOPAC)*



DR. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si

1. *President of Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD)*
2. *President of the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (IHL) on Inter-Parliamentary Union (IPU)*
3. *Board Member and Chair Global Task Force on Participation of Society on GOPAC*
4. *Member of the Executive Board and WIP Ambassador for Indonesia on Women Political Leaders*

*Award: ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Distinguished Service Awards*

- H. Rofi` Munawar, Lc**
1. *Member of Executive Committee on Parliamentary for Al-Quds*
 2. *Member Committee on IPU Middle East Questions*



DR. Evita Nursanty, M.Sc

Member Committee on United Nation Affairs on IPU

Irine Yusiana Roba, M.Comn & Mediast
*Board Member on IPU Forum of Young
Parliamentarians*







Inisiatif Diplomasi DPR RI

Kompleksitas dinamika politik internasional memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkannya. Dalam diplomasi parlemen, DPR RI tidak hanya menjawab tantangan global, tetapi juga proaktif mengambil inisiatif dan peluang yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut, DPR RI membentuk dua Panitia Kerja (Panja), yakni Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Panja Kerja sama Ekonomi Regional (KER).

Panja SDGs merupakan manifestasi dari pentingnya keterlibatan DPR RI dalam pencapaian SDGs. Panja yang dibentuk pada tahun 2015 ini bertujuan sebagai focal point DPR RI dalam berbagai kerja

sama internasional mengenai SDGs. Secara aktif, Panja SDGs memonitor, memberi saran, masukan, dan rekomendasi setiap tahunnya kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan, anggaran, dan legislasi mendukung implementasi SDGs.

DPR RI juga berkontribusi aktif dalam menyukseskan diplomasi ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran kepada masyarakat Indonesia melalui pembentukan Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Panja yang dibentuk pada 2015 ini telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional seperti peningkatan SDM, sertifikasi tenaga kerja, pengembangan ekonomi kreatif,



dan dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2017, Panja MEA bertransformasi menjadi Panja Kerja sama Ekonomi Regional (KER) dengan cakupan yang lebih luas. Panja KER aktif menindaklanjuti sejumlah resolusi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, yakni *Resolution on Supporting the Implementation of Financial Inclusion Programs in ASEAN*; *Resolution on Promoting an Inclusive and Innovation-Led Growth for the AEC*; *Resolution on Intra-Regional Economic Cooperation for Equitable Development and Inclusive Growth in the AEC* yang disahkan pada *AIPA General Assembly ke-38*; dan juga, *Resolution on Promoting Economic Growth and Free Trade*; *Resolution on the role of Parliaments in Promoting Seamless Regional Economic Integration*; *Resolution on Supporting the MSMEs in the Digital Age*. Di samping itu, sejak diberlakukannya

rencana phasing out biofuel dan bioliquid berbahan dasar kelapa sawit oleh parlemen Uni Eropa yang cenderung diskriminatif, Panja KER meningkatkan misi diplomasi ekonomi dan dialog intensifnya dengan parlemen negara-negara Uni Eropa termasuk dengan Austria yang menjadi Presiden Dewan Uni Eropa pada paruh tahun kedua 2018. Selain itu, Panja KER juga memberikan saran dan rekomendasi setiap tahunnya kepada pemerintah Indonesia terkait perdagangan, pariwisata, investasi, dan kerja sama pembangunan.

Selain pembentukan panja, DPR RI juga menjadi tuan rumah sekaligus menginisiasi forum antarpallemen internasional, dan juga melakukan kegiatan untuk menjadikan DPR RI lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Sejumlah inisiatif DPR RI tersebut adalah sebagai berikut:

Asian African Summit

Strengthening **South-South** Cooperation
to Promote World Peace and Prosperity

Jakarta, Indonesia, 22-23 April 2015



Konferensi Parlemen Asia Afrika

Dalam rangka peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika, DPR RI melalui BKSAP, menginisiasi konferensi antarpallemen negara-negara Asia Afrika di Jakarta pada bulan April 2015 yang dihadiri sebanyak 29 perwakilan parlemen. Konferensi, dengan tema *Strengthening the Role of Parliament in the South- South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity*, menghasilkan deklarasi untuk menyepakati komitmen terhadap Dasa Sila Bandung, solidaritas perjuangan kemerdekaan Palestina, pencapaian SDGs, serta penguatan parlemen dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.



Sidang *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* ke-6

DPR RI juga menjadi tuan rumah sidang GOPAC ke-6 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 2015 dengan tema *"bringing perpetrators of grand corruption to justice for a sustainable world where all citizen can live in prosperity and equality"*. Dalam sidang yang dihadiri 250 anggota parlemen dari 72 negara, Indonesia menginisiasi tema *"High Cost of Institutionilizing Democracy"* sebagai upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi yang harus bebas korupsi. Dalam sidang ini disepakati lahirnya Deklarasi Yogyakarta sebagai bentuk komitmen GOPAC dalam pemberantasan korupsi transnasional



Workshop Development Effectiveness to Implement the SDGs

DPR RI bersama GOPAC, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, dan *Westminster Foundation for Democracy* menyelenggarakan lokakarya penguatan peran parlemen untuk memastikan efektifitas sumber daya pembangunan dalam implementasi dan pencapaian target-target SDGs. Lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada akhir Agustus 2016 ini dihadiri oleh anggota parlemen dari beberapa negara, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Myanmar, Laos, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Maroko, yang merupakan tindak lanjut dari Sidang GOPAC ke-6 dan advokasi dalam pemberantasan korupsi.



ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) CAUCUS ke-9

Isu kemaritiman seperti *illegal fishing*, sengketa wilayah dan kerja sama kelautan, serta penanganan konflik secara damai juga menjadi perhatian DPR RI ketika menjadi tuan rumah AIPA Caucus ke-9 di Jakarta, pada bulan Juli 2017. AIPA Caucus ke-9 dilaksanakan DPR RI sebagai upaya untuk mengedepankan kepentingan nasional serta mewujudkan *Goal-16* SDGs tentang *Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development*.



1st World Parliamentary Forum on SDGs

Dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs melalui kemitraan dan pertukaran praktik cerdas, DPR RI menginisiasi forum antarpallemen pertama di dunia dan satu-satunya yang fokus akan isu SDGs. Forum yang diselenggarakan di Bali pada bulan September 2017, yang dihadiri 49 negara dan 285 anggota parlemen ini, menghasilkan Deklarasi Bali yang mempertegas peran parlemen dalam mempercepat pencapaian SDGs dan mengakhiri kekerasan sebagai syarat mutlak untuk mencapai SDGs.



Women Parliemantary Meeting - Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)

Pada Sidang tahunan ke-26 APPF di Hanoi, Vietnam, Januari 2018, DPR RI melalui ketua BKSAP telah berhasil membuat APPF menyepakati pertemuan rutin parlemen perempuan Asia Pasifik sebagai agenda rutin.



The House of Representatives
of the Republic of Indonesia



INDONESIA – PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP

HUMAN DEVELOPMENT AND MARITIME SUSTAINABILITY

23 – 24 July 2018 | Grand Hyatt Jakarta – Indonesia



Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)

DPR RI juga memprakarsai pelaksanaan dan terbentuknya IPPP sebagai bentuk terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi, kemaritiman, pencapaian SDGs, dan perubahan iklim dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Forum IPPP yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juli 2018 menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dengan 15 negara Pasifik untuk mempererat kemitraan, terutama dalam perdagangan, pemanfaatan potensi sumber daya maritim yang berkelanjutan melalui blue economy, dan pembangunan SDM melalui bantuan teknis, lokakarya, dan peningkatan kapasitas.



Deklarasi *Open Parliament* Indonesia

Pada 31 Agustus 2018, DPR RI mendeklarasikan *Open Parliament* sebagai wujud komitmen DPR RI untuk membuat parlemen Indonesia lebih modern, transparan, akuntabel, dan inklusif. Terselenggaranya deklarasi ini merupakan kerja sama antara DPR RI dengan masyarakat sipil agar DPR RI menjadi lebih dekat dengan rakyat. Tindak lanjut dari deklarasi ini adalah melalui Rencana Aksi yakni: pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI; keempat, penyusunan peta jalan atau *Roadmap Open Parliament* Indonesia; dan kelima, penyusunan kelembagaan *Open Parliament* Indonesia.



2nd World Parliamentary Forum on SDGs

World parliamentary forum on SDGs (WPFSD) kedua kembali digelar di Bali pada bulan September 2018, yang dihadiri oleh delegasi dari 45 negara, 5 negara observer, dan berbagai organisasi internasional. Dalam pertemuan yang mengangkat tema kemitraan menuju energi terbarukan bagi semua ini telah disepakati *Bali Commitment* yang menegaskan komitmen negara-negara peserta terhadap SDGs, antara lain melalui dibentuknya mekanisme khusus dalam tubuh parlemen yang didedikasikan untuk menyukseskan pencapaian agenda pembangunan global. Para peserta juga menyetujui agar WPFSD diselenggarakan secara berkala setiap tahun.



THE 4th MIKTA SPEAKERS' CONSULTATION

15 - 17 SEPTEMBER 2018 BALI, INDONESIA



The 4th MIKTA Speakers' Consultation

DPR RI menjadi tuan rumah pelaksanaan *MIKTA Speaker's Consultation* ke-4 di Bali pada bulan September 2018. Forum konsultasi para ketua atau pimpinan parlemen negara-negara middle power lintas benua yang mencakup Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia ini dilaksanakan untuk membangun konsensus kolektif pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama dari negara-negara anggota MIKTA, seperti pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan perempuan, dan isu maritim. *Forum MIKTA Speaker's Consultation* ke-4 di Bali menghasilkan konsensus bersama yang menekankan pentingnya peran parlemen dalam penguatan ekonomi kreatif sebagai upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan kerangka legislatif untuk menguatkan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, serta peningkatan kerja sama antarparlemen dalam mendukung penguatan kerja sama konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Combating Inequality through Social and Financial Inclusion

4 - 5 September 2019 Indonesia



3rd World Parliamentary Forum on SDGs

Pada tanggal 4 – 5 September 2019 DPR RI kembali menyelenggarakan *World Parliamentary Forum on SDGs* ketiga di Bali. Pada WPFSD ketiga ini DPR RI mengangkat tema “*Combating Inequality through Social and Financial Inclusion*”. Inisiatif DPR RI ini merupakan tindak lanjut dari *World Parliamentary Forum on SDGs* sebelumnya dan sekaligus sejalan dengan fokus *the United Nations High-Level Political Forum 2019* yakni *empowering people and ensuring inclusiveness and equality*. Sebagaimana pelaksanaan WPFSD sebelumnya, WPFSD ketiga berjalan dengan baik yang dihadiri berbagai parlemen berbagai negara sekaligus organisasi internasional untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

focus¹, pl. **foc**
[ˈfoukəsɪz] n. 1. M
etc.); *Opt*: **depth**
profondeur de ch
(ii) (of instrument
au point; (ii) (of
(of headlamp h
le même sens
parall) en à une
instrument
instrument
instrument



Fokus Diplomasasi DPR RI

1. Menjawab Tantangan Pencapaian SDGs melalui Peran Parlemen

Tahun 2015 merupakan tahun yang bersejarah dalam kerangka pembangunan global, yaitu berakhirnya target pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) dan dimulainya komitmen negara-negara di dunia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada 2030. Ada perbedaan utama dalam struktur penyusunan dan rencana implementasi MDGs dan SDGs, yaitu keterlibatan dan peran parlemen yang semakin diakui.

Pada 25 September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi berjudul "*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*" sebuah dokumen aspiratif yang dengan tegas menyebutkan pentingnya peran parlemen dalam mencapai SDGs. Parlemen dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat memastikan terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs secara efektif.



Lebih lanjut, Resolusi tersebut menggarisbawahi pentingnya kontribusi serta kerja sama erat dan engagement antara Parlemen, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organ-organ PBB, masyarakat adat, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan akademisi dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang tercakup dalam SDGs secara komprehensif, yaitu aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Indonesia secara khusus memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 melalui peran aktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Ellen Johnson Sirleaf

(Liberia), dan Perdana Menteri David Cameron (Inggris) sebagai Ketua *High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) on Post-2015 Development Agenda*. Berbagai inisiatif yang lahir melalui HLPEP terangkum dalam laporan Sekjen PBB berjudul: *"A life of Dignity for All."* Selanjutnya, melalui rangkaian pertemuan *Open Working Group on SDGs (OWG)*, dihasilkan dokumen *OWG Proposals on SDGs* yang memuat 17 Tujuan dan 169 Target untuk agenda pembangunan global pasca-2015.

Ada sejumlah tantangan dan dinamika dalam pencapaian SDGs, antara lain: perbedaan demografis di tingkat nasional, regional, maupun global; arus urbanisasi yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah warga





miskin di perkotaan; dan permasalahan birokrasi dan koordinasi antarsektor dan antarlembaga.

Dengan 300 indikator, SDGs merupakan gerakan global yang sangat inklusif, dan oleh karena itu, kemitraan dan kolaborasi di tingkat bilateral maupun multilateral merupakan faktor penting yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan tantangan dan mencari solusi terbaik untuk pencapaian SDGs.

Keterkaitan atau interlinkages antartujuan dan antartarget SDGs juga merupakan aspek penting yang perlu menjadi perhatian. Sebagian target merupakan driver untuk mencapai goal lainnya, sementara pencapaian sebagian goal juga bergantung pada tercapainya target-target di goal yang lain. Karena adanya ketergantungan antargol dan antartarget, implementasi SDGs harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh sektor dan lembaga terkait.

Pencapaian SDGs juga harus dikomunikasikan dan diaplikasikan di tingkat daerah dan pedesaan, antara lain melalui: perencanaan pembangunan dan APBD yang sejalan dengan tujuan-tujuan dan target SDGs; sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan kerja sama multi sektor.

Sementara itu, ada sejumlah faktor yang dapat mendukung pencapaian SDGs, antara lain: pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan gizi dan kualitas pendidikan; demokratisasi dan desentralisasi kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia; kesatuan ekosistem antara kota dan kota satelit yang mendorong pemerataan pembangunan dan sistem tata kota yang terintegrasi; serta penguatan kerangka kebijakan, hukum, dan institusi nasional.



Untuk menunjang upaya pencapaian SDGs secara menyeluruh, BKSAP DPR RI senantiasa mendukung Pemerintah Daerah untuk berinisiatif dalam menjalin kerja sama internasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). BKSAP DPR RI juga kerap mendorong mobilisasi sumber pembiayaan alternatif untuk merealisasikan pencapaian SDGs, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dan lembaga/donor asing.

Di tingkat regional, Indonesia berpotensi untuk memimpin pencapaian SDGs melalui program-program pembangunan yang inovatif dan dapat menunjang terciptanya masa depan

yang berkelanjutan. Sementara itu di tingkat global, BKSAP DPR RI berhasil memosisikan Indonesia sebagai role model dalam upaya pencapaian SDGs. Selain aktif menyuarakan pentingnya penyusunan legislasi dan pengalokasian anggaran yang ramah SDGs di berbagai forum antarpallemen, BKSAP DPR RI juga senantiasa berinovasi melalui berbagai aksi nyata yang mewujudkan kepedulian parlemen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Di tahun 2017, BKSAP DPR RI menggagas terbentuknya "World Parliamentary Forum on Sustainable Development/WPFSD" yaitu forum antarpallemen pertama di dunia yang didedikasikan khusus untuk membahas isu pembangunan berkelanjutan. BKSAP dalam hal ini merupakan pionir yang menggerakkan parlemen seluruh dunia untuk saling bersinergi dan bertransformasi menuju keberlanjutan kehidupan bersama.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD





Selain sukses menyelenggarakan WPFSD selama tiga tahun berturut-turut (2017, 2018, 2019), BKSAP juga merupakan pihak yang pertama kali mengusulkan agar SDGs dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar SDGs lebih mudah untuk dikomunikasikan dan lebih dekat dengan masyarakat luas. Berdasarkan rekomendasi DPR RI, BAPPENAS menerjemahkan SDGs sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Istilah tersebut telah menjadi bagian penting dalam proses pencapaian dan lokalisasi SDGs di Indonesia.

Kiprah BKSAP selanjutnya dalam pencapaian SDGs terwujud melalui kolaborasi erat antara DPR RI dan United National Environment Programme (UNEP) dalam menyelenggarakan

Parliamentary Side Event di sela-sela pertemuan *High-Level Political Forum (HLPF) 2019* yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 9-18 Juli 2019, bersamaan dengan disampaikannya laporan lengkap *Voluntary National Review (VNR)* Indonesia. Peran DPR yang mampu menjangkau segala lapisan masyarakat, termasuk di pedesaan untuk melakukan sosialisasi TPB menjadi pertimbangan utama UNEP dalam menjalin kerja sama dengan DPR. Acara tersebut mampu mempererat kemitraan antara pemerintah dan parlemen, serta menjembatani kepentingan nasional dan kebijakan internasional terkait TPB. Inisiatif kerja sama UNEP dan DPR RI telah mengukuhkan peran Indonesia dalam tata kelola sistem internasional.

Like the people...

TO COME TO THE A MORE LIVABLE ENVIRONMENT,
HAVE A RESPONSIBLE SOCIETY, MAKE THE FUTURE
SUSTAINABLE, MAKE THE EFFORT OF ALL PEOPLE
AND TO MAKE THE BLENDED OF LIFE FOR SUSTAINABLE
AND AN EFFORT TO MAKE SUSTAINABLE A

GREEN NEW
DEAL

There



MA

PLANET

THERE IS NO
PLANET B





2. Lingkungan dan Perubahan Iklim

Lingkungan dan perubahan iklim, yang telah menjadi isu global saat ini, juga menjadi perhatian dalam aktivitas diplomasi DPR RI. Pasalnya, dunia telah dihadapkan pada persoalan kerusakan lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara tertentu, tetapi juga oleh seluruh umat manusia di muka bumi.

Kerusakan lingkungan selalu dihubungkan dengan berbagai macam isu yang menyangkut kelangsungan hidup umat manusia seperti masalah

keterbatasan energi, kerusakan ekosistem, permasalahan demografis, dan juga bahan makanan. Hari ini, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh pembangunan selama berpuluh-puluh tahun. Revolusi Industri yang dilakukan sejak 250 tahun lalu, ditambah dengan industrialisasi yang dilakukan oleh *leading countries* (negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, China dan Jepang), merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Akibatnya adalah efek gas rumah kaca,



yaitu ketika selubung gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer semakin menebal dan menyebabkan kenaikan temperatur secara cepat. Perubahan inilah yang menghasilkan pemanasan global (*Global Warming*). Pemanasan global dan perubahan iklim adalah masalah yang sangat serius yang berdampak pada kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi.

Isu perubahan iklim diperjuangkan oleh DPR RI di tingkat internasional melalui diplomasi parlemen. DPR RI, melalui BKSAP, telah secara aktif ikut serta dalam pertemuan tahunan

parlemen dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* atau *Conference of the Parties (COP)*, diantaranya parliamentary side event pada COP 21 di Paris pada 2016, yang menghasilkan Persetujuan Paris yang merupakan salah satu tonggak kesepakatan dunia dalam menanggulangi perubahan iklim. Dalam salah satu sesi parlemen dalam sidang COP 22 di Marrakesh, Maroko, November 2016, Dr. Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim. Komitmen tersebut telah ditunjukkan DPR RI dengan menyetujui



pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*) menjadi Undang-Undang pada 19 Oktober 2016.

Paris Agreement, yang merupakan kelanjutan dari Kyoto Protokol, adalah bentuk kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah banyaknya bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim. Disahkannya Persetujuan Paris oleh DPR RI menunjukkan bahwa parlemen mendukung penuh upaya mengatasi perubahan iklim, baik secara nasional maupun melalui kerja sama internasional. Dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut sesungguhnya terkait dan menjadi bagian dari upaya pencapaian SDGs, dan di sinilah parlemen memiliki andil untuk memastikan implementasi SDGs tepat sasaran, akuntabel dan tentunya bermanfaat bagi semua —sejalan dengan prinsip *leave no one behind*. Selain melalui sidang COP, sidang umum tahunan IPU juga telah dimanfaatkan oleh DPR RI, bersama dengan anggota parlemen negara-negara di dunia, untuk membahas pentingnya pelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Pada Sidang Umum IPU ke 134 di Lusaka, Zambia, Maret 2016, misalnya, dalam salah satu sesi

dengan tema "*Protecting the Planet*", yang mendiskusikan mengenai upaya-upaya parlemen dalam melindungi lingkungan pasca-sidang COP 21 yang menghasilkan Persetujuan Paris, DPR RI menekankan pentingnya kewajiban anggota parlemen untuk memprioritaskan isu perubahan iklim dalam pendidikan usia dini. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesadaran publik akan pentingnya isu perubahan iklim dipahami sejak dini.

Kehadiran DPR RI dalam Sidang Umum IPU ke-135 di Jenewa, Swiss, Oktober 2016, juga telah dimanfaatkan oleh DPR RI dan parlemen anggota IPU lainnya untuk menyikapi persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim, terutama bagaimana parlemen dapat berkontribusi pada sidang UNFCCC atau COP 22 di Marrakesh, Maroko, November 2016. Isu lingkungan yang kembali diangkat dalam Sidang Umum IPU ke-139 di Jenewa, Swiss, Oktober 2018, juga menjadi perhatian DPR RI, dan pada sidang ini telah disepakati resolusi emergency item mengenai "*Climate Change*". Resolusi tersebut mengajak parlemen anggota IPU untuk mencapai 100% target energi terbarukan, dan memperkuat komitmen nasional dan internasional, termasuk implementasi dalam legislasi nasional serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan laporan mengenai perubahan iklim. Merespons resolusi tersebut, delegasi DPR RI menegaskan bahwa aksi unilateral yang dilakukan



oleh sejumlah negara yang mundur dari Persetujuan Paris adalah tidak dapat dibenarkan; sebaliknya delegasi DPR RI mendorong negara-negara anggota IPU untuk mewujudkan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim sesuai Persetujuan Paris.

DPR RI juga hadir dalam forum *Global Green Growth Week (GGGW) 2016*, di Jeju Island, Korea Selatan, yang mengambil tema '*Maximizing Impact for Inclusive and Sustainable Green Growth*', yang merupakan kali pertama keterlibatan DPR RI dalam forum ini. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, yang hadir dalam forum tersebut meminta agar DPR RI dapat mengeksplorasi peran-peran yang

dapat dilakukan parlemen dalam mendukung visi-misi *Global Green Growth Institute (GGGI)* dan bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara BKSAP DPR RI dengan GGGI Indonesia.





3. Ekonomi dan Perdagangan Internasional

Sejalan dengan diplomasi ekonomi yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, BKSAP mengambil peran aktif dalam mempromosikan potensi perdagangan dan investasi Indonesia. Lebih jauh lagi, BKSAP mengambil peran aktif dalam memastikan kepentingan-kepentingan nasional selalu terlindungi dalam setiap perjanjian perdagangan internasional yang disepakati pemerintah. Melalui berbagai organisasi kerja sama antarparlemen yang berfokus pada ekonomi, perdagangan dan investasi, BKSAP secara konsisten memperjuangkan tatanan perdagangan dunia yang adil, transparan dan inklusif.

Perdagangan internasional diyakini oleh banyak kalangan dapat menjadi panacea bagi ketimpangan

pertumbuhan ekonomi antarnegara. Globalisasi semakin mengaburkan batas-batas negara dan membawa sistem perdagangan dunia semakin terintegrasi satu sama lain. Intensitas transaksi perdagangan dan investasi antarnegara diharapkan dapat membawa pada pemerataan kesejahteraan. Melalui partisipasi aktif di *Parliamentary Conference on World Trade Organization (PCWTO)*, yang merupakan wadah dialog internasional anggota parlemen dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pimpinan BKSAP yang memegang posisi strategis di Dewan Pengarah selalu menekankan bahwa perdagangan internasional bukan *zero sum game*. Tujuan yang ingin dicapai tidak lagi berkutat pada statistik dan neraca perdagangan. Pemerataan kesejahteraan dan



pembangunan berkelanjutan menjadi esensi yang mutlak diperjuangkan. Oleh karenanya, perdagangan internasional harus mempertimbangkan isu-isu sosial di luar batas isu-isu ekonomi.

Kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan produktif menjadi salah satu isu yang kerap disuarakan, terutama dalam *Parliamentary Session within the framework of the WTO Public Forum* sebagai salah satu agenda bergengsi sesi tahunan WTO Public Forum yang mempertemukan anggota parlemen dari berbagai belahan dunia. Pemberdayaan UMKM menjadi isu lain yang juga kerap kali disuarakan. Secara aktif BKSAP memasukan agenda keleluasaan akses pembiayaan dan permodalan untuk mendorong

keikutsertaan industri mikro, kecil dan menengah di rantai pasok global ke dalam setiap pertemuan PCWTO. Tidak dapat dipungkiri, bahwa posisi sebagai anggota Dewan Pengarah telah memberikan keuntungan dari segi kesempatan bagi Indonesia untuk memengaruhi agenda-agenda PCWTO.

BKSAP juga melakukan peran aktif dalam isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan internasional. *The Parliamentary Network on World Bank and the International Monetary Fund* merupakan salah satu kerangka dialektika anggota parlemen seluruh dunia untuk mengadvokasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi di lembaga keuangan internasional dan pembiayaan pembangunan multilateral. Di tahun 2018, *Parliamentary Network*



on *World Bank and the International Monetary Fund* menyelenggarakan *Global Parliamentary Conference (GPC)* di Bali bersamaan dengan *Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group. Investing in Human Capital*, yang menggarisbawahi secara khusus peningkatan kapasitas kaum pemuda dan perempuan agar mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi produktif, dipilih BKSAP sebagai tema GPC tahun ini. Berbagai negara akan menghadapi bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan peran parlemen untuk menyiapkan ekosistem yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk populasi muda yang akan terus bertambah. Negara diharapkan dapat menuai manfaat dari bonus demografi melalui pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif serta diversifikasi ekonomi.

Terkait kesetaraan gender di dunia kerja, saat ini perempuan masih menghadapi diskriminasi baik dari kesempatan kerja maupun di tempat kerja. Berbagai kajian yang dilakukan Bank Dunia mendapati bahwa perbedaan pendapatan antara pekerja wanita dan pria menyebabkan negara kehilangan potensi kekayaan sekitar 160 triliun dolar AS. Kajian yang dilakukan IMF di negara-negara anggotanya menunjukkan bahwa menutup kesenjangan gender akan menghasilkan stabilitas yang lebih besar serta memberikan dampak fiskal dan anggaran yang positif bagi negara. Menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hingga sejajar dengan laki-laki dapat meningkatkan produk domestik bruto sebesar 5% di Amerika Serikat, 9% di Jepang, dan 27% di India.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015 membutuhkan keterlibatan parlemen dalam mengawal integrasi ekonomi regional. Salah satu upaya BKSAP adalah melalui pembentukan Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di

tahun pertama pembentukannya, Panja berfokus pada kontribusi terhadap penyusunan dan implementasi strategi nasional dalam menghadapi MEA. Hal ini merupakan pula salah satu upaya BKSAP untuk menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia dengan cita-cita integrasi regional yang antara lain tertantum dalam resolusi-resolusi yang disepakati dalam forum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Salah satu bidang ekonomi yang menjadi fokus kerja Panja adalah UMKM, terutama UMKM industri kreatif. Dengan 57,9 juta pelaku UMKM pada saat MEA mulai diberlakukan, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pelaku UMKM di antara anggota ASEAN. Menyatunya ASEAN sebagai suatu komunitas ekonomi dan basis produksi bersama tentunya diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia yang mencakup 40 persen populasi ASEAN. Salah satu rekomendasi Panja adalah mengenai kebutuhan perangkat hukum dan kebijakan yang terintegrasi. Secara spesifik mengenai industri kreatif, Panja merekomendasikan kerja sama kawasan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk memangkas birokrasi pendaftaran hak paten dan merk dagang di masing-masing negara anggota ASEAN.

BKSAP juga memiliki Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER). Panja ini dibentuk mengingat semakin hari agenda ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh proses integrasi ekonomi global yang ditandai oleh perjanjian dagang yang semakin mengaburkan batas-batas antarnegara. Integrasi ekonomisejatinya menekankan pada fasilitasi kerja sama ekonomi melalui, antara lain, pembebasan pajak impor maupun ekspor sehingga transaksi perdagangan di antara negara anggota yang bekerja sama menjadi murah dan efisien. Di tataran regional, ASEAN telah mengimplementasikan 5 FTA yaitu *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*





(AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Selain itu, ASEAN mengembangkan pula kerja sama dengan mitra strategis dan saat ini tengah menegosiasikan mega FTA regional antara 10 negara anggota

ASEAN dengan 6 negara mitra dagang. Indonesia juga terlibat dalam kerja sama ekonomi sub-regional, yaitu *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT)*, dan *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*. Oleh karena itu dibutuhkan elemen





pengawasan, sehingga kerja sama perdagangan yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk memetik manfaat di bidang ekonomi saja, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan rakyat atas nama globalisasi.

Panja MEA dan Panja KER tidak hanya melakukan dialog dengan unsur pemerintah dan institusi negara tetapi juga dengan swasta dan pelaku-pelaku bisnis. Dalam melaksanakan fungsi diplomasi parlemen, delegasi BKSAP seringkali harus bernegosiasi dengan parlemen negara-negara lain dalam sidang-sidang antar parlemen. Dialog dengan pelaku usaha terkait kondisi di lapangan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kenyataan terkini di lapangan sehingga posisi intervensi yang diambil di forum-forum internasional tetap mewakili kepentingan di akar rumput. Masukan-masukan yang didapat sepanjang

perjalanan Panja telah diterbitkan dan tersedia bagi publik. Diharapkan masukan-masukan tersebut dapat memberikan efek koreksi bagi pihak-pihak terkait dan mengilhami publik untuk bersama-sama mengawal perjanjian perdagangan internasional agar selalu berpijak pada kepentingan nasional. Selain rekomendasi, Panja yang dimiliki BKSAP berhasil mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama. Rumania dan Austria menawarkan peluang kerja sama infrastruktur pelabuhan dan perkeretaapian. Sementara itu peluang ekspor kopi ke belahan Eropa Timur, sebagai komoditas unggulan alternatif untuk menyiasati kelapa sawit yang tengah mendapat sorotan menyusul diterbitkannya resolusi Parlemen Uni Eropa, layak untuk dikomunikasikan di dalam negeri agar mendapatkan follow-up pihak terkait.



Tahun 2018 diwarnai oleh keprihatinan dan kecemasan akan kebijakan hambatan perdagangan yang dijalankan Amerika Serikat untuk mereduksi defisit neraca perdagangan. Kebijakan ini tentunya menimbulkan kecemasan global dan disrupti terhadap tatanan perdagangan multilateral yang berpijak pada upaya-upaya mengeliminasi hambatan perdagangan. Sedikit banyak kebijakan tersebut akan memengaruhi industri dalam negeri yang telah berperan serta dalam rantai pasok global. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat blok perdagangan baru, diantaranya melalui negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan enam negara mitra di kawasan Asia Pasifik. Negosiasi RCEP saat ini tengah berjalan dan

tentunya membutuhkan keterlibatan pengawasan dari parlemen.

Upaya menggalang kerja sama bagi mitigasi dampak perang dagang dilakukan BKSAP melalui forum-forum antarpemerintah. Untuk pertama kalinya di forum Sidang Umum AIPA tahun 2018 di Singapura, BKSAP meminta negara-negara anggota ASEAN, melalui Resolusi mengenai *Regional Efforts to address the Impact of Global Trade Tension between Economic Powerhouses* yang disetujui secara aklamasi dan menjadi resolusi pertama di kawasan yang menggarisbawahi esensi peningkatan kerja sama ekonomi baik antarnegara ASEAN maupun antara negara ASEAN dengan mitra wicara ASEAN, untuk meminimalisasi dampak perang dagang bagi kawasan.



4. Digitalisasi dan Revolusi Industri

Tidak berlebihan apabila saat ini dikatakan dunia telah berada di genggaman tangan. Perkembangan teknologi internet, ponsel pintar, dan infrastruktur telekomunikasi telah memungkinkan populasi dunia untuk terkoneksi satu sama lain dan berbagi informasi dari berbagai belahan dunia. Dalam laporan *Measuring the Information Society Report 2018*, yang diterbitkan *The International Telecommunication Union (ITU)*, disebutkan bahwa sebanyak 51,2 persen dari populasi dunia atau sekitar 3,9 miliar orang telah menggunakan internet. Digitalisasi memungkinkan

transformasi dalam berbagai hal. Dalam bidang industri dan perdagangan, digitalisasi membawa perubahan mulai dari proses produksi hingga pengalaman konsumen sebagai end-user. Tidak hanya memengaruhi perdagangan dan industri, digitalisasi dan revolusi industri ke empat membawa disrupsi terhadap demokrasi dan ruang publik.

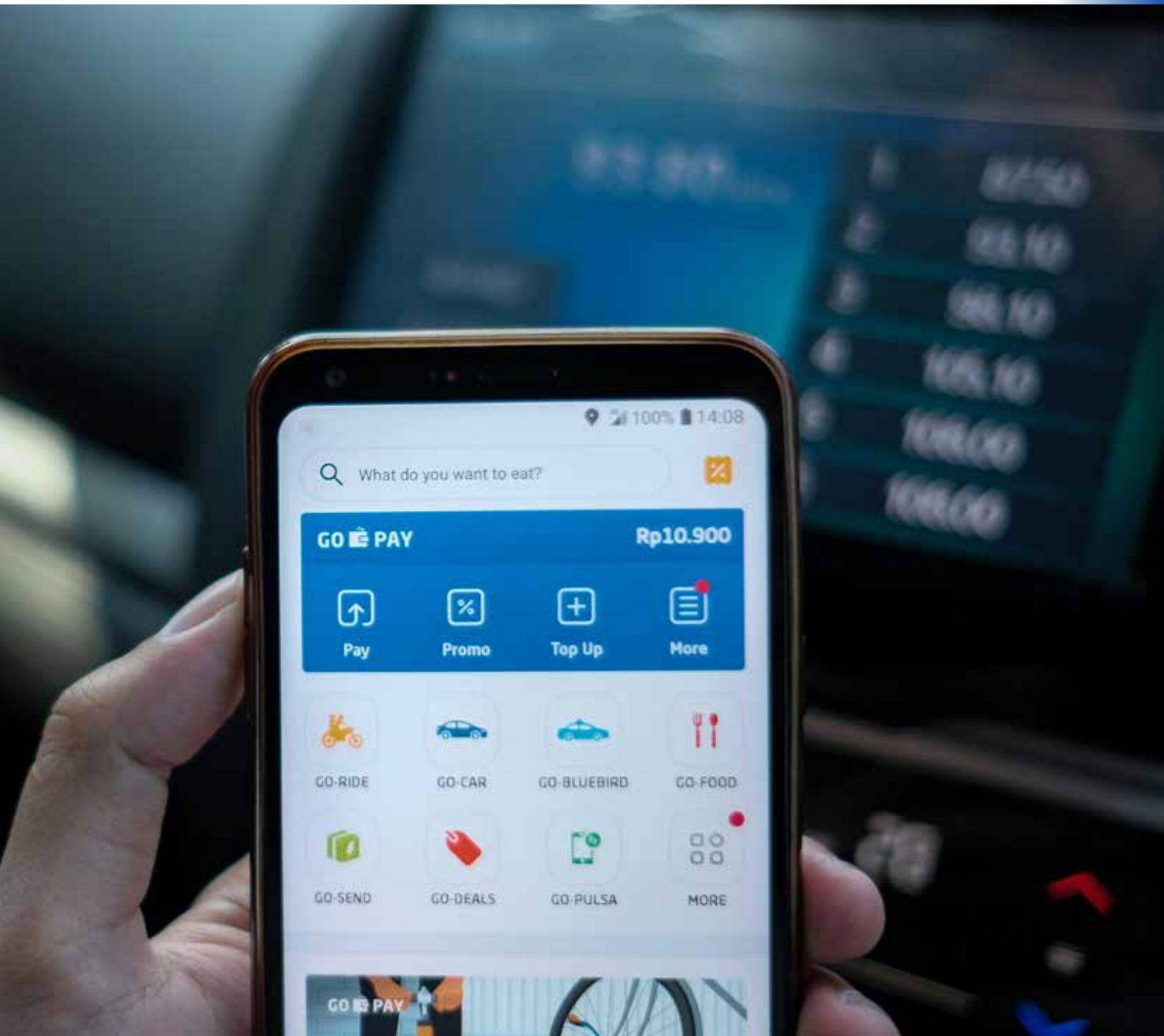
Perkembangan teknologi yang menuju pada otomatisasi pekerjaan membawa kecemasan tersendiri. Terutama bagi negara dengan populasi penduduk sebesar Indonesia yang diproyeksikan akan menghadapi bonus demografi



angkatan kerja muda pada periode 2020-2030. Apabila tidak disikapi dengan baik, pertumbuhan penduduk produktif secara masif tidak lagi menjadi bonus melainkan beban bagi negara. Solusi yang ditawarkan BKSAP antara lain melalui pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan pemuda sebagaimana disampaikan pada forum *The Fifth IPU Global Conference of Young Parliamentarians*. Peningkatan keterampilan di bidang pendidikan vokasi dan kesempatan

pemagangan untuk meningkatkan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar menjadi solusi lain, sebagaimana diskusi Panja MEA dengan pihak-pihak terkait di Jerman yang telah sangat berpengalaman dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Dengan demikian, bagaimana BKSAP berkontribusi dalam dialektika internasional terkait digitalisasi dan revolusi industri 4.0? Dalam berbagai





kesempatan sidang yang membahas tema ini, baik di tataran regional maupun internasional, BKSAP senantiasa menyampaikan kontribusi terhadap dialog yang terjadi. Melalui berbagai intervensi, BKSAP tidak hanya menyambut baik kesempatan-kesempatan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi digital tetapi juga menyikapi secara kritis dampak yang mungkin ditimbulkan.

Pada kesempatan *OECD Parliamentary Days* tahun 2018, BKSAP mengangkat isu perkembangan teknologi dan akses yang ditimbulkan bagi politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa gadget dan kemudahan akses informasi digital telah mengubah cara politik dirancang dan dijalankan. Anggota parlemen semakin tidak berjarak dengan rakyat yang diwakilinya. Masyarakat bebas menyapa melalui balasan di twitter ataupun komentar di Instagram. Di satu sisi hal tersebut meningkatkan dan mempermudah pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan dan wakil mereka di lembaga parlemen. Di sisi lain, kemudahan akses internet yang memberikan kebebasan bagi publik untuk menyuarakan aspirasi berpotensi merusak demokrasi itu sendiri. Perkembangan berita palsu atau hoax secara masif telah menciptakan fakta-fakta alternatif yang berpotensi merusak secara politik. BKSAP berharap forum-forum OECD dapat dipergunakan untuk berbagi ilmu mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh parlemen di berbagai negara untuk mengatasi tantangan digital. Politik tidak lagi dapat dijalankan secara *business as usual*. Langkah-langkah inovatif diperlukan karena berita palsu atau hoax dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang merusak jika publik secara umum percaya pada "fakta-fakta" ini sebagai

basis aspirasi mereka. Pandangan senada disampaikan BKSAP dalam sidang *The eighth World e-Parliament Conference 2018* di Jenewa.

Digitalisasi dan revolusi industri sudah seharusnya dapat dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk kaum perempuan. Terkait hal ini, BKSAP melalui Sidang Umum tahunan AIPA bulan September 2018, mensponsori Resolusi bertema pemberdayaan perempuan di era revolusi industri 4.0. Resolusi menekankan pada kebutuhan parlemen-parlemen di kawasan untuk mengidentifikasi dan mengamandemen undang-undang apabila diperlukan sehingga kaum perempuan di ASEAN dapat memetik manfaat dari perkembangan teknologi digital, seraya memitigasi tantangan yang mungkin ditimbulkan terkait privasi dan risiko keamanan. Tanpa pelatihan dan pendidikan memadai, kaum perempuan tidak dapat mengembangkan kemampuan digitalnya. Pelatihan bagi perempuan tidak hanya menghilangkan kesenjangan keterampilan dan buta huruf digital tetapi juga untuk menjamin kesetaraan kesempatan. Jumlah perempuan yang masih tertinggal dalam bidang-bidang yang dinilai maskulin seperti sains, teknologi, engineering, dan matematika menjadi tantangan bersama. BKSAP juga memberikan dorongan kepada negara anggota ASEAN untuk membawa perubahan kebijakan bagi industri mikro, kecil dan menengah, terutama UMKM yang dipimpin perempuan, sehingga dapat lebih kompetitif. Kebijakan yang diharapkan terutama terkait akses teknologi dan inovasi secara paralel yang memungkinkan perluasan akses keuangan dan pasar bagi UMKM tersebut.



5. Demokrasi: Partisipasi Pemuda dan Anti - Korupsi

Membangun demokrasi yang inklusif tanpa korupsi

Berbicara demokrasi, DPR merupakan rujukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia berkembang dari waktu-waktu. DPR menjadi pusat sejarah bagaimana lembaga tersebut menjadi tempat bertemunya beragam pandangan dan ideologi politik pasca-Orde Baru. Sehingga wajar kiranya, bila kemudian saat ini, dengan beragam perubahan kebijakan baik di sektor anti-

korupsi, transparansi dan akuntabilitas, inklusivitas dan representasi, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India dan Amerika Serikat).

Dalam beragam kesempatan, DPR RI aktif berpartisipasi dalam isu-isu terkait demokrasi, seperti demokrasi inklusif melalui pelibatan pemuda, perempuan



hingga kelompok-kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan hingga proses politik, maupun dalam isu-isu anti-korupsi, transparansi, keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Dengan catatan khusus bahwa isu perempuan menjadi satu domain agenda besar tersendiri yang tertulis dalam bagian lain buku ini, sejumlah catatan peran aktif DPR RI dalam isu-isu terkait demokrasi

terurai dalam rekam waktu lima tahun periode DPR kali ini. Berikut sejumlah catatannya.



Demokrasi inklusif mendorong generasi muda ke pentas politik.

Dialektika demokrasi membawa komunitas internasional ke perspektif yang semakin luas yakni inklusivitas. Dalam konteks ini, proses politik dan pemerintahan yang semakin inklusif membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat secara luas agar demokrasi mewujudkan menjadi kesejahteraan publik senyatanya. Demokrasi inklusif meliputi pelibatan dan pemihakan kepada perempuan, pemuda, dan kelompok-kelompok marjinal lainnya.

Apabila inklusivitas perempuan dalam proses demokrasi telah meningkatkan peran perempuan dalam beragam skala progres pembangunan, tidak demikian halnya dengan pelibatan dan peningkatan peran pemuda dalam proses demokrasi. Rerata global keterwakilan pemuda misalnya dalam pentas politik, khususnya dalam posisinya di kursi parlemen, tercatat hanya 1,6% (di bawah 35 tahun), atau 23,9% (di bawah 40 tahun) pada 2014 menurut data IPU.



Keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi, khususnya dalam panggung politik telah mendapat sorotan dunia internasional sejak lama. Namun, politik global terkait keterlibatan pemuda dalam partisipasi politik mendapatkan momentumnya pada 2015, ketika Dewan Keamanan (DK) PBB mulai menyoroti peran pemuda dalam perdamaian dan keamanan melalui resolusi 2250. Dalam salah satu paragraf operatifnya, DK PBB mendorong negara anggota untuk mempertimbangkan cara meningkatkan keterwakilan inklusif pemuda dalam pengambilan

keputusan di setiap level pada institusi lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tidak ketinggalan di level parlemen. Komunitas parlemen internasional seperti IPU juga semakin gencar berkampanye mengenai keterlibatan pemuda dalam proses politik. Pada 2013, IPU membentuk *Forum of Young Parliamentarians* untuk mendorong lebih jauh keterlibatan pemuda dalam agenda IPU dan juga dalam parlemen. Bagi DPR, demokrasi inklusif dengan melibatkan pemuda sejatinya telah dimulai sejak lama. Tidak hanya dalam



ranah legislatif, tetapi juga eksekutif yang ditandai dengan terbukanya peluang anak muda menduduki jabatan kepala daerah hingga pemimpin nasional.

Dengan komitmen mendorong demokrasi inklusif yang melibatkan pemuda, DPR juga terlibat aktif dalam mendorong peningkatan dan keterlibatan peran pemuda di parlemen. Pada Sidang Umum IPU ke-134, di Lusaka, Zambia, Maret 2016 misalnya, dengan tema *rejuvenating democracy, giving voice to youth*, Delegasi DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyuarakan perlunya negara melalui perangkat legislasi berpihak pada pelibatan pemuda dalam proses politik seperti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang membuka ruang usia muda untuk terlibat dalam pentas politik (Gubernur: 30 tahun, Bupati/

Walikota: 25 tahun).

Kegigihan DPR untuk turut serta dalam upaya internasional mendorong partisipasi pemuda membuahkan hasil. Pada Sidang Umum IPU ke-136, April 2017, anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, bersama wakil dari Maladewa terpilih untuk duduk sebagai wakil Asia Pasifik di Board of the IPU Forum of Young Parliamentarians, setelah bersaing ketat dengan calon-calon lainnya dari Grup Geopolitik Asia Pasifik seperti dari Iran hingga Mongolia. Jabatan internasional tersebut diemban selama dua tahun hingga 2019.

Posisi yang diemban wakil DPR tersebut sangat strategis untuk mendorong agenda pemuda masuk dalam beragam isu parlemen baik di level global maupun nasional. Ia terlibat aktif pula dalam beragam agenda *Internasional Forum of Young Parliamentarians*



termasuk dalam *4th IPU Global Conference of Young Parliamentarians*, November 2017, dengan menjadi *co-rapporteur* dari konferensi tersebut dan juga panelis pada *side event meeting Members of the Board of the IPU Forum of Young Parliamentarians* dengan *Global Affairs Canada* dengan sorotan khusus pada situasi demokrasi global, tantangan dan hambatan kaum muda dalam berpolitik hingga penggunaan teknologi dalam mendukung kaum muda berpolitik. Ia juga bertindak sebagai moderator pada sesi pertemuan di konferensi global tersebut dan juga menjadi panelis pada sesi diskusi lainnya.

Kampanye untuk meningkatkan peran pemuda dalam kancah politik dan beragam agenda global dan nasional juga mengemuka tidak hanya di level internasional, tetapi juga di level regional. Pada *24th Annual Meeting*

of the Asian Pacific Parliamentary Forum (APPF), Januari 2016, DPR mendorong peningkatan kerja sama dan kebebasan pergerakan para pelajar, guru, peneliti dan penyedia pendidikan secara lintasbatas. Hal tersebut sebagai upaya untuk *Ensuring an Optimistic and Prosperous Future for Youth*, yang juga menjadi agenda pembahasan dari APPF tahun itu.

DPR juga berbagi praktik cerdas dalam konteks pendidikan generasi muda pada *25th Annual Meeting APPF*, Januari 2017, ketika membahas agenda *Ensuring Effective Succession Planning Including Education for Leaders of a New Generation*. DPR berbagi praktik cerdas mengenai kewajiban proporsi khusus sekitar 20% dalam APBN untuk pendidikan yang menandakan komitmen tegas negara dalam bidang pendidikan.



Peran pemuda dalam SDGs menarik organ utama PBB, yakni *UN Economic and Social Council (ECOSOC)*, untuk terlibat dalam advokasi di level parlemen dengan mengundang wakil dari IPU untuk berpartisipasi dalam *7th ECOSOC Youth Forum, 2018*. Forum dengan tajuk utama *the role of youth in building sustainable and resilient urban and rural communities*, dihadiri oleh Irene selaku anggota *Board IPU Forum of Young Parliamentarians*. Pada forum tersebut, DPR menggarisbawahi pentingnya pemuda terlibat dalam SDGs sejak awal, dari level perencanaan hingga formulasi kebijakan. Di

Indonesia, pembahasan mengenai pelibatan pemuda sudah dimulai sejak penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs dan juga Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.

Saat ini keterlibatan pemuda dalam beragam proses kebijakan publik dan pengambilan keputusan mulai mendapatkan sorotan di forum parlemen negara-negara Asia, yakni *Asian Parliamentary Assembly (APA)*. Pada pertemuan Komisi Sosial Budaya APA di Thailand, Februari 2019 lalu, seluruh anggota Komisi, termasuk DPR RI, menyepakati masuknya draf resolusi



baru bertajuk *the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia*, sebagai bahan pembahasan lebih mendalam di APA. DPR bahkan memberikan perspektif baru dalam draf resolusi tersebut dengan mendorong negara-negara parlemen di Asia untuk menyediakan platform yang memadai bagi pemuda untuk terlibat dalam urusan publik melalui *political will* dan juga produk legislasi.

Mengingat potensi generasi muda, dan menimbang demografi penduduk

Indonesia yang berusia muda (20-35 tahun) mencapai lebih dari 90 juta jiwa, DPR akan terus berkomitmen untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif pemuda dalam setiap sendi kehidupan negara. Seiring dengan komitmen tersebut, DPR juga akan terus menjalankan diplomasi parlemennya untuk berbagi praktik cerdas mengenai pemberdayaan pemuda sekaligus menyerap *lesson learned* dari berbagai negara dalam isu tersebut.

**CORRUPTION
CREATES
POVERTY**





Aktor global pemberantasan korupsi.

Menindaklanjuti peran aktif DPR RI dalam agenda pemberantasan korupsi global, khususnya yang dilakukan melalui *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*, DPR terus berkomitmen berada di garda terdepan aktor global pemberantasan korupsi. Hal ini terwujud ketika Konferensi GOPAC ke-6 yang digelar di Yogyakarta, pada 2015, mendaulat Wakil Ketua DPR RI, Dr. Fadli Zon sebagai Ketua GOPAC dan Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai anggota Dewan Direksi (*Board of Directors*) GOPAC untuk masa jabatan hingga 2017.

Posisi internasional dalam organisasi yang mendapatkan status UN ECOSOC Consultative Status tersebut cukup prestisius untuk meningkatkan peran aktif diplomasi DPR di kancah internasional khususnya dalam isu pemberantasan korupsi. Selain manfaat diplomasi, DPR RI juga menyerap beragam wacana, gagasan dan ide-ide internasional dalam isu-isu anti-korupsi.

Dalam konteks politik global, khususnya SDGs, DPR RI dan GOPAC menyadari bahwa pembiayaan untuk mencapai SDGs sangat besar jumlahnya. Dana sebesar itu tentunya membutuhkan pengawasan—tidak peduli dari mana sumber dananya. Itu sebabnya, GOPAC bermitra dengan *Islamic Development Bank* dan juga *UN Development Programme (UNDP)*, terlibat dalam proyek kerja sama untuk menyusun buku panduan terkait *Parliament's Role in Implementing the Sustainable Development Goals*.

DPR mengambil peran aktif untuk menjadi tuan rumah lokakarya guna menguji buku panduan tersebut pada Agustus 2016 dengan mengundang perwakilan sejumlah negara baik dari Asia Tenggara, Asia Selatan hingga -

Afrika Utara, bekerja sama dengan GOPAC dan *Westminster Foundation for Democracy (WfD)* serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Versi final buku panduan tersebut saat ini dapat diunduh di laman GOPAC di <http://gopacnetwork.org/publications/> dan laman UNDP di <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/parliamentary-development/parliament-s-role-in-implementing-the-sustainable-development-go.html>

Selain itu, melalui GOPAC, DPR berkesempatan pula berinteraksi lebih lanjut dalam beragam advokasi anti-korupsi global termasuk ketika mendapat kesempatan untuk berkolaborasi bersama dalam *UK Anti Corruption Summit 2016*, di London, Mei, 2016. Pada Konferensi Tingkat Tinggi tersebut, Delegasi DPR, berinteraksi lebih jauh bersama GOPAC dan masyarakat sipil lainnya, seperti *Transparency International (TI)* dalam membahas transparansi pemilik manfaat korporasi atau *beneficial ownership*. Isu yang cukup krusial, terutama selepas mencuatnya *Panama Papers* yang membuka tabir kepemilikan manfaat beragam perusahaan cangkang di negara *tax haven* awal tahun 2016. Dalam KTT tersebut, DPR bergabung bersama Delegasi Pemerintah (Menkopolkam) dan juga KPK menjadi satu Delegasi, yakni Delegasi Indonesia. Dalam KTT tersebut disepakati beberapa hal termasuk pendirian *International Anti-Corruption Coordination Centre for Law Enforcement (IACCC)*, yang bermarkas di London, sebagai salah satu pusat internasional untuk penanganan kasus korupsi lintas batas termasuk pula grand corruption—isu yang selama ini menjadi fokus prioritas GOPAC.



Bersama KPK, DPR juga menjalin kerja sama internasional untuk menyelami lebih dekat mekanisme internasional dari *UN Convention against Corruption (UNCAC)*. Dalam kapasitas sebagai GOPAC, Wakil Ketua DPR RI, Dr. Fadli Zon, menyampaikan pandangannya dalam pleno *the 7th Conference of State Parties of the UNCAC* dan menginformasikan agar negara anggota UNCAC menggunakan Buku Panduan yang disusun GOPAC, IDB dan UNDP untuk bekal para legislatornya mengawal dan mencegah korupsi dalam SDGs. Ini sejalan dengan siklus kedua tinjauan UNCAC yang fokus pada pencegahan korupsi dan pemulihan aset. Selain itu, melalui GOPAC, DPR

juga mengambil manfaat untuk menjalin kerja sama lebih lanjut dengan *International Anti-Corruption Academy (IACA)*, organisasi internasional yang fokus pada program pendidikan anti korupsi. DPR berkesempatan berdiskusi dengan Dekan IACA, Mr. Martin Kreutner, untuk mendorong program penguatan kapasitas terkait anti-korupsi bagi DPR RI dan juga unit pendukungnya.

Atas kiprah aktif DPR RI dalam memimpin GOPAC sebagai aktor non-state dalam politik internasional anti-korupsi, pada Pertemuan Tahunan GOPAC, September 2017, kedua tokoh DPR, yakni Wakil Ketua DPR RI, Dr.





Fadli Zon dan juga Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf terpilih kembali untuk menduduki jabatan masing-masing untuk dua tahun berikutnya (hingga 2019).

DPR juga aktif berjejaring dengan masyarakat sipil melalui agenda Konferensi Internasional Anti Korupsi (*International Anti Corruption Conference*), yang digelar tiap dua tahun sekali. DPR berpartisipasi aktif dan menggelar rangkaian lokakarya dalam IACC baik dalam konferensi yang ke-16 (Panama, 2016), maupun IACC ke-17 (Denmark, 2018).

Selain aktif melalui GOPAC, DPR RI, juga tetap konsisten menyuarakan semangat anti-korupsi di berbagai

level baik regional maupun internasional. Misi tersebut dipegang teguh termasuk saat mengusulkan pembahasan draf resolusi *Building an Inter-Parliamentary Network on Anti-Corruption* pada sidang tahunan APPF ke-24 di Vancouver, Kanada, Januari 2016. Draf resolusi usulan DPR RI tersebut mendapat dukungan Parlemen Australia yang juga mengajukan draf serupa terkait anti-korupsi. Draf resolusi tersebut disetujui sebagai resolusi APPF ke-24, yang mencakup beragam hal untuk dukungan bagi jaringan anggota parlemen anti-korupsi sekaligus peningkatan kerja sama pemberantasan korupsi di kawasan dengan mengacu pada UNCAC. Konsistensi DPR RI di APPF dalam isu anti-korupsi terlihat pula pada APPF ke-25 di Fiji, 2017, yang menghasilkan resolusi *Promoting Good Governance and Strengthening Anti-Corruption Measures in the Asia Pacific Region*. Selain itu, di level Asian Parliamentary Assembly (APA), DPR secara konsisten juga mendukung resolusi *Asian Parliamentarians against Corruption* dan menyerukan dalam resolusi agar APA berkolaborasi dengan organisasi antaranggota parlemen *existing* seperti GOPAC, SEAPAC, hingga SAPAC.





Parlemen terbuka: gerbong terdepan dalam jaringan keterbukaan parlemen.

Salah satu elemen krusial dalam pembangunan iklim demokrasi adalah perwujudan *good governance* (tata kelola yang baik) dalam segala urusan publik. Ini berarti bahwa sebagai pemangku kebijakan, DPR perlu mendorong terwujudnya transparansi hingga akuntabilitas dalam setiap tata kelola lembaga negara, termasuk DPR sendiri. Sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, DPR telah berkomitmen penuh untuk menjadi lembaga legislatif modern yang terbuka, transparan dan akuntabel seiring dengan proses reformasi DPR menuju visi Parlemen Modern. Itu sebabnya, pada 29 Agustus 2018, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun DPR RI yang ke-73, Pimpinan DPR dan segenap pemangku kepentingan lembaga legislatif mencanangkan Deklarasi Parlemen Terbuka.

Deklarasi tersebut menegaskan komitmen transparansi informasi DPR sekaligus sebagai penegasan bahwa secara internasional, DPR akan bergabung dalam satu komunitas besar dalam mekanisme multilateral, yakni *Open Government Partnership (OGP)*, melalui pengiriman Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen ke OGP. Rencana Aksi Nasional (RAN) 2018-2020 tersebut menjadi suatu hal yang luar biasa mengingat untuk kali pertamanya DPR mengajukan rencana aksi yang terpisah dari pemerintah. RAN Keterbukaan Parlemen yang diajukan DPR tersebut terdiri dari (i) transparansi data legislasi, (ii) penggunaan teknologi informasi, (iii) transparansi informasi publik, (iv) peta jalan parlemen terbuka, (v) kelembagaan.

OGP merupakan mekanisme multilateral yang mengumpulkan para reformis di pemerintahan dan masyarakat sipil untuk mendorong rencana aksi yang membuat pemerintah lebih inklusif, responsif dan akuntabel. OGP berdiri sejak 2011 dan Indonesia merupakan negara pendiri bersama Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Inisiatif untuk menyusun rencana aksi secara lebih independen, bermula dari partisipasi aktif Delegasi DPR RI dalam *the 2nd Global Legislative Openness Conference*, Mei, 2017 di Ukraina. Konferensi tersebut membawa perspektif baru kepada lebih dari 50 parlemen yang hadir dalam isu keterbukaan parlemen. DPR pada konferensi tersebut juga menguraikan sejumlah upaya menuju keterbukaan parlemen. Kendati demikian, beragam inovasi teknologi dan juga kebijakan keterbukaan parlemen yang disampaikan beragam negara, akhirnya mendorong DPR untuk melakukan terobosan lebih serius dan terlibat aktif dalam rezim keterbukaan informasi yang digaungkan OGP. Terlebih sejak 2013, OGP telah menghasilkan *Legislative Engagement Policy Guidance* yang diperbarui menjadi *Parliamentary Engagement Policy Guidance (2017)*.

Selanjutnya, wacana untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen yang terpisah dari Pemerintah segera muncul. Untuk itu, proses komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat sipil mulai terjalin, salah satunya dengan *Indonesian Parliamentary Center (IPC)*. DPR bersama IPC menjalin komunikasi terus menerus untuk proses aksi keterbukaan parlemen.



Momentum berikutnya semakin menguat saat DPR mengikuti *The 5th OGP Summit*, di Georgia, Juli 2018. DPR, yang tergabung menjadi satu Delegasi bersama utusan Pemerintah dan masyarakat sipil, juga mengikuti *Open Parliament Day* di sela-sela KTT OGP ini, di mana beragam informasi mengenai keterbukaan parlemen diperoleh DPR, diantaranya keterbukaan parlemen yang terdapat di Parlemen Georgia.

Dialog kemudian berlanjut antara DPR dengan sejumlah masyarakat sipil dari Indonesia, seperti Fitra, IPC, MediaLink hingga tim dari *Open Government Indonesia (OGI)* pada pertemuan informal untuk membahas rencana tindak lanjut pasca-keikutsertaan DPR RI ke KTT OGP Georgia. Salah satu kesepakatan yang mengemuka adalah untuk mewujudkan RAN Keterbukaan Parlemen yang independen dari Pemerintah.

Berbasis prinsip *co-creation*, yang menjadi landasan prinsip kerja OGP, DPR bersama masyarakat sipil menyusun bersama RAN Keterbukaan Parlemen 2018-2020. Setelah mendapatkan draf awal dari IPC, Unit Pendukung DPR RI membentuk *Open Parliament Indonesia (OPI) Support Unit* untuk membahas lebih detail rencana aksi tersebut. Pada akhirnya RAN disetujui Pimpinan DPR untuk kemudian diajukan ke OGP bersamaan dengan RAN Pemerintah.

Diskusi *Open Parliament* tidak hanya terjadi di KTT OGP, tetapi juga mengemuka di forum MIKTA (yang mencakup Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia), seperti yang terjadi pada Pertemuan Konsultatif MIKTA kedua di Tasmania, Australia, Oktober 2016.

Dalam diskusi MIKTA tersebut, Ketua DPR, Ade Komaruddin, menegaskan bahwa Parlemen perlu berperan dalam RAN Keterbukaan.

Kini komitmen keterbukaan parlemen diuji oleh mekanisme multilateral dari OGP, mengingat sejumlah prinsip seperti penggunaan teknologi, *co-creation*, dan *self-assesment* harus dipenuhi. Pada *the 6th OGP Summit* yang digelar di Kanada, Mei 2019, diskusi mendalam mengenai keterbukaan parlemen semakin menguat terlebih dengan adanya *Parliamentary Track* yang digelar oleh Parlemen Kanada bekerja sama dengan *ParlAmericas*.

Komitmen keterbukaan parlemen perlu mendapat apresiasi luar biasa mengingat dalam level internasional dan regional, DPR RI menjadi satu dari sedikit parlemen di Asia Pasifik yang memiliki RAN Keterbukaan Parlemen terpisah dari Pemerintah. Untuk itu, ke depan, BKSAP berkomitmen memberikan dukungan semaksimal mungkin agar DPR tetap menjadi pihak yang terdepan, menjadi pionir keterbukaan parlemen di level global. Terlebih, dalam level internasional, pasca-pengajuan RAN Keterbukaan Parlemen 2018-2020, DPR akan secara resmi mengikuti mekanisme multilateral yang berlangsung di OGP, yakni mekanisme penilaian independen via *Independent Reporting Mechanism (IRM)* dan juga evaluasi menyeluruh dari masyarakat sipil, sesuai prinsip-prinsip OGP.



6. Gender dan Partisipasi Perempuan - *Women in Politics Map*

Dalam beberapa dekade terakhir, peran wanita di segala bidang semakin strategis dan terlihat adanya peningkatan keterlibatan wanita dalam posisi-posisi penting terutama keterlibatan mereka di politik. Sejak tahun 1995 ketika Beijing *Platform for Action* diadopsi, jumlah rata-rata secara keseluruhan anggota parlemen wanita di dunia meningkat. Walaupun terjadi peningkatan, namun kemajuan tersebut sangatlah lambat. Menurut survei yang dilakukan oleh IPU pada 2017, secara global peningkatan rata-

rata keterlibatan wanita di parlemen tidak signifikan yaitu sebanyak 0,1% dari 23.3% menjadi 23.4%. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi kemajuan yang lambat dalam hal kesetaraan. Sebagai dukungan terhadap pencapaian kesetaraan terhadap wanita, pada September 2015, PBB telah mengadopsi Resolusi 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berisi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan nomor lima



Dr. Bushraat Ali Anjum



Women in ministerial positions

The countries are ranked according to the percentage of women in ministerial positions, reflecting appointments up to 1 January 2019.

Rank	Country	% Women	Women	Total ministers
1	Spain	64.7	60	93
2	Nicaragua	55.6	10	18
3	Sweden	54.5	12	22
4	Albania	53.3	8	15
5	Colombia	52.9	9	17
6	Costa Rica	51.9	14	27
7	Rwanda	51.9	14	27
8	Canada	50.0	17	34
9	France	50.0	8	16
10 to 19.9%				
19	South Africa	48.6	17	35
11	Ethiopia	47.6	19	40
12	Seychelles	45.5	5	11
13	Denmark	42.9	19	44
14	Switzerland	42.9	3	7
15	Uruguay	42.9	3	7
16	Mexico	42.1	8	19
17	Norway	42.1	8	19
18	Grenada*	41.7	5	12
19	Germany	40.0	6	15
20 to 29.9%				
20	Iceland	40.0	4	10
21	Lechtonstein	40.0	2	5
22	Austria	38.5	5	13
23	Finland	37.5	11	29
24	Uganda	36.7	11	30
25	Andorra	36.4	4	11
26	Republic of Moldova	36.4	4	11
27	Estonia	36.4	4	11
28	Slovakia	36.4	4	11
29	Netherlands	35.3	5	14
30 to 39.9%				
30	Chile	34.8	8	23
31	Angola	34.4	11	32
32	Mali	34.4	11	32
33	El Salvador	33.3	5	15
34	Sao Tome and Principe*	33.3	2	6
35	Trinidad and Tobago	33.3	7	21
36	Honduras*	32.0	8	25
37	Madagascar	31.8	7	22
38	Belgium	31.8	6	19
39	Eswatini	31.8	6	19
40	Lithuania	31.8	6	19
41	New Zealand	30.8	8	26
42	Zambia	30.0	2	6
43 to 49.9%				
43	Dominica*	29.4	5	17
44	Luxembourg	29.4	5	17
45	Portugal	29.4	5	17
46	Saniname*	29.4	5	17
47	Venezuela (Bolivarian Republic of)	29.4	10	34
48	United Arab Emirates	29.0	9	31
49	Czechia	28.6	4	14
50	Mozambique	28.6	4	14
51	Maldives	28.0	7	25
52	Romania	28.0	7	25
53	Haiti	27.8	5	18
54	Peru	27.8	5	18
55	Georgia	27.3	6	22
56	Madagascar*	27.3	6	22
57	Poland	27.3	6	22
58	Zimbabwe	27.3	6	22
59	Panama*	26.1	4	15
60	Panama*	26.1	4	15
61	Chad	25.9	7	27
62	Argentina	25.0	3	12
63	Belgium	25.0	3	12
64	Chad	25.0	3	12
65	Cuba	25.0	7	28
66	Ghana	25.0	7	28
67	Greece	25.0	5	20
68	Kirgistan	25.0	5	20
69	Palau	25.0	2	8
70	Slovenia	25.0	2	8
71 to 79.9%				
71	Egypt	23.2	8	33
72	Barbados	22.5	8	34
73	Costa Rica	22.5	8	34
74	Indonesia	22.5	8	34
75	Jamaica	22.5	4	17
76	Fiji	22.1	19	83
77	India*	22.1	6	26
78	Saint Lucia*	22.1	19	83
79	Senegal*	22.0	8	35
80	United Republic of Tanzania	22.0	2	9
81	Bosnia and Herzegovina	22.0	2	9
82	Ecuador	22.0	2	9
83	Guyana	22.0	2	9
84	Monrovia (Federated States of)	22.0	2	9
85	Republic of Korea	22.0	2	9
86	United Kingdom	21.7	5	23
87	United States of America*	21.7	5	23
88	Australia	21.4	2	9
89	Cabo Verde*	21.4	3	14
90	Samoa	21.4	3	14
91	Timor-Leste	21.4	3	14
92	Montenegro	21.1	19	89
93	Jordan	20.8	5	24
94	Ukraine	20.8	5	24
95	Jordan	20.0	1	5
96	Namibia	20.0	1	5
97	Monaco	20.0	1	5
98	Nauru	20.0	1	5
99 to 109.9%				
100	Israel	19.0	4	21
101	Serbia	18.0	4	21
102	South Sudan*	18.0	0	0
103	Cameroon	18.6	8	43
104	Malaysia	18.5	5	27
105	Sierra Leone	18.5	5	27
106	Bahrain*	18.2	2	11
107	Central African Republic*	18.2	6	33
108	Cyprus	18.2	2	11
109	Timor-Leste	18.2	2	11
110	Gabon	17.9	28	156
111	Dominican Republic	16.7	4	24
112	Gambia	16.7	3	18
113	Malawi	16.7	3	18
114	Singapore	16.7	3	18
115	Togo	16.7	4	24
116	Highland	16.1	2	12
117	North Macedonia	16.0	4	25
118	Burkina Faso	15.8	3	19
119	Antigua and Barbuda	15.4	2	13
120	Cote d'Ivoire	15.0	3	20
121 to 129.9%				
121	Lesotho*	14.8	4	27
122	Somalia*	14.8	4	27
123	Bolivia (Plurinational State of)	14.3	3	21
124	Burkina Faso	14.3	4	28
125	Kyrgyzstan	14.3	2	14
126	Nepal	14.3	2	14
127	Nepal	14.3	1	7
128	San Marino	14.3	1	7
129	Niger	13.5	5	30
130	Algeria	13.3	2	15
131	Kuwait	13.3	2	15
132	Romania	13.3	15	115
133	Syrian Arab Republic	13.3	4	30
134	Russian Federation	12.9	31	237
135	Turkey	12.5	1	8
136	Turkey	12.5	1	8
137	Guinea*	11.8	4	34
138	Turkey	11.8	2	17
139	Leo People's Democratic Republic	11.5	3	26
140	Gambia (The)	11.1	1	9
141	Saint Kitts and Nevis*	11.1	1	9
142	Philippines*	10.3	3	29
143	Bhutan	10.0	1	10
144	Djibouti	10.0	2	20
145	Marshall Islands*	10.0	1	10
146	Turkey	10.0	3	30
147 to 159.9%				
147	Sudan	8.5	0	0
148	Cambodia	9.4	3	32
149	Brazil*	9.1	1	11
150	Mauritius	8.7	2	23
151	Comoros*	8.7	2	23
152	Tonga*	8.3	1	12
153	Bangladesh*	8.0	2	25
154	Nigeria	7.7	2	26
155	Hungary	7.7	2	26
156	Uzbekistan	7.1	1	14
157	Armenia	7.1	1	14
158	Turkmenistan*	7.1	2	28
159	Equatorial Guinea	6.7	2	30
160	Guatemala*	6.7	1	15
161	Qatar	6.7	2	30
162	Sri Lanka	6.7	2	30
163	China*	6.5	2	31
164	Iran (Islamic Republic of)*	6.5	2	31
165	Yemen*	6.5	2	31
166	Tajikistan	5.9	1	17
167	Bahamas	5.6	1	18
168	Kazakhstan	5.6	1	18
169	Morocco	5.6	1	18
170	Japan	5.3	1	19
171	Japan	5.3	1	19
172 to 188.9%				
172	Bahrain*	4.3	1	23
173	Solomon Islands*	4.3	1	23
174	Viet Nam*	4.0	1	25
175	Myanmar	3.3	1	30
176	Belarus	3.4	1	29
177	Lebanon	3.4	1	29
178 to 188.9%				
178	Azerbaijan*	0.0	0	0
179	Brunei Darussalam	0.0	0	16
180	Iran*	0.0	0	16
181	Kiribati	0.0	0	14
182	Lithuania	0.0	0	13
183	Papua New Guinea*	0.0	0	33
184	Yemen*	0.0	0	11
185	Saint Vincent and the Grenadines*	0.0	0	33
186	Saudi Arabia*	0.0	0	33
187	Thailand	0.0	0	25
188	Vanuatu*	0.0	0	25

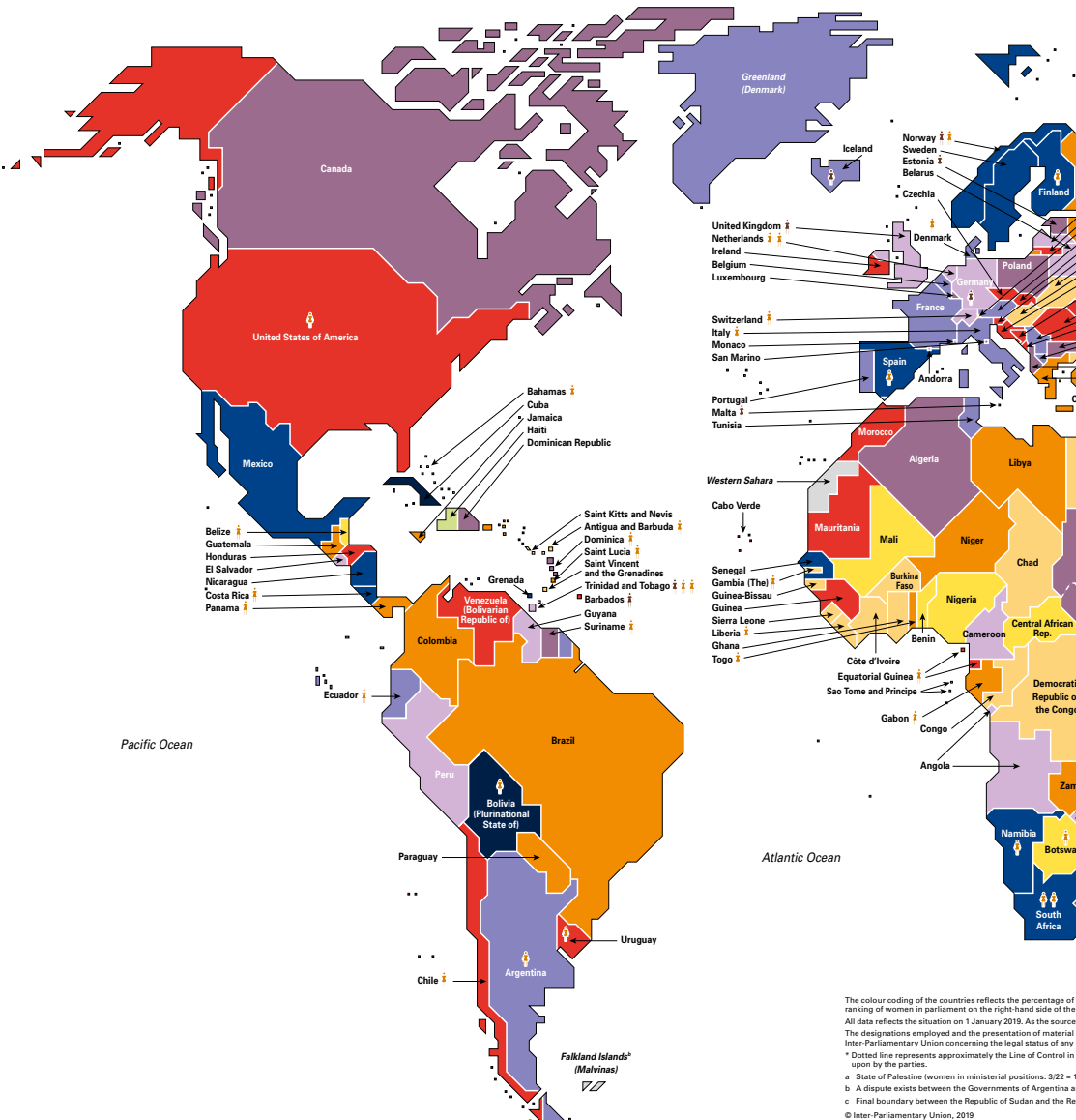
* The total includes deputy prime ministers and ministers. Prime ministers/heads of government were also included when they held ministerial portfolios. Vice-presidents/heads of government or public agencies have been omitted.
** Elected Speaker as a result of the December 2018 elections.
*** Elected Speaker as a result of the November 2018 elections.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Women in Parliament

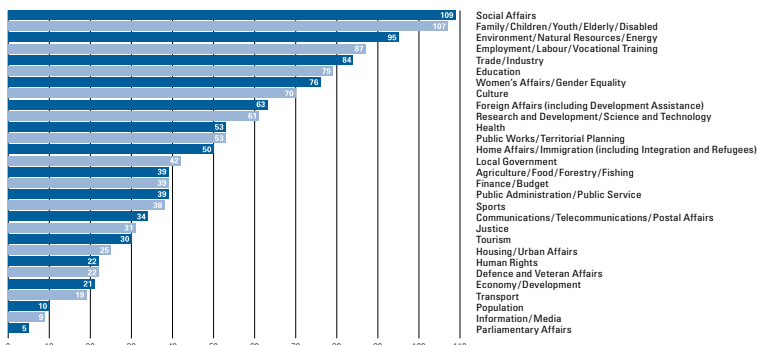
Situation on 1 January 2019



The colour coding of the countries reflects the percentage of ranking of women in parliament on the right-hand side of the map. All data reflects the situation on 1 January 2019. As the source of the data is the Inter-Parliamentary Union, the designations employed and the presentation of material in this map are not necessarily endorsed by the IPU.
* Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir.
a State of Palestine (women in ministerial positions: 3/22 = 13.6%)
b A dispute exists between the Governments of Argentina and Uruguay over the sovereignty of the Malvinas Islands.
c Final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan.
© Inter-Parliamentary Union, 2019

Portfolios held by Women Ministers

(1412 portfolios in 188 countries)



Women in the Executive

Of the 217 chambers in 166 countries, 109 (50%) have a female speaker or president. The remaining 108 chambers have a male speaker or president.

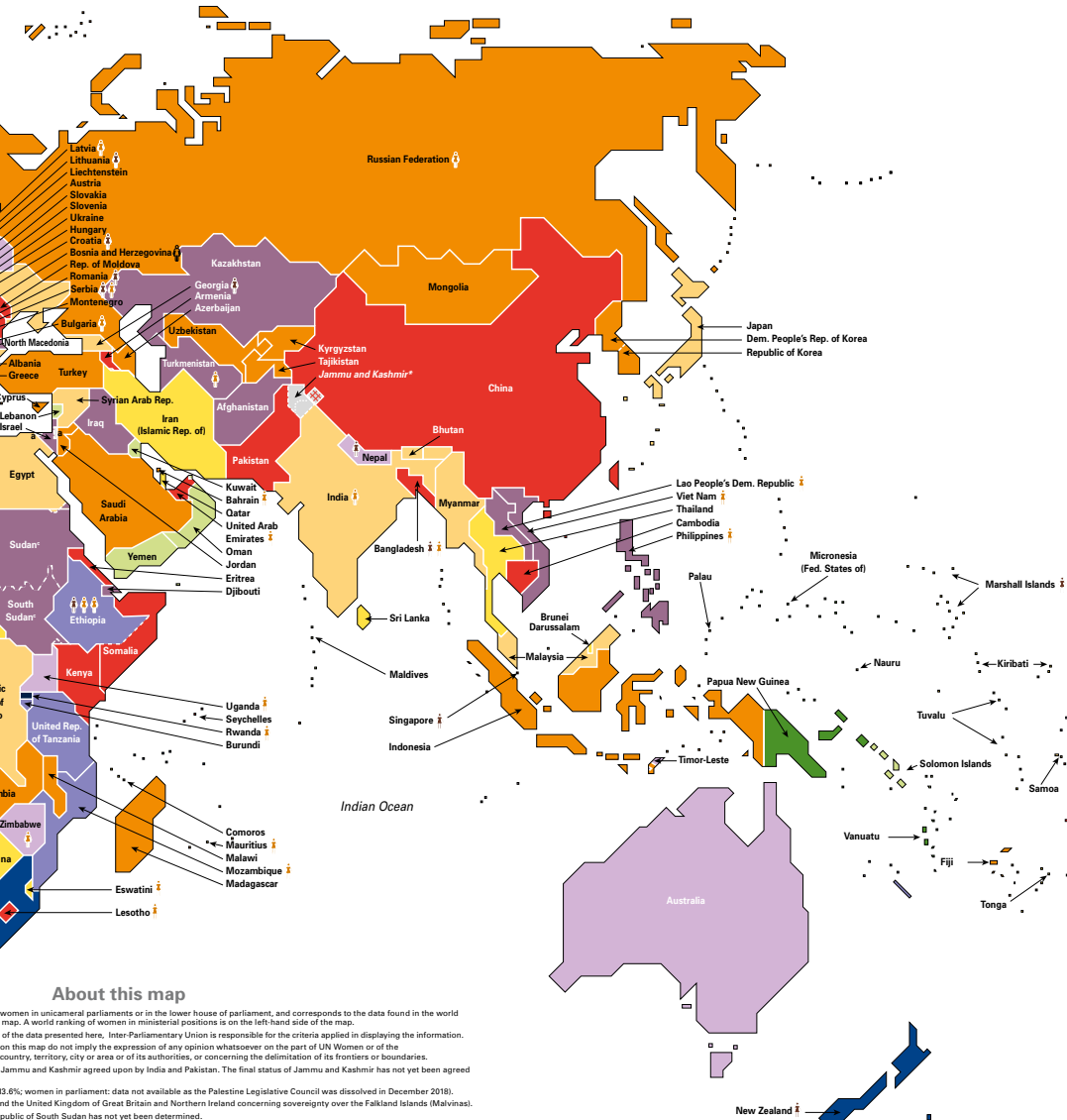
Note: (HS/HG) = The head of state is also the head of government.
* Only elected heads of state have been taken into account.
** Elected Speaker as a result of the December 2018 elections.
*** Elected Speaker as a result of the November 2018 elections.



Politics: 2019



January 2019



About this map
women in unicameral parliaments or in the lower house of parliament, and corresponds to the data found in the world map. A world ranking of women in ministerial positions is on the left-hand side of the map.
of the data presented here. Inter-Parliamentary Union is responsible for the criteria applied in displaying the information. on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UN Women or of the country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed
13.6% women in parliament; data not available as the Palestine Legislative Council was dissolved in December 2018).
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).
public of South Sudan has not yet been determined.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)
women.org

The highest positions of State

Women heads of state¹ (10/152 = 6.6%)
Women heads of government (10/193 = 5.2%)
Croatia (HS), Estonia (HS), Ethiopia (HS), Georgia (HS), Germany (HG), Iceland (HG), Marshall Islands (HS), Nepal (HS), New Zealand (HG), Norway (HG), Romania (HG), Trinidad and Tobago (HS) and United Kingdom (HG)

Women speakers of parliament² (55/279 = 19.7%)
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Ecuador, Equatorial Guinea, Eswatini, Ethiopia (2 chambers), Finland, Laos, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lesotho, Liberia, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Norway, Panama, Philippines, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Serbia, Suriname, Switzerland, Togo, Trinidad and Tobago (2 chambers), Turkmenistan, United States of America³, Uruguay, Viet Nam and Zimbabwe.

Women deputy speakers of parliament (180/638 = 28.2%)
Countries for which information is available, 113 chambers at least one woman deputy speaker.
Head of government.
into account.
two have 2 additional speakers and three have 1 additional speaker, for a total of 279 speakers.
for 2018 elections. She was formally elected on 23 January 2019 by the newly elected Parliament.
for 2018 elections. Her formal election was held on 3 January 2019, when the newly elected Congress first convened.

World and regional averages of women in parliament

	Single house or lower house	Upper house or Senate	Both houses combined
World average	24.3%	24.1%	24.3%
Regional averages			
Regions* are classified by descending order of the percentage of women in unicameral parliaments or the lower house of parliament.			
Nordic countries	42.5%	—	—
Americas	30.6%	31.3%	30.7%
Europe (Nordic countries included)	28.6%	28.0%	28.5%
Europe (Nordic countries not included)	27.2%	28.0%	27.4%
Sub-Saharan Africa	23.9%	22.2%	23.7%
Asia	19.9%	17.4%	19.6%
Middle East and North Africa	19.0%	12.5%	18.1%
Pacific	16.3%	36.0%	18.4%

* The composition of IPU regional groupings may be consulted at www.ipu.org/wmn-e/world.htm.

Women in parliament

The countries are ranked and colour-coded according to the percentage of women in unicameral parliaments or the lower house of parliament, reflecting elections/appointments up to 1 January 2019.

Rank	Country	Lower or single house	Upper or Senate	Both houses combined
1	Rwanda	61.3	49/180	38.5
2	Cuba	63.2	24/26	45.2
3	Bolivia (Plurinational State of)	59.1/130	47/7	17/36
4	Mexico	48.2	241/500	41.0
5	Sweden	47.3	165/349	43.2
6	Grenada	46.7	7/15	30.8
7	Namibia	46.2	48/104	23.8
8	Costa Rica	45.6	28/57	—
9	Nicaragua	44.6	41/92	—
10	South Africa ¹⁾	42.7	168/393	35.2
11	Senegal	41.8	69/165	—
12	Finland	41.5	93/200	—
13	Spain	41.1	144/350	38.8
14	Norway	40.8	62/160	—
15	New Zealand	40.0	48/120	—
16	France	39.7	229/577	32.2
17	Mozambique	39.6	25/63	—
18	Argentina	38.8	99/255	41.7
19	Ethiopia	38.8	212/547	23.0
20	North Macedonia	38.3	48/120	—
21	Iceland	38.1	24/63	—
22	Belgium	38.0	67/159	43.3
23	Ecuador	38.0	52/137	—
24	Serbia	37.7	93/247	—
25	Denmark	37.4	57/179	—
26	Austria	37.2	68/183	36.1
27	United Republic of Tanzania	36.8	145/393	—
28	Burundi	36.4	44/121	46.2
29	India	35.9	19/57	—
30	Italy	35.7	225/630	34.4
31	Portugal	35.7	62/230	—
32	Uganda	34.9	160/458	—
33	Bahrain	34.5	39/110	30.4
34	Timor-Leste	33.8	22/65	—
35	Monaco	33.3	8/24	—
36	Nepal	32.7	98/275	37.3
37	Switzerland	32.5	7/46	—
38	Andorra	32.1	9/28	—
39	United Kingdom	32.0	268/850	24.4
40	Burkina Faso	31.9	22/69	—
41	Zimbabwe	31.8	69/220	43.8
42	Netherlands	31.3	47/150	36.0
43	Cameroon	31.0	15/49	—
44	El Salvador	31.0	28/84	—
45	Latvia	31.0	31/100	—
46	Trinidad and Tobago	31.0	13/42	35.5
47	Germany	30.9	259/798	28.1
48	Angola	30.0	68/220	—
49	Australia	30.0	45/150	29.5
50	Peru	30.0	39/130	—
51	Philippines	29.5	66/252	25.0
52	Suriname	29.4	15/51	—
53	Albania	29.3	41/140	—
54	Israel	29.2	35/120	—
55	Poland	29.1	134/460	14.0
56	Estonia	28.7	24/80	—
57	South Sudan	28.5	109/383	12.0
58	Sudan	27.7	130/481	28.8
59	Laos People's Dem. Republic	27.7	1/149	—
60	Alghanistan ²⁾	27.3	68/249	23.5
61	Kazakhstan	27.1	120/437	20.6
62	Canada	26.9	50/234	46.7
63	Dominican Republic	26.9	31/130	—
64	Viet Nam	26.7	132/494	—
65	Djibouti	26.7	17/65	—
66	Algeria	26.5	119/462	6.8
67	Bulgaria	26.4	62/240	—
68	Iraq	25.2	83/229	—
69	Dominica	25.0	12/47	—
70	Luxembourg	25.0	15/60	—
71	Turkmenistan	25.0	31/124	—
72	China	24.9	742/2975	10.0
73	Stavros	24.4	67/275	24.1
74	Somalia	24.4	1/140	—
75	Armenia	24.2	25/122	—
76	Cabo Verde	23.6	17/72	—
77	Montenegro	23.5	12/51	—
78	United States of America ³⁾	23.5	102/434	25.0
79	Maldives	23.0	23/100	21.9
80	Singapore	23.0	23/100	—
81	Guinea	22.8	22/101	—
82	Republic of Moldova	22.6	35/155	—
83	Chile	22.6	35/155	23.3
84	Czechia	22.6	49/208	26.8
85	United Arab Emirates	22.5	9/40	—
86	Ireland	22.2	22/98	30.0
87	Uruguay	22.2	22/99	25.8
88	Venezuela (Bolivarian Rep. of)	22.2	17/77	—
89	Eritrea	22.0	28/150	—
90	Kenya	21.8	99/449	30.9
91	Bosnia and Herzegovina	21.4	9/42	13.3
92	Lithuania	21.4	3/23	—
93	Senegal	21.3	7/33	—
94	Yemen	21.1	27/128	—
95	Romania	20.7	68/259	14.0
96	Bangladesh	20.7	12/58	—
97	Croatia	20.5	31/151	—
98	Morocco	20.5	61/295	11.7
99	Mauritania	20.3	31/153	—
100	Pakistan	20.3	69/341	18.2
101	Barbados	20.0	8/40	38.1
102	Cameroon	20.0	25/125	17.7
103	Equatorial Guinea	20.0	20/100	15.3
104	Stavros	20.0	20/100	—
105	Saudi Arabia	19.9	30/150	—
106	Fiji	19.8	10/51	—
107	Kyrgyzstan	19.2	22/120	—
108	Madagascar	19.2	29/150	20.6
109	Guatemala	19.0	20/106	—
110	Tajikistan	18.0	12/63	—
111	Greece	18.7	56/299	—
112	Panama	18.3	12/71	—
113	Indonesia	18.2	102/560	—
114	Colombia	18.1	31/171	—
115	Zambia	18.0	30/167	—
116	Cyprus	17.9	10/56	—
117	Gabon	17.9	24/134	17.6
118	Turkey	17.4	104/596	—
119	Jancaia	17.3	11/63	—
120	Turkey	17.4	104/596	—
121	Monaco	17.1	12/70	—
122	Republic of Korea	17.1	51/298	—
123	Niger	17.0	29/171	—
124	Azerbaijan	16.8	20/119	—
125	Malawi	16.7	25/152	—
126	Saint Lucia	16.7	3/18	27.3
127	Togo	16.5	15/91	—
128	Dem. People's Rep. of Korea	16.3	112/687	—
129	Libya	16.0	60/369	—
130	Uzbekistan	16.0	24/150	17.0
131	Russian Federation	16.0	61/380	18.2
132	Jordan	16.4	20/120	15.4
133	Bahrain	15.8	9/60	—
134	Brazil	15.0	77/513	14.8
135	Paraguay	15.0	12/80	—
136	Bhutan	14.9	7/47	16.0
137	Chad	14.8	25/168	—
138	Egypt	14.8	69/466	—
139	Georgia	14.8	27/184	—
140	Sao Tome and Principe	14.5	8/65	—
141	Malaysia	14.4	22/152	19.4
142	Guinea-Bissau	13.7	14/102	—
143	Burkina Faso	13.4	17/127	—
144	Saint Kitts and Nevis	13.3	2/15	—
145	Syrian Arab Republic	13.2	20/150	—
146	Ghana	13.1	38/275	—
147	Saint Vincent and the Grenadines	13.0	3/23	—
148	Bahamas	12.8	5/39	43.8
149	Hungary	12.6	26/190	—
150	India	12.6	68/524	11.5
151	Palestine	12.5	2/16	35.4
152	Liberia	12.3	9/73	10.0
153	Sierra Leone	12.3	10/81	—
154	Leichtenstein	12.0	3/25	—
155	Malta	11.9	8/67	—
156	Mauritius	11.6	8/69	—
157	Ukraine	11.3	49/433	12.2
158	Comoro	11.3	17/151	18.8
159	Myanmar	11.3	29/255	12.2
160	Antigua and Barbuda	11.1	2/18	52.9
161	Cote d'Ivoire	11.0	19/171	—
162	Nauru	10.5	2/19	12.1
163	Dem. Republic of the Congo	10.3	60/585	4.6
164	Gambia (The)	10.2	47/463	—
165	Japan	10.3	8/58	—
166	Sainto	10.0	5/50	28.7
167	Qatar	8.8	4/41	—
168	Botswana	9.5	6/63	—
169	Belize	9.4	2/22	15.4
170	Brunei Darussalam	9.1	3/33	—
171	Marshall Islands	8.1	3/37	—
172	Maldives	8.8	13/147	—
173	Central African Republic	8.2	10/140	—
174	Tonga	7.4	2/27	—
175	Benin	7.2	8/63	—
176	Eswatini	7.2	5/69	23.3
177	Tuvalu	6.7	1/15	—
178	Kiribati	6.5	3/48	—
179	Comoros	6.1	5/53	—
180	Iran (Islamic Republic of)	5.9	17/289	—
181	Nigeria	5.6	20/358	—
182	Thailand	5.3	13/240	—
183	Sri Lanka	5.3	12/225	—
184	Labanon	4.7	6/128	—
185	Maldives	4.7	4/85	—
186	Kuwait	4.6	3/65	—
187	Haiti	2.5	3/118	3.6
188	Saint Martin	2.0	1/38	—
189	Oman	1.2	1/85	16.5
190	Norway	0.3		



ditujukan khusus kepada para wanita di dunia sebagai alat untuk memperoleh kesetaraan gender. Memajukan partisipasi politik wanita, merupakan hal yang penting dalam SDGs. Oleh karena itu, sasaran dalam agenda nomor 5 adalah untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di tingkat pengambil keputusan dalam bidang politik, ekonomi dan kehidupan. Kesetaraan gender secara global sangat dibutuhkan terutama di Parlemen.

DPR-RI sangat berperan aktif dalam meningkatkan peran wanita di Parlemen. Salah satunya ditunjukkan dengan diselenggarakannya seminar untuk memperingati International Women's day yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Seminar ini merupakan suatu pengingat bahwa kesetaraan gender bukan hanya tujuan yang berdiri sendiri, tetapi bermakna dalam mencapai berbagai tujuan agenda pembangunan global. Selain itu, penyelenggaraan acara ini menunjukkan bahwa memberdayakan perempuan secara tidak langsung juga akan memberdayakan kemanusiaan (*empowering women, empowers humanity*), dan tujuan ini akan selalu didukung oleh para anggota DPR wanita.

Selain itu, sebagai upaya dari Parlemen Indonesia untuk menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender dalam diplomasi parlemen, DPR-RI juga terlibat dalam sidang-sidang internasional seperti *Parliamentary Event on the Occasion of the Commission on the Status of Women* yang diselenggarakan oleh IPU setiap tahun disela-sela sidang CSW di New York.

Keterwakilan wanita di Parlemen pada masa sekarang ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah anggota parlemen wanita dalam setiap periode. Dari publikasi oleh IPU, *Women in Parliament: 20 years in Review*, disebutkan bahwa total keterlibatan wanita sebagai anggota Parlemen hampir mencapai dua kali lipatnya antara tahun 1995 sampai 2005, dari 11,3% pada tahun 1995 menjadi 22,1% pada tahun 2015. Dengan populasi wanita di dunia mencapai lebih dari 50%, sudah seharusnya wanita memainkan banyak peranan penting dan jabatan strategis di pemerintahan dan Parlemen, karena kontribusi mereka yang signifikan untuk kemajuan politik.

Wanita yang bergelut di berbagai bidang pekerjaan memiliki andil yang besar dalam membangun opini publik terhadap suatu isu sosial tertentu, namun wanita yang berkecimpung di dalam politik mampu untuk memengaruhi pemerintah dalam membuat perubahan akan isu tersebut. Para wanita ini percaya bahwa mereka memiliki proporsi dan tempat di politik, dan menolak adanya diskriminasi dan dominasi pria sebagai tantangan yang selalu mereka hadapi. *Women Political Leaders* merupakan salah satu fasilitator pengembangan politisi wanita dunia. *Women Political Leaders Global Forum (WPL)* adalah sebuah jaringan global politisi perempuan dengan misi untuk meningkatkan jumlah dan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik. WPL beranggotakan wanita dari berbagai komponen, baik politisi perempuan maupun pemimpin perempuan lainnya. WPL dalam kegiatannya berusaha untuk memperlihatkan bagaimana



pengaruh kepemimpinan perempuan dalam politik global untuk mencapai dunia yang lebih baik. Dr. Nurhayati Ali Assegaf merupakan satu-satunya anggota Dewan WPL yang berasal dari Indonesia yang selalu aktif dalam memperjuangkan hak-hak wanita.

Selain itu, dalam misinya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global, BKSAP juga selalu berpartisipasi dalam sidang-sidang internasional yang mengusung tema wanita dan politik, seperti *Parliamentary Event on the Occasion of the Commission on the Status of Women* di New York, *Women in Parliaments Global Forum*, *Westminster Conference on Violence Against Women in Politics*, dll.

Dalam forum *Westminster Conference on Violence Against Women in Politics* yang diselenggarakan pada bulan Maret 2018, delegasi Indonesia menekankan adanya berbagai tantangan yang kerap dihadapi oleh wanita yang berkecimpung di dunia politik, seperti pelecehan secara psikologis, emosional bahkan seksual yang bertujuan untuk mencegah perempuan masuk ke dalam kancah politik karena dianggap sebagai saingan. Selain itu, seringkali politisi perempuan dihadapkan pada pelecehan secara online di tengah penggunaan sosial media sebagai sarana efektif dalam melakukan interaksi antara anggota parlemen dengan konstituennya. Oleh karena itu, partai politik dan parlemen memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan ini. Kedua institusi tersebut harus berani menyusun aturan internal yang dapat menyelesaikan pengaduan intimidasi, pelecehan atau

bentuk kekerasan lainnya yang dialami anggota parlemen perempuan.

Di tataran regional, BKSAP aktif menyuarkan isu-isu gender melalui WAIPA sebagai acara tahunan anggota parlemen negara-negara ASEAN yang diselenggarakan di Sidang Tahunan AIPA. Berbagai resolusi telah disponsori, antara lain mengenai pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial.

BKSAP tidak hanya berfokus pada isu yang menyentuh pemberdayaan kaum perempuan, tetapi juga pada mekanisme dan struktur organisasi antarparlemen yang memungkinkan keterlibatan anggota parlemen perempuan secara lebih intensif. Pada periode ini, Ketua BKSAP telah menginisiasi pembentukan berbagai struktur organisasi parlemen perempuan baik di tingkat Asia melalui *Women of Asian Parliamentary Assembly (WAPA)* maupun di tingkat Asia Pasifik melalui *Women of Asia Pacific Parliamentary Forum (WAPPF)*. Dengan adanya struktur yang khusus menghimpun anggota parlemen perempuan secara berkala, diharapkan pembahasan isu-isu sensitif gender dapat dilakukan secara lebih intensif dan efisien.



The background of the page is a composite image. On the left side, there is a large, waving flag with green, white, and black horizontal stripes. Below the flag, there is a hazy, panoramic view of a cityscape with numerous buildings and structures. The right side of the page is mostly white, with the title text overlaid.

7. Isu Palestina, Krisis Kemanusiaan Rohingya, Uighur, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran



Isu Palestina

Isu Palestina tetap menjadi keprihatinan dan perhatian DPR, karena yang dialami oleh bangsa Palestina pada dasarnya merupakan masalah penjajahan yang sudah seharusnya dihapus di muka bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 tersebut mengamanatkan, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Ini artinya, Indonesia berpandangan bahwa isu Palestina pada dasarnya merupakan masalah dekolonisasi, dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina adalah konsisten dengan politik luar negeri Indonesia yang anti-kolonialisme.

Kesungguhan Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), tetapi juga parlemen (DPR). Dukungan DPR tersebut dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen di fora internasional, khususnya fora antarparlemen, selain juga melalui Kaukus Palestina yang dibentuk oleh sejumlah anggota DPR.

IPU, APA, dan PUIC adalah forum-forum antarparlemen yang kerap mengangkat isu Palestina sebagai salah satu agenda yang dibahas dalam sidang-sidang tahunannya, terutama ketika konflik Palestina-Israel memanas. Melalui fora antarparlemen inilah aktivitas diplomasi DPR terhadap isu Palestina dilakukan.

Pada Sidang Umum IPU ke-137 di St. Petersburg, Rusia, Oktober 2017, misalnya, delegasi DPR yang hadir dan saat melakukan pertemuan secara bilateral dengan delegasi Palestina menyerukan persatuan kepada kedua faksi di Palestina, Fatah dan Hamas, dengan harapan dapat memperkuat posisi Palestina dalam meraih kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat.

Sementara itu, di tengah Sidang Umum IPU ke-138, di Jenewa, Swiss, Maret 2018, delegasi DPR yang hadir dalam pertemuan koordinasi dan kerja sama PUIC untuk membahas isu Palestina, menyerukan kepada parlemen negara-negara Asia untuk bersatu menentang kebijakan Presiden Trump mengenai pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibukota Israel. Kebijakan Trump tersebut jelas melanggar resolusi PBB dan dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai anggota Komite Eksekutif Al Quds, melalui Konferensi Parlemen untuk Al-Quds di Istanbul, Turki, Desember 2018 juga memprotes rencana Australia untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.

DPR juga secara konsisten melakukan diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk menggalang komitmen negara-negara sahabat terhadap upaya *the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* dalam membantu dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi Palestina, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan difabel dari serangan agresi militer Israel. Terkait hal ini, DPR menentang keras kebijakan Trump





tentang pengurangan dana bantuan ke UNRWA. Sikap DPR tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan penuh terhadap usulan resolusi *emergency items* dalam Sidang Umum IPU ke-138, yang antara lain mengkritisi kebijakan Trump mengenai pengurangan bantuan kemanusiaan ke UNRWA dan pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibukota Israel. Melalui resolusi ini, DPR bersama anggota IPU lainnya juga mengingatkan dunia internasional untuk terus memperjuangkan Hak-hak Palestina berdasarkan Hukum Internasional dan Resolusi PBB.

Diplomasi yang dilakukan DPR untuk mendukung perjuangan Palestina tidak saja dilakukan di fora antarparlemen, tetapi juga dengan mencari informasi secara langsung melalui pertemuan dengan Konsul Kehormatan Indonesia

untuk Palestina, Madam Maha Abu Shusheh, dan dengan Ketua Parlemen Palestina di Amman Yordania, Maret 2016. Pertemuan yang seharusnya dilakukan di Ramallah tidak dapat dilakukan karena delegasi DPR tidak mendapatkan izin masuk ke wilayah Palestina oleh Israel. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, delegasi DPR, selain mendapatkan gambaran secara langsung tentang situasi yang dihadapi bangsa Palestina di wilayah pendudukan, juga telah menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, baik oleh Parlemen Indonesia melalui berbagai forum internasional, oleh Pemerintah melalui dukungan politik dan program-program pemberdayaan masyarakat, maupun oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.





Krisis Kemanusiaan Rohingya

Terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, DPR juga berada di garis depan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya. Pada Sidang Umum ke-38 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, September 2017 di Manila, Filipina, DPR mendorong parlemen negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas terhadap tragedi kemanusiaan yang dihadapi etnis rohingnya, sekaligus menginisiasi resolusi

terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. Pada Oktober 2017, Ketua BKSAP yang juga selaku Presiden *International Humanitarian Law (IHL)* bertemu dengan Thomas Vargas, Komisioner tinggi UNHCR, untuk membahas perkembangan krisis kemanusiaan di Myanmar dan menanyakan bantuan kemanusiaan UNHCR kepada 600 ribu warga Rohingya. Pertemuan tersebut menandai kesamaan pemahaman parlemen Indonesia dengan UNHCR bahwa konflik di Myanmar bukanlah



masalah agama melainkan masalah kemanusiaan.

Capaian lain yang tidak kalah penting dalam merespons tragedi kemanusiaan atas etnis Rohingya adalah keberhasilan DPR untuk meminta penjelasan para petinggi parlemen Myanmar pada sidang IHL, dalam Sidang Umum IPU ke-139 di Jenewa, Swiss, Oktober 2018, mengenai perkembangan yang telah dicapai Myanmar untuk menciptakan

perdamaian dan menghapus segala jenis penindasan terhadap etnis Rohingya. Sidang ini dipimpin oleh Ketua BKSAP selaku presiden IHL dan dihadiri *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.





Perlindungan HAM Pekerja Migran

Perlindungan HAM pekerja migran juga mendapatkan perhatian besar DPR, mengingat berbagai permasalahan pekerja migran masih saja terjadi di banyak negara di dunia, dan oleh karena itu, isu ini perlu terus disuarakan dan diperjuangkan. Secara nasional, hal tersebut sesungguhnya telah diupayakan Indonesia, antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara Indonesia menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI sudah tentu pula perlu menyuarakan pentingnya perlindungan HAM pekerja migran ini di forum-forum internasional, karena faktanya pekerja migran di sejumlah negara, termasuk yang berasal dari Indonesia, belum sepenuhnya terlindungi hak-hak dasarnya.

Upaya DPR untuk menyuarakan pentingnya perlindungan HAM pekerja migran di forum-forum internasional tersebut dilakukan melalui aktivitas diplomasi DPR di berbagai forum antarpemerintahan. Pada tahun 2015, misalnya, dalam Sidang Umum AIPA ke 36, khususnya melalui *Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)*, dan atas inisiatif DPR RI, telah diadopsi resolusi yang berkenaan dengan persoalan dan pentingnya perlindungan pekerja migran perempuan. Dalam Sidang Tahunan APPF ke-24, Januari 2016, di Vancouver, Kanada, DPR juga berhasil mendorong APPF untuk mengadopsi resolusi mengenai perlindungan pekerja migran. Resolusi perlindungan pekerja migran ini adalah kali pertama diadopsi oleh APPF, yang di dalamnya juga mencakup aspek pentingnya perlindungan pekerja migran dari kemungkinan praktik perdagangan manusia.

DPR juga aktif memperjuangkan isu perlindungan pekerja migran ini melalui *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM)* di pertemuan IPU di Rabat pada Desember 2018. GCM adalah instrumen legal pertama dalam mengatur isu migrasi global. Dalam pertemuan ini DPR mendorong perlindungan dan mencegah pekerja ilegal (*undocumented workers*), dan pentingnya kontrak kerja yang jelas bagi pekerja migran di negara penerima. Selain itu, DPR menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial dan harmonisasi kebijakan antara negara pengirim, transit, dan penerima.

Upaya DPR dalam menyuarakan pentingnya perlindungan pekerja migran di forum internasional merupakan bentuk keseriusan dan komitmen DPR dalam melindungi HAM masyarakat, sebab DPR percaya bahwa demokrasi dan pembangunan tidak akan terwujud tanpa perlindungan HAM.

YOU CAN ONLY ACT NOW



IT IS TIME FOR PEACE

EACH DAY 400 PEOPLE DIE IN 40 CONFLICTS

GENERATION POST

SUPPORT PEACE MAKERS NOT WARMAKERS



STILL REMEMBER ALL THE FEAR AND ALL THE PAGES

MARKER GREG BOYLE
ANTONIO DOMITTO

TALLEN BRHANE
SERVAIN JOUINIE

NO GOD ACCEPTS OR SUPPORTS VIOLENCE

ALEXIS BOHARD
ISABELLE ZETMAN

SEAN ALTHALFA
TUDOR WOLF

KASIM ALI
EBBA AKERMAN

MICHAEL MOLIER
MELINDA FUGLARE



URBAN GANG VIOLENCE



ANY IDEOLOGY

STRATEGY OF SURVIVING



YES NO PEACE



8. Perdamaian dan Keamanan Global

Secara konseptual perdamaian dan keamanan dalam kerangka Hubungan Internasional memiliki bidang kajian dan pendekatan yang cukup luas. Tidak hanya berbicara mengenai masalah-masalah yang disebabkan oleh ancaman keamanan tradisional yang terfokus pada keamanan negara (*State Security*), tetapi juga ancaman keamanan non-tradisional yang langsung terkait dengan keamanan manusia (*Human Security*) seperti Kejahatan Transnasional (antara lain

drugs trafficking dan *human trafficking*), serta Terorisme. Secara faktual dinamika politik internasional dari waktu ke waktu, dalam perspektif perdamaian dan keamanan, memang tidak pernah lepas dari konflik dan perang. Indeks Perdamaian Global pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir terdapat penurunan yang cukup signifikan pada perdamaian global dengan tingkat rata-rata perdamaian di setiap negara menurun sebesar 0,27%. Sementara



itu *Council of Foreign Relations Global Conflict Tracker* mencatat bahwa beberapa konflik besar yang masih berlangsung hingga saat ini di dunia berpotensi untuk berkembang menjadi perang terbuka. Konflik-konflik tersebut antara lain: Krisis di Semenanjung Korea, Sengketa Teritorial di Laut Tiongkok Selatan, serta Instabilitas Politik dan Keamanan yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Tidak ada perubahan yang signifikan pasca-pertemuan fenomenal antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Keduanya belum berhasil mencapai kata sepakat dalam hal penghentian program nuklir Korea Utara. Ini berarti kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir masih membayangi kawasan Asia Pasifik. Di samping itu, perilaku asertif militer Tiongkok melalui pembangunan sepihak pangkalan-pangkalan militer di pulau-pulau yang terletak di Laut Tiongkok Selatan serta pembangunan kekuatan militernya yang tidak transparan memancing kecurigaan dan kesiagaan tinggi dari militer Amerika Serikat. Benturan kepentingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan bisa berubah menjadi perang terbuka kapan saja. Kondisi-kondisi yang demikian ini mengakibatkan ketidakpastian keamanan yang berdampak negatif bagi kondusifitas global secara umum dan regional secara khusus sebagai lingkungan strategis bagi Republik Indonesia.

Ketidakpastian keamanan tersebut diperparah dengan adanya ancaman Terorisme yang dipicu oleh instabilitas politik dan keamanan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dimana posisi ISIS yang semakin terjepit oleh serangan Amerika Serikat dan Sekutunya, berimbas pada munculnya gelombang kepulauan eks kombatan-kombatan ISIS dari Suriah ke negara-negara asalnya termasuk kawasan Asia Tenggara. Gelombang

kepulauan ini dikhawatirkan memicu radikalisme baru yang sewaktu-waktu bisa bertransformasi menjadi aksi teror. Disamping itu, ancaman keamanan secara langsung terhadap manusia dari Kejahatan Transnasional seperti Drugs Trafficking juga masih menjadi permasalahan yang memerlukan upaya ekstra dalam penanganannya. Indeks penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang khususnya di kawasan ASEAN dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang memprihatinkan. Di Indonesia sendiri tercatat kini ada 5 juta kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan korban meninggal per hari mencapai 40-50 orang.

Permasalahan-permasalahan di atas tidak bisa dihadapi oleh satu negara sendirian. Butuh komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik, antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama atas isu-isu tersebut. Oleh karena itu sebagai salah satu pemangku kepentingan dari Politik Luar Negeri Indonesia, DPR RI melalui BKSAP selama kurun waktu 2014-2019 secara aktif melaksanakan diplomasi parlemen melalui keanggotaannya dalam organisasi antarpallemen regional maupun internasional seperti *AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly)*, *APA (Asian Parliamentary Assembly)*, *APPF (Asia Pasific Parliamentary Forum)*, dan *IPU (Inter-Parliamentary Union)*, ataupun Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC). Diplomasi parlemen DPR RI juga merupakan implementasi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 Pasal 116, yang mencantumkan bahwa BKSAP bertugas membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.



Melalui sidang APPF ke-24 pada tahun 2015 di Kanada, Indonesia bersama Rusia, Malaysia, Meksiko, dan Chile berhasil memperjuangkan *Resolution on Counter-terrorism* yang mengajak negara-negara anggota APPF untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme, antara lain melalui perangkat legislasi dan kebijakan yang memperkuat upaya penanggulangan terorisme di tingkat nasional. Selain itu, mengajak negara-negara anggota APPF untuk mengimplementasikan *UN Security Council Resolution 2178* yang menghimbau pendekatan komprehensif bagi penanggulangan terorisme khususnya yang terkait ISIS. Selain itu, dalam pertemuan APPF ke-26 di Hanoi pada tahun 2018, DPR RI berhasil mengajukan usulan (i) agar Parlemen negara-negara Asia Pasifik bersikap tegas mengutuk aktivitas kebencian yang dapat menjadi dukungan atas aksi terorisme dan (ii) mendorong parlemen Asia Pasifik secara masing-masing, untuk menjadi pusat dialog antarmasyarakat berbeda agama, kelompok, budaya dan lainnya, dengan tujuan untuk mencari kesepahaman, memerangi miskonsepsi, mengedepankan toleransi dan saling menghargai.

Kemudian pada Sidang APPF ke-27 tahun 2019 di Kamboja, delegasi BKSAP menekankan bahwa perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui terciptanya rasa saling percaya antara negara-negara di kawasan. Delegasi Indonesia juga mendorong agar negara-negara anggota APPF meratifikasi Konvensi PBB yang menentang kejahatan transnasional dan mengimplementasikannya secara nasional dalam undang-undang mereka. Lebih jauh, berdasarkan pertimbangan bahwa pendanaan aksi teror seringkali bersumber dari kejahatan transnasional, Indonesia meratifikasi *UN Convention against*

Transnational Organized Crime yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, di mana dijelaskan bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisasi. BKSAP DPR RI juga menyuarakan pentingnya membangun rasa saling percaya yang melandasi kerja sama di antara negara-negara di Asia Pasifik untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, mengingat bahwa hal tersebut merupakan kunci untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran tidak hanya di kawasan, tetapi juga di dunia.

BKSAP DPR RI juga aktif memperjuangkan kawasan ASEAN yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang melalui forum *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)*. Dalam Pertemuan AIPACODD Ke-2 di Chiang Mai Thailand, Maret 2019, Delegasi BKSAP DPR RI menekankan pada munculnya sejumlah tantangan baru terkait isu penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang di kawasan ASEAN. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: penyalahgunaan obat-obatan terlarang secara luas, terutama opiat dan stimulan jenis amfetamin (ATS); semakin berkembangnya Zat Psikoaktif Baru (NPS); tren yang berkembang dari perdagangan obat-obatan terlarang melalui laut di wilayah tersebut; dan peningkatan penggunaan narkotika di kalangan pemuda. Dalam pertemuan tersebut Delegasi BKSAP DPR RI juga melaporkan keberhasilan aparat keamanan Indonesia dalam menggagalkan penyelundupan 1.034ton metamfetamin yang dibongkar oleh Badan Anti Narkotika Indonesia (BNN) dan Angkatan Laut Indonesia, serta penyelundupan 1,6ton metamfetamin yang dibongkar oleh Polisi Nasional Indonesia (Polri) dalam

operasi yang berbeda. Kedua kasus itu melibatkan sindikat Tiongkok.

Sementara itu melalui pelaksanaan AIPA Caucus yang ke-9 pada tahun 2017, DPR RI sebagai tuan rumah berhasil menggalang kesepahaman pada sesama negara anggota ASEAN untuk mengupayakan solusi damai melalui dialog terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Negara-negara ASEAN juga sepakat untuk mengedepankan negosiasi damai dengan Tiongkok melalui implementasi penuh dan efektif dari Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan / *Declarations on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* yang telah ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok, guna menjamin stabilitas dan keamanan kawasan bagi semua.

Sementara itu, pada Sidang PUIC ke-14 di Maroko, Maret 2019, Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan dukungannya dalam penyusunan Resolusi *Combating Terrorism under the UN Umbrella and Reaffirming the Legitimate Right to Resist Foreign Occupation and Aggression* yang mendorong ditingkatkannya kerja sama antaranggota PUIC dalam menanggulangi terorisme, antara lain dengan bertukar informasi, pengalaman, dan berbagi praktik cerdas.







Buku Kaleidoskop
BKSAP DPR RI
Periode 2014 - 2019



I N D O N E S I A

PAPUA
NEW
GUINEA

A U S T R A L I A



BKSAP dalam Dinamika Politik Internasional



1. Integrasi Regional dan Kerja Sama Kawasan

Dinamika sistem internasional menunjukkan bahwa *state power* tidak dapat dipenuhi dari aspek keamanan dan ketahanan nasional semata, namun ada aspek-aspek lain yang berperan signifikan dalam menjaga kedaulatan bangsa, termasuk isu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pasca-revolusi finansial di era 1970-an yang ditandai dengan semakin bebasnya arus modal lintas negara, telah terjadi setidaknya lima krisis finansial yang menjadi perhatian para ekonom internasional. Krisis hutang Amerika Latin di era 1970-1980, kegagalan European Rate Mechanism sekitar tahun 1992, jatuhnya nilai tukar peso Meksiko tahun 1994, krisis Asia 1997, dan krisis keuangan global

2008. Bagi Indonesia khususnya, krisis Asia 1997 menjadi pelajaran berharga mengenai mekanisme saling ketergantungan dalam kompleksitas sistem internasional.

Dalam kerangka sistem internasional, peran globalisasi juga tidak dapat dikesampingkan. Globalisasi mengacu pada kebebasan arus modal, percepatan alih teknologi, dan maraknya perkembangan industri telekomunikasi yang membentuk komunitas masyarakat transnasional di mana batas-batas teritorial negara tidak lagi menjadi penghalang bagi setiap individu untuk berinteraksi, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Globalisasi telah



membuka kesempatan bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk memperoleh akses pasar, teknologi, dan informasi dari negara-negara yang lebih maju. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi juga meningkatkan kompetisi.

Timbulnya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren regionalisme semakin menguat. Terbentuknya Eropa sebagai common market di awal 1993 memperkuat anggapan bahwa untuk meredam dampak negatif globalisasi, suatu negara tidak dapat menghindari dari kerja sama antarnegara, khususnya dalam kerangka kerja sama kawasan.

Indonesia merupakan salah satu pionir dalam mengembangkan kerja sama regional. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI melalui peran dan fungsi BKSAP dalam diplomasi parlemen, senantiasa mendukung kebijakan dan inisiatif Pemerintah dalam menginisiasi dan mengakselerasi tercapainya berbagai kerangka kerja sama regional. Di lingkup parlemen, DPR RI aktif berpartisipasi dalam sejumlah forum antarparlemen, seperti AIPA, APPF, APA, *Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP)*, dan *Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments (MSEAP)* yang diselenggarakan secara rutin.



Kiprah DPR dalam mengupayakan kerja sama regional di segala bidang juga tidak terbantahkan. Dalam Sidang Umum AIPA, Delegasi DPR menegaskan pentingnya penyelesaian isu Rohingya secara konsisten. Inisiatif DPR dalam membela hak-hak etnis Rohingya di Myanmar sering kali dianggap berbenturan dengan prinsip non-interference di ASEAN dan menuai penolakan dari berbagai negara. Namun, DPR RI tidak pernah gentar dalam menegaskan prinsip kemanusiaan dan hukum humaniter internasional.

DPR RI merupakan pihak yang pertama kali mengusulkan diselenggarakannya pertemuan *Women APPF (WAPPF)* di sela-sela pertemuan tahunan APPF. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen DPR RI terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan. Inisiatif tersebut disampaikan DPR dalam

pertemuan APPF ke-23 di Kanada pada tahun 2015 dan mendapatkan dukungan dari berbagai negara.

Dalam pertemuan MSEAP ke-3 di Turki pada tahun 2018, DPR RI mengusulkan agar negara-negara Eurasia mengurangi dependensi terhadap Dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional. Upaya tersebut dapat meredam dampak krisis mata uang yang saat itu dialami oleh negara-negara anggota MSEAP. Indonesia bersama Thailand dan Malaysia telah membentuk *Local Currency Settlement Framework (LCS)* yang mengatur penyelesaian transaksi perdagangan dengan mata uang lokal. DPR RI juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menopang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



Dalam kerangka mendukung regionalisme, BKSAP DPR RI pada awal tahun 2017 juga telah membentuk Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) sebagai kelanjutan Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dibentuk pada Desember 2015. Panja KER dibentuk dengan mempertimbangkan pentingnya fungsi pengawasan atas kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi yang disepakati di level pemerintah agar senantiasa berpedoman pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.





2. *Fighting Unfair Trade Practices:* Diplomasi Kepala Sawit di Tengah Terpaan Kampanye Negatif



Penjelasan Bagan

1. Uni Eropa merupakan negara importir minyak kelapa sawit ketiga terbesar di dunia. Pada 2017, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa mencapai 5.1 juta ton dengan nilai US\$3.6 miliar. Ekspor tersebut merupakan 17.85% dari total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang mencapai 28.76 juta ton (BPS, 2018).
2. Resolusi Parlemen Eropa *on palm oil and deforestation of rainforest* merupakan salah satu penyebab turunnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa karena dalam resolusi tersebut terdapat klausul penghapusan produksi biodiesel minyak sawit pada tahun 2021.
3. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada bulan Januari 2017 adalah sebesar Rp1.372.001.028. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp18.046.677.365, produk biodiesel minyak sawit Indonesia mengalami penurunan permintaan yang cukup besar (Kementerian perdagangan). Penurunan ini berdampak kepada 5,99 juta tenaga kerja dan petani yang bekerja dalam perkebunan kelapa sawit Indonesia (Kementerian pertanian, 2017)
4. Selain Resolusi parlemen Eropa, Uni Eropa juga menyusun Proposal RED II dengan salah satu pasal



- amandemen usulan Parlemen Eropa adalah penghapusan produk biodiesel minyak sawit pada tahun 2021. Amandemen tersebut dinegosiasikan di trilogue antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Council.
5. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tindakan dalam menanggapi Proposal tersebut yaitu dengan mengirimkan surat kepada Komisioner Perdagangan Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Presiden Parlemen Eropa. Selain itu para duta besar negara-negara produsen sawit dunia juga mengirimkan joint letter kepada Presiden Parlemen Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Presiden Komisi Eropa.
 6. BKSAP sebagai aktor diplomasi parlemen Indonesia memiliki tugas untuk mendukung perkembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani isu tersebut. Upaya yang dilakukan adalah:
 - Pertemuan anggota BKSAP dengan anggota Parlemen Uni Eropa yang tergabung dalam *Indonesia-European Union Friendship Group (IEUFG)* pada tanggal 8 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut DPR RI menyampaikan undangan kepada delegasi IEUFG untuk berkunjung ke Indonesia dan melakukan observasi proses produksi CPO di Indonesia.
 - pada tanggal 18 April 2017, Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf telah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar UE untuk ASEAN, Mr. Fransisco Fontan Pardo, dan menegaskan keberatannya terhadap resolusi Parlemen Eropa tentang sawit.
 - Pertemuan delegasi Komite INTA (International Trade) Parlemen Eropa dengan BKSAP,
 7. Proposal RED II diadopsi pada 14 Juni 2018 dan secara resmi dipublikasikan di *official journal of European Union* pada tanggal 11 Desember 2018. Walaupun dalam UU tersebut tidak disebutkan secara langsung mengenai pembatasan penggunaan minyak sawit di Uni Eropa, namun Uni Eropa menyebutkan pembuatan *delegated act* secara tidak langsung memberatkan para produsen minyak sawit. *Delegated act* disusun berdasarkan data *scientific* yang terbaik yang ada di tahun 2008-2015 tentang Kriteria dan Standar Uni Eropa untuk *biofuels*.
 8. Merespons hal tersebut, pada tanggal 26 Maret 2019, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengirimkan surat kepada Presiden Uni Eropa, Antonio Tajani, menyatakan keberatannya terhadap *delegated Act EU*.
- Komisi IV, dan Komisi VI DPR RI pada tanggal 23 Mei 2017. Delegasi DPR RI menyatakan keberatannya terhadap resolusi Parlemen Eropa karena akan berdampak negatif pada persepsi terhadap sawit Indonesia.
- Pertemuan delegasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional dengan Grup Kerja Sama Bilateral Asia Selatan dan Tenggara, Parlemen Austria pada bulan Mei 2018 yang menyatakan keprihatinannya mengenai upaya Parlemen Eropa menyetujui rancangan peraturan RED yang memasukkan target penghapusan minyak kelapa sawit (CPO) dari produk *biofuel* dan *bioliquids* pada 2021.



Diplomasi Kedaulatan Negara
oleh DPR RI melalui *Indonesia
Pacific Parliamentary
Partnership (IPPP)*



Payung hukum pelaksanaan diplomasi parlemen oleh DPR RI adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Bahwasannya penyelenggara Hubungan Luar Negeri terdiridaripemerintahdannon-pemerintah. Non-pemerintah yang dimaksud termasuk pula DPR sebagaimana disebutkan dalam penjelasan. Selain itu, peran diplomasi DPR diatur juga dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, di mana fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Begitu pula Pasal 116 Undang-undang MD3 memberi mandat BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan untuk menjadi pelaksana utama DPR dalam diplomasi luar negeri.


Dalam melaksanakan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2001 - 2009,

telah mencanangkan pelaksanaan diplomasi total, yaitu diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Diplomasi tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, NGO dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya atau kombinasinya namun tetap berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dengan diplomasi total terdapat banyak langkah kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa dikarenakan munculnya berbagai tantangan baru dalam isu-isu international dan diplomasi yang semakin kompleks terlebih lagi, sedangkan sifat yang melekat dari pemerintah adalah sangat kaku. Jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka diplomasi total menekankan pula pada *government*



to people atau bahkan *people to people relations*. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi yang menyertakan publik (Diplomasi Publik), Pemerintah berharap dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah, sehingga upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Jadi tujuan diplomasi total adalah agar masyarakat internasional mempunyai

persepsi yang baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas; mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar-aktor internasional; mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi; menambah pengalaman dalam berinteraksi; mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi



DPR RI menyelenggarakan pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, pada tanggal 23-24 Juli 2018, sebagai bentuk realisasi diplomasi parlemen. sebagai bagian dari diplomasi total, yaitu menjalankan fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri!

Penyelenggaraan pertemuan IPPP di Jakarta merupakan bentuk realisasi diplomasi parlemen untuk mendukung Pemerintah RI khususnya untuk Pembangunan di Kawasan Indonesia Timur sebagai daerah perbatasan langsung dengan Pasifik

Tercatat 15 negara Pasifik hadir;


Republik Fiji	Kepulauan Cook	Federasi Mikronesia	Republik Kiribati	Republik Nauru	Niue	Republik Palau	Papua Nugini
Kepulauan Marshall	Samoa	Kepulauan Solomon	Kerajaan Tonga	Tuvalu	Republik Vanuatu	Polinesia Perancis	Timor Leste

Hanya Vanuatu yang tidak menghadiri pertemuan IPPP ini.

Tujuan utama penyelenggaraan IPPP:
Meningkatkan persahabatan, kerja sama dan kemitraan antarpemerintah negara-negara pasifik dengan DPR RI di bidang ekonomi, pembangunan kelautan dan kemaritiman.

Tujuan inti penyelenggaraan IPPP:
Sebagai bentuk realisasi dari diplomasi total untuk meningkatkan kesepahaman dan membangun kemitraan untuk merealisasikan paradigma "outlook" Indo-Pasifik

Hasil penyelenggaraan IPPP:
Chair Statement untuk menegaskan komitmen bersama di masa depan untuk memperkuat program-program dialog dan kerjasama antar-parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik.





tanpa prasangka; dan memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah. Diplomasi tidak cukup hanya berhenti pada pembuatan kesepakatan tetapi yang terpenting adalah implementasi dari kesepakatan itu. Melalui diplomasi total, kesenjangan antara keinginan dan implementasi akan lebih cepat teratasi mengingat beragamnya aktor yang terlibat. Dengan melibatkan aktor-aktor yang semakin beragam, baik negara maupun bukan negara, daya tawar Indonesia dalam proses negosiasi semakin menguat.

Sejak Presiden Jokowi menjabat tahun 2014 telah mencanangkan momentum kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia yang ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, dari land-based development menjadi ocean-based development, dengan fokus pembangunan di Kawasan Indonesia

Timur sebagai daerah perbatasan langsung antara Indonesia dengan negara-negara sahabat di Kawasan Pasifik. Presiden ingin menjadikan daerah perbatasan ini, khususnya Tanah Papua, menjadi beranda depan Indonesia di hadapan negara-negara di kawasan Pasifik dengan mencanangkan percepatan pembangunan Papua, baik dimensi kewilayahan yang berbasis wilayah adat, dimensi sektoral, dan dimensi sosial di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Untuk menggerakkan ekonomi kawasan Timur Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan pembangunan infrastruktur strategis seperti re-aktivasi Bandara Frans Kaisepo sebagai jalur penerbangan internasional, kebijakan trans-kereta api Papua, pembangunan jembatan Holtekamp Jayapura sebagai landmark Indonesia di kawasan Pasifik maupun percepatan infrastruktur dasar di kawasan terisolir.



Perubahan paradigma pembangunan nasional tersebut didukung dengan politik luar negeri Indonesia yang memfokuskan pada pendekatan Indo-Pasifik di ASEAN. Konsep “melihat keluar” (Outlook) ASEAN-Pasifik—yang dirancang oleh Indonesia dan didedahkan ke anggota lain di KTT Asia Timur (*East Asia Summit -EAS*) Tahun 2018—melihat kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia sebagai teater yang terintegrasi dan saling terhubung. Outlook mencari momentum baru untuk sentralitas ASEAN dengan memperkuat mekanisme ASEAN yang ada, bukan menciptakan yang baru. Tidak seperti konsep lain yang mendefinisikan Indo-Pasifik melalui nilai-nilai umum seperti norma-norma demokratis, Outlook menekankan kepentingan bersama seperti pembangunan dan kemakmuran, juga memprioritaskan kerja sama dalam domain maritim, konektivitas regional, dan di bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip-prinsip dasarnya bertujuan inklusi regional namun menekankan pada multilateralisme melalui EAS.

Di kawasan Pasifik sendiri telah berdiri organisasi *Pacific Islands Forum (PIF)* yang didirikan pada tahun 1971 dengan nama *South Pacific Forum (SPF)* dan beranggotakan tetap 16 negara dan 13 mitra dialog. Indonesia menjadi mitra wicara PIF sejak tahun 2001. Sejak tahun 1989 *Post Forum Dialogue (PFD)* merupakan Pertemuan rutin dari PIF dengan negara-negara mitra dialog dan organisasi-organisasi terpilih yang dilakukan setelah Pertemuan para pemimpin PIF. Sejak bergabung, Indonesia tidak pernah absen dalam Pertemuan PFD-PIF dikarenakan keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara



Barat, menuju *look east policy*, kehadiran Indonesia dalam Pertemuan PFD-PIF, merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI; dan keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggali dukungan terhadap Indonesia dalam fora internasional.

Selain PIF, di kawasan Pasifik juga berdiri *Melanesian Spearhead Group (MSG)* yang dibentuk berdasarkan "*Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia*" dan ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988 serta beranggotakan Fiji, *Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS)* Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu, dan pada tanggal 7 Juni 1996 keanggotaannya ditambah Kiriwana, Trobriand Island. MSG bertujuan meningkatkan kerja sama untuk memajukan perekonomian negara anggota. Pada Maret 2007, MSG ditetapkan sebagai sebuah organisasi sub-regional dalam sebuah perjanjian yang berjudul "*Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group*" yang draftnya telah diselesaikan pada bulan. Pada KTT MSG ke-18 di Fiji, Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai Observer dan diharapkan akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG.

Dalam rangka melaksanakan diplomasi parlemen sebagai bagian dari diplomasi total terhadap kebijakan luar negeri Indo-Pasifik, yaitu menjalankan fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri, maka pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Jakarta, Indonesia, DPR RI menyelenggarakan pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) dengan mengangkat tema "*Human Development and Maritime Sustainability*". Pertemuan yang diselenggarakan selama dua hari tersebut dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 15

negara Pasifik antara lain; Republik Fiji, Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Republik Kiribati, Republik Nauru, Niue, Republik Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Kerajaan Tongga, Tuvalu, Polynesia Perancis dan Kaledonia Baru. Hanya Vanuatu yang tidak mengirimkan delegasi dan diharapkan akan mengubah pandangannya pada pelaksanaan IPPP berikutnya.

Tujuan utama daripada diselenggarakannya pertemuan IPPP adalah meningkatkan persahabatan, kerja sama dan kemitraan antarpellemen negara-negara Pasifik dengan DPR RI di bidang ekonomi, pembangunan kelautan dan kemaritiman. Sekalipun pendekatan *government to government* telah banyak dilakukan, pendekatan *parliament to parliaments* sangat diperlukan sebagai penguatan terhadap upaya-upaya Pemerintah yang selama ini sudah dilakukan. Penyelenggaraan Forum Parlemen ini merupakan bentuk dukungan penuh DPR RI terhadap upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan diplomasi, ekonomi, dan budaya Indonesia di kawasan Pasifik. Dengan penyelenggaraan pertemuan parlemen ini diharapkan pula *awareness* para politisi di parlemen negara-negara Pasifik Selatan mengenai kedaulatan NKRI. Dalam Forum Parlemen tersebut dibahas adanya berbagai kesamaan fisik, budaya dan geografis antara Indonesia (khususnya bagian Timur) dengan negara-negara Pasifik. Kerjasama dan kemitraan Indonesia – Pasifik akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kestabilan keamanan di kawasan. Pertemuan parlemen dengan tema "Pembangunan Manusia dan Ketahanan Maritim" ini menghasilkan *Chair Statement* yang menegaskan komitmen bersama di masa depan untuk memperkuat program-program dialog dan kerjasama antar-parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

Dengan memperkuat diplomasi politik secara total melalui keterlibatan seluruh





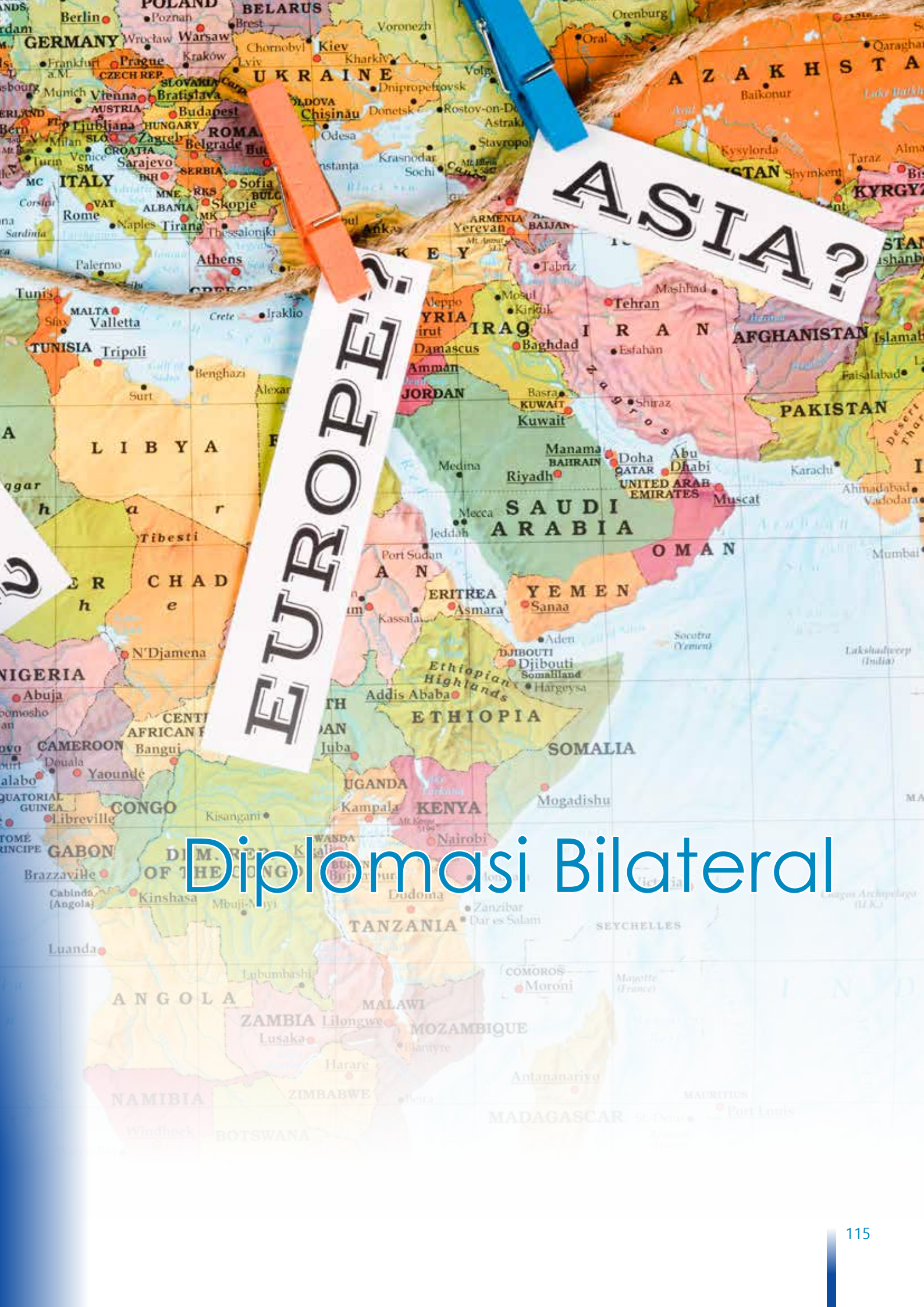
kekuatan komponen bangsa, baik bilateral maupun multilateral melalui forum regional maupun internasional, untuk menyampaikan komitmen Indonesia dalam hal mempertahankan kedaulatan wilayah, dan terutama dalam memberikan informasi yang menyeluruh dan berimbang terkait upaya-upaya apa saja yang telah

dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Otonomi Daerah Khusus Papua bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen kekuatan bangsa Indonesia, termasuk DPR RI.



CANADA

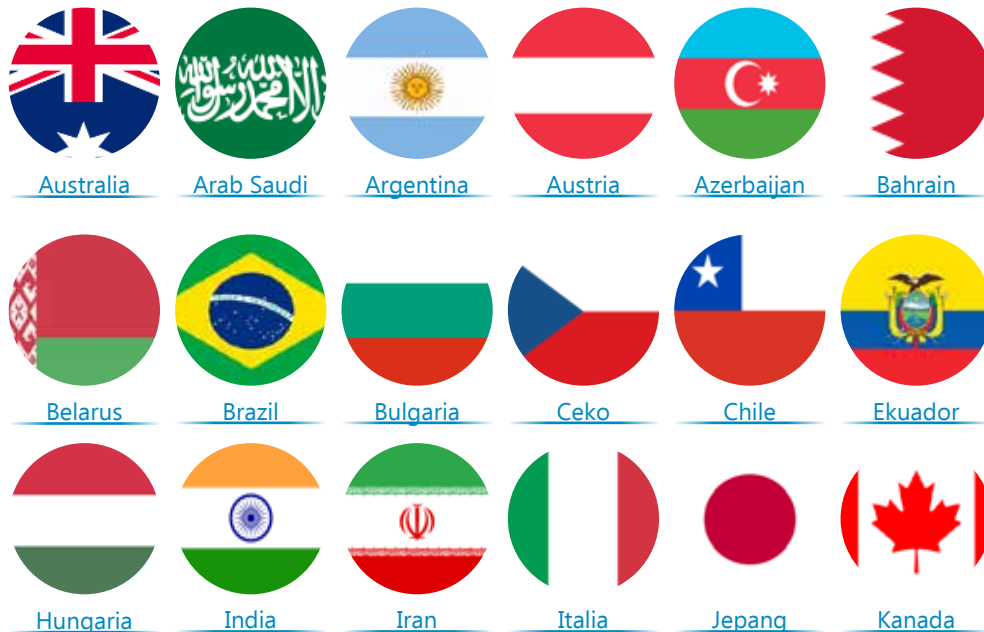
AFRICA



EUROPE?

ASIA?

Diplomasi Bilateral



Di tataran bilateral, Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) menjadi penjuror diplomasi DPR RI, khususnya untuk mendukung penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Esensi kerja sama bilateral yang dilakukan BKSAP adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan parlemen-parlemen negara sahabat sekaligus untuk mempromosikan bidang-bidang kerja sama yang menjadi fokus perhatian kedua negara. Seluruh anggota legislatif (DPR RI) yang berjumlah 560 mendapatkan penugasan sesuai penunjukan fraksi, dan secara proporsional terbagi ke dalam seluruh GKSB. Selain agar seluruh anggota dapat terpapar pengalaman menjalankan fungsi diplomasi parlemen, juga untuk memberikan keluwesan bagi GKSB mengangkat berbagai isu dari beragam perspektif lintas komisi, lintas fraksi.

Pembentukan GKSB bersifat resiprokal dan pemilihan negara-negara menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mencermati aspek-strategis hubungan bilateral RI dengan negara mitra. Dalam perjalanannya, BKSAP menerima berbagai tawaran pembentukan GKSB dari berbagai parlemen. Permintaan-permintaan tersebut tentunya disambut

dengan segala rasa hormat sebagai sebuah penegasan atas posisi penting DPR RI. Untuk tetap mempertahankan kualitas dan fokus diplomasi, DPR RI masih belum dapat secara maksimal menerima tawaran parlemen negara-negara tersebut.

Berbagai catatan tersendiri mewarnai perjalanan tugas GKSB 2014-2019. GKSB turut menyuarakan berbagai kepentingan Indonesia di kancah internasional. Format GKSB yang memiliki mitra secara langsung di parlemen-parlemen negara sahabat memungkinkan dialog secara luwes dan intensif. Isu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri kerap kali digaungkan terutama di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia. Paradigma baru perlindungan pekerja migran Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh elemen terutama setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran di tahun 2017. Undang-undang baru ini memberikan aspek perlindungan yang lebih komprehensif sejak perekrutan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya (UU 39/2004) yang hanya menekankan pada perlindungan saat penempatan tenaga kerja.



Isu pekerja migran terutama mencuat di GKSBB yang bermitra dengan parlemen negara-negara tujuan pekerja migran seperti negara-negara di jazirah Arab. Saat kunjungan ke Bahrain, delegasi GKSBB tidak hanya membahas isu pekerja migran dengan parlemen dan otoritas setempat, tetapi juga datang dan melihat langsung kondisi para pekerja migran Indonesia di shelter KBRI Manama. Umumnya mereka adalah pekerja migran yang mengalami permasalahan kerja seperti gaji yang belum dibayarkan, jam kerja atau beban kerja yang terlalu berat, sampai perlakuan tidak wajar dari pihak-pihak yang memperkerjakan. Secara resmi delegasi membahas isu-isu tersebut dengan CEO Bahrain *Labour Market Regulatory Authority (LMRA)* dan Menteri Tenaga Kerja Bahrain. Hal ini untuk menguatkan penyelesaian isu-isu tersebut baik melalui jalur bilateral maupun mekanisme kerja sama kawasan ASEAN dan *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Selain fokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia, beberapa kali GKSBB menangkap pula peluang kerja sama ketenagakerjaan. Pertemuan dengan jajaran Keidanren, yang merupakan perwakilan pengusaha-pengusaha terkemuka Jepang, membuka kenyataan akan adanya peluang pengiriman

tenaga kerja profesional di sektor formal. Kesempatan ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM dalam negeri agar menyesuaikan dengan standar negara tujuan terutama dalam hal penguasaan bahasa setempat.

GKSBB aktif pula mendukung politik luar negeri RI. Yang terkini adalah ketika Pemerintah RI mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. GKSBB turut membantu mencari dukungan baik ketika melakukan kunjungan maupun saat *courtesy call* dengan para Duta Besar negara sahabat. DPR RI memandang posisi strategis di Dewan Keamanan PBB akan banyak memberikan kontribusi positif bagi perwujudan solusi damai antara Palestina dan Israel. Indonesia akan banyak berperan dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian ekosistem global melalui penguatan kapasitas pasukan perdamaian PBB yang mengedepankan keseimbangan gender, peningkatan sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian, mendorong terciptanya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme, serta mendorong kemitraan





global menuju terciptanya sinergi antara penciptaan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Dukungan atas posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB saling bertautan dengan posisi DPR RI atas konflik perebutan wilayah antara Palestina dan Israel yang kerap kali disuarakan pula oleh GKS. DPR RI menyadari perjuangan kemerdekaan Palestina adalah amanat Konstitusi. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Konsisten dengan kebijakan pada periode-periode sebelumnya, di periode ini DPR RI membentuk GKS dengan Parlemen Palestina. Dalam pertemuan dengan Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina, *Palestinian National Council* dan *Palestinian Legislative Council* serta Ketua Parlemen Palestina yang menjadi agenda kerja GKS, telah ditegaskan kembali

dukungan Indonesia atas perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan baik secara bilateral maupun di forum-forum internasional. Pihak Palestina menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia membantu perjuangan Palestina. Dukungan Indonesia secara resmi telah disampaikan ketika *Palestinian National Council* memproklamasikan pembentukan Negara Palestina merdeka pada tanggal 15 November 1988 di Aljazair. Jauh sebelum itu, Presiden pertama RI, Ir. Soekarno telah menyatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.

Selain melalui GKS, diplomasi bilateral DPR RI dilakukan pula di sela-sela sidang antarparlemen. Berbagai MoU telah dihasilkan melalui pembicaraan bilateral



dengan delegasi parlemen negara-negara sahabat. MoU penguatan kerja sama antarpallemen dengan negara kawasan Pasifik yang ditandatangani di sela-sela *Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post 2015 Agenda* yang dihelat di Surabaya tahun 2014 menjadi salah satu pencapaian. Setiap tahun pembicaraan bilateral atas berbagai isu terkini dilakukan pula dengan parlemen mitra-mitra AIPA yang menjadi peninjau di Sidang Umum tahunan organisasi antarpallemen kawasan tersebut.

Sejauh ini kesepakatan-kesepakatan bilateral yang dihasilkan DPR RI dengan parlemen negara sahabat tetap mendapatkan tindak lanjut secara berkala. GKSB Kuba, misalnya, secara rutin masih melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kuba di Jakarta untuk menindaklanjuti komitmen penguatan kerja sama antara

Indonesia dan Kuba yang telah disepakati sebelumnya antara lain dalam bidang kesehatan dan bioteknologi. Berbagai GKSB lainnya juga secara aktif melakukan komunikasi dengan perwakilan negara sahabat di Jakarta dan hadir dalam kegiatan National Day negara mitranya. Namun tentunya diplomasi bilateral harus dimaknai sebagai suatu *work in progress*. Agar mendapatkan hasil maksimal, pembenahan masih harus dilakukan. Diharapkan anggota-anggota legislatif periode berikutnya dapat melanjutkan semangat diplomasi periode ini dan meneruskan komitmen penguatan diplomasi bilateral DPR RI.





Menjangkau
Publik



BKSAP merupakan AKD yang berfungsi untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri (UU MD3, Pasal 69 ayat 2). BKSAP adalah gerbang diplomasi parlemen. Kendati demikian, dengan segala tugas dan kewenangan yang dimilikinya, kiprah diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP sepertinya tidak terlalu dikenal oleh publik.

Hal ini dapat dipahami mengingat wilayah isu BKSAP yang kerap bersinggungan dengan dunia internasional. Padahal, meskipun wilayah cakupan isu adalah internasional, kerja-kerja BKSAP dapat menjadi jembatan penghubung dan penguat perspektif parlemen dalam isu-isu nasional. Dewasa ini hampir tidak ada lagi isu internasional yang tidak memiliki titik singgung dengan hal-hal keseharian kita. Tidak ada lagi *stand alone* isu internasional yang tidak memiliki dampak dalam politik domestik negara.

Tidak jarang beragam aktivitas, posisi internasional hingga lobi-lobi yang dilakukan para pelaku diplomasi parlemen selama ini kurang terpantau masyarakat secara luas. Akibatnya, persepsi publik atas kinerja DPR dan BKSAP pada khususnya kerap kali tidak berjalan lurus dengan beragam aktivitas yang dilakukan oleh lembaga legislatif ini.

Sebagai upaya meningkatkan visibilitas lembaga legislatif khususnya pada jalur-jalur diplomasi, BKSAP pada periode 2014-2019 mendorong inisiatif untuk lebih terlibat dengan publik via media sosial. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menjangkau publik lebih luas, khususnya warga dunia maya yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mencapai 143 juta jiwa pada 2017. Inisiatif ini sebenarnya telah dimulai BKSAP sejak periode 2009-2014, ketika BKSAP mulai mencuit di media sosial melalui Twitter dengan akun @bksapdpr pada Oktober 2013.

Namun, pada periode 2014-2019, BKSAP memperluas cakupannya di media sosial dengan bergabung di Instagram

melalui akun @bksapdpr. Per Juni 2017, akun BKSAP di Instagram tersebut mulai aktif. Melalui kedua akun ini, BKSAP berupaya untuk lebih mendekatkan diri dengan publik dunia maya. Per April 2019, akun BKSAP tersebut telah memiliki ribuan follower.

BKSAP juga memperluas cakupan interaksi publik mereka, tidak hanya di jalur online tetapi juga di jalur offline. BKSAP menyadari bahwa dalam membawa agenda internasional, Indonesia tidak hanya Jakarta semata. BKSAP perlu mendengar mereka yang jauh dari Ibukota, sekaligus meningkatkan visibilitas dan publikasi BKSAP kepada masyarakat luas.

Pada 2017, inovasi untuk menjangkau publik yang jauh dari Ibukota muncul, yakni *BKSAP Day*. Program ini merupakan inisiatif Pimpinan BKSAP untuk menghadirkan BKSAP ke masyarakat luas sekaligus berinteraksi, berdialog hingga bersosialisasi dengan mereka. Potensi pertama yang menjadi target sasaran *BKSAP Day* adalah generasi muda seperti mahasiswa dan pelajar.

Tercatat sudah lebih dari tujuh kali *BKSAP Day* terselenggara di beragam Perguruan Tinggi maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dari berbagai daerah seperti Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Jawa Timur; Cirebon, Jawa Barat; Tangerang, Banten; Semarang, Jawa Tengah; Banjar dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Misi utama adalah mengenalkan BKSAP kepada masyarakat, dalam hal ini civitas akademik maupun kalangan pelajar, dengan harapan agar generasi muda Indonesia terbuka perspektifnya tentang dunia internasional dan diplomasi yang juga dilakukan parlemen. Selain itu, *BKSAP Day* juga merupakan ikhtiar BKSAP untuk mendorong generasi muda melekat politik baik di level nasional maupun internasional.

Sambutannya sangat luar biasa. Banyak dari generasi muda yang mengajukan ragam pertanyaan untuk memuaskan dahaga mereka akan rasa ingin tahu terkait





BKSAP DAY

DIARI PERAN STRATEGIS



Dr. Nurul Huda Assegaf, M.P.
Ketua Komisi X DPR RI





BKSAP. Bahkan, banyak pula di antara mereka yang tertarik untuk mencoba magang, untuk turut berkontribusi menjadi unit pendukung dari kerja BKSAP. Agenda-agenda tersebut juga membuka mata para generasi muda bahwa DPR tidak selalu tentang “jalan-jalan” saat tugas ke Luar Negeri, tetapi juga tentang memperjuangkan aspirasi parlemen dan juga membawa nama harum Indonesia.

Semangat BKSAP menyerap dan menjangkau publik tidak berhenti melalui media sosial dan *BKSAP Day* semata. BKSAP juga berupaya membangun kemitraan strategis dengan beragam pusat keilmuan khususnya kalangan akademika Perguruan Tinggi. Kalangan civitas akademik dari Perguruan Tinggi merupakan *resources pool* untuk keilmuan, riset hingga advokasi.

Itu sebabnya pada Oktober 2017, BKSAP bersama Universitas Prof Dr Moestopo (beragama) menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) untuk kerja sama. Isi MoU tersebut adalah terkait kerja

sama kelembagaan di bidang penelitian, pertukaran informasi, dan kajian isu-isu internasional.

MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf, Plh. Sekjen DPR RI Damayanti, dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo Rudy Ahardjanto, 6 Oktober 2017, di ruang pertemuan BKSAP Lt. 4 Nusantara III, DPR RI. Kerja sama ini merupakan inisiatif BKSAP untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan menggiatkan penelitian, terutama kajian-kajian internasional.

Ke depan, BKSAP bertekad untuk terus memperluas visibilitasnya dan juga mendorong dukungan keahlian melalui inisiatif serupa tidak hanya dengan Perguruan Tinggi tetapi juga dengan lembaga masyarakat sipil dan juga organisasi think tank. BKSAP juga idealnya perlu untuk menyempurnakan beragam mekanisme public outreach untuk mendapatkan input dan interaksi maksimal dari publik. Program *BKSAP Day* dapat lebih dikembangkan dengan agenda





yang lebih spesifik dan terarah. Selain itu, target dan sasaran kunjungan dapat ditentukan dengan lebih matang sehingga mereka yang berinteraksi memiliki bekal cukup matang dalam mengolah informasi maupun isu-isu internasional yang disampaikan BKSAP. Kendati demikian, tidak ada salahnya pula apabila BKSAP mengolah dan mengemas interaksi yang muncul dengan bahasa dan istilah yang lebih lugas untuk menggambarkan bahwa DPR, BKSAP dan masyarakat yang diwakilinya tak berjarak.

Tentunya dengan penyempurnaan beragam mekanisme yang ada tersebut dengan tujuan untuk menjangkau publik yang lebih luas dan mendengar mereka sebagai aspirasi publik yang dapat diperjuangkan di jalur internasional.





Diplomasi DPR RI ke Depan





Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI, sebagaimana diuraikan dalam Kaleidoskop BKSAP 2014-2019 di atas, menunjukkan bahwa DPR memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang MD3, bahwa ketiga fungsi DPR di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diplomasi parlemen yang dimaksud, sudah tentu, juga bertujuan untuk memperjuangkan berbagai isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, termasuk kepentingan geopolitik Indonesia di kawasan, dan hal tersebut diperjuangkan oleh DPR di fora internasional (baik secara bilateral maupun multilateral), dan juga melalui berbagai aktivitas diplomasi lainnya.

Jika mengamati isu yang diangkat dan diperjuangkan oleh DPR selama ini, khususnya dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah isu yang memerlukan solusi segera dalam penanganannya, seperti kebijakan minyak sawit Uni Eropa yang diskriminatif dan krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Namun demikian, terdapat pula sejumlah isu yang masih harus terus diperjuangkan, di antaranya pencapaian SDGs, perubahan iklim, pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya, ancaman terorisme, keamanan di kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, hingga isu Palestina. Ini artinya, diplomasi yang dijalankan oleh DPR ke depan tidak terlepas dari upaya untuk terus memperjuangkan berbagai isu yang belum berhasil dicapai atau diatasi, dan oleh karena itu, DPR harus terus memperjuangkannya.

Dalam kerangka itu, DPR, khususnya melalui BKSAP, perlu membuat prioritas diplomasi parlemen, setidaknya untuk lima tahun ke depan pasca-dilantikannya Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Sebagai bagian dari *multitrack diplomacy*,

diplomasi parlemen tersebut seyogianya sejalan dengan prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan, yang biasanya telah ditentukan oleh Pemerintah (Kementerian Luar Negeri) di awal masa pemerintahan di tahun pertama. Untuk itu, sinergitas perlu dibangun sejak awal masa pemerintahan, di antaranya melalui Rapat Konsultasi antara Presiden dan DPR, atau melalui Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri) guna membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan. Di luar itu semua, DPR juga harus sigap menyikapi persoalan-persoalan internasional baru yang muncul di kemudian hari baik di kawasan maupun di tingkat global.

Persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian utama dalam aktivitas diplomasi DPR ke depan. Dalam konteks ini, DPR bersama parlemen negara-negara lain, misalnya, melalui berbagai forum internasional yang diikutinya harus dapat mengambil peran dan berkontribusi dalam mendukung terwujudnya kondisi ekonomi global yang lebih baik sehingga bisa berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat negara-negara di dunia. Kondisi ekonomi global yang belum kondusif dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana diprediksi oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* di awal tahun 2019, dan juga sistem perdagangan dunia yang belum sepenuhnya adil, harus menjadi perhatian dan dicari solusinya secara bersama-sama oleh masyarakat internasional, termasuk oleh parlemen. Pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dengan 17 Tujuan (Goals) dan 169 Target, sudah tentu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat; di mana semua orang harus mendapatkan manfaat dan semua pemangku kepentingan terlibat dalam implementasinya (*no one left behind*).

Isu kedaulatan dan integritas wilayah RI juga perlu terus diperhatikan dalam aktivitas diplomasi DPR ke depan,



setidaknya untuk turut menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari kemungkinan ancaman dan gangguan yang datang dari luar, seperti Papua yang berdekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, yang kini sedang dipersengketakan oleh China dengan sejumlah negara ASEAN. Ketika kedaulatan RI di kedua wilayah itu ada yang mempersoalkan, misalnya, DPR, melalui aktivitas diplomasi parlemen (baik secara bilateral maupun multilateral) dan juga melalui aktivitas diplomasi lainnya (seperti melalui pertemuan dengan para duta besar negara sahabat di Jakarta), perlu menyuarakan secara tegas perihal kedaulatan RI atas wilayah tersebut.

Penegasan mengenai kedaulatan dan integritas wilayah RI ini penting untuk terus disuarakan dalam berbagai aktivitas diplomasi Indonesia, termasuk melalui diplomasi DPR, mengingat hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak legal Indonesia atas wilayah kedaulatannya, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis Indonesia di kawasan dan juga global. Indonesia akan semakin disegani dan diakui peran internasionalnya oleh banyak negara di dunia karena telah mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya secara legal dan damai.

Isu keamanan dan perdamaian di kawasan, dan juga dunia, sudah tentu juga, harus selalu menjadi perhatian dalam



diplomasi DPR. Di kawasan, khususnya Asia Pasifik (yang mencakup Asia Timur dan Asia Tenggara di mana Indonesia berada di dalamnya), DPR harus menjadi bagian yang ikut memastikan terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan ini, antara lain dengan terus berperan aktif dalam sidang-sidang *Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, yang dalam sidang-sidangnya juga kerap mengagendakan isu keamanan untuk dibahas. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum jelas arah perkembangannya, yang disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara Korea Utara dan Amerika Serikat terkait

isu nuklir, serta sengketa teritorial di Laut China Selatan antara China dan sejumlah negara ASEAN, adalah dua contoh isu keamanan di kawasan yang perlu diikuti terus perkembangannya oleh DPR. DPR, bersama parlemen negara-negara di kawasan, melalui fora internasional dan jejaring diplomasi yang dimilikinya harus berkontribusi dalam mencari solusi damai dan tidak membiarkan situasi keamanan di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan berkembang ke arah konflik terbuka.

Isu keamanan dan perdamaian di berbagai kawasan dunia lainnya, terutama yang menyita perhatian internasional, seperti di Timur Tengah (termasuk Palestina) serta Asia Selatan yang kerap diwarnai oleh



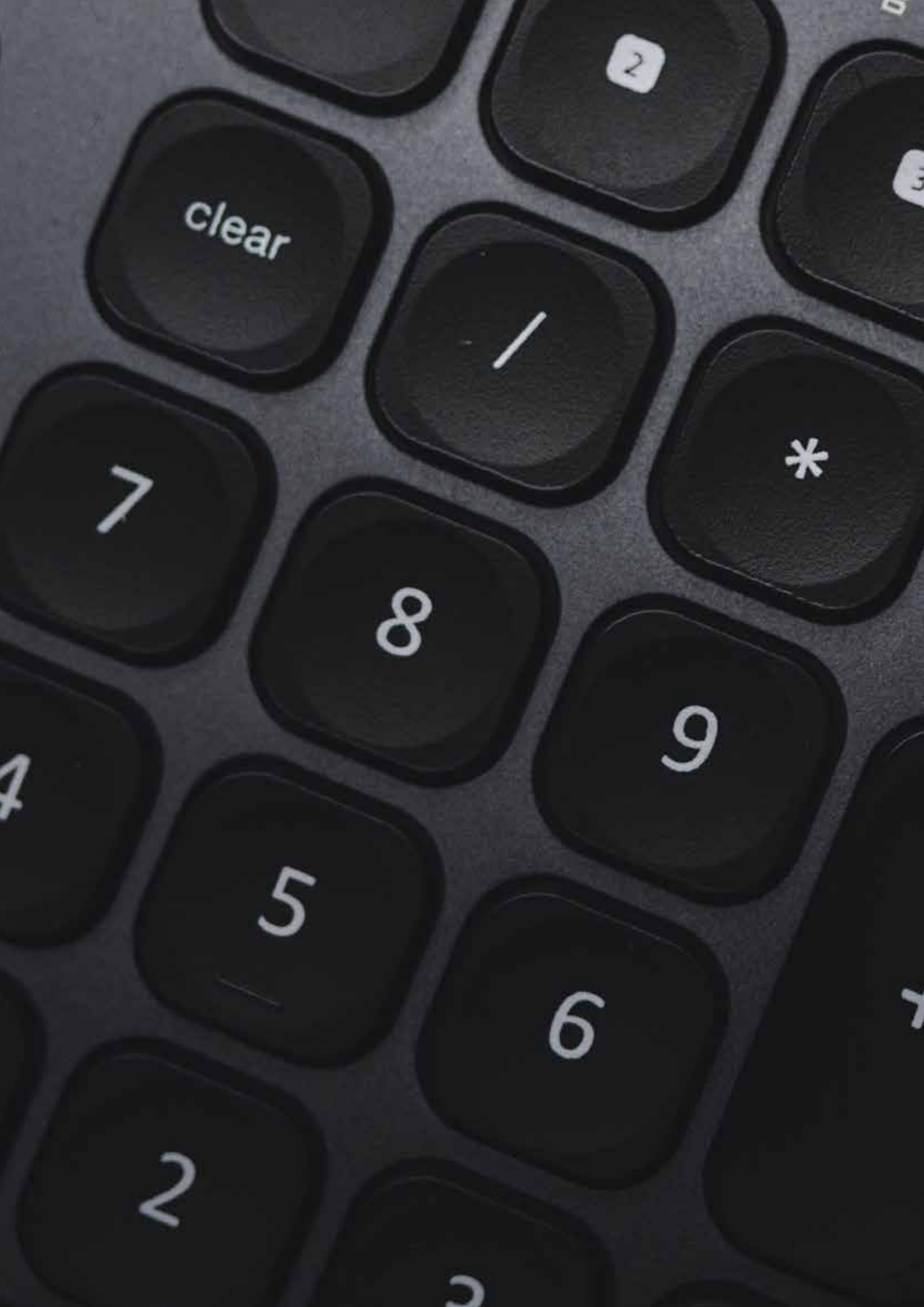
ketegangan hubungan India dan Pakistan, juga tidak dapat diabaikan oleh DPR. Khusus kemerdekaan Palestina, DPR harus terus menyuarakan dan memperjuangkannya, karena telah menjadi hutang sejarah yang belum terbayarkan dan merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". DPR harus terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina tersebut tidak saja di fora antarparlemen, seperti di *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)* dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, tetapi juga di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti di *Annual Parliamentary Hearing at the United Nations* yang dihadiri parlemen negara-negara di dunia. DPR juga harus mengawal posisi strategis Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, periode 2019-2020, agar lebih intens lagi memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

Masih berkaitan dengan isu keamanan, aktivitas diplomasi DPR ke depan juga harus diarahkan untuk menyikapi secara kritis persoalan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang mengancam keamanan manusia (*human security*), di antaranya perdagangan ilegal dan penyelundupan narkoba yang masih terus terjadi, kejahatan siber (*cyber crime*), dan terorisme. Ini artinya, DPR juga harus menaruh perhatian pada upaya terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, dan juga dunia, yang tidak cukup diupayakan hanya dengan mencegah konflik atau perang militer antarnegara, tetapi juga harus diupayakan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan akan kelangsungan hidup masyarakat (individu maupun kelompok), baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Peran parlemen di sini adalah mendorong negara-negara, baik di tingkat kawasan maupun global, untuk menghadirkan kebijakan yang lebih peduli terhadap keamanan manusia.

Dalam kerangka memperkuat perjuangan diplomasi Indonesia, posisi-posisi kunci yang diduduki oleh sejumlah Anggota DPR di berbagai fora antarparlemen juga perlu untuk terus dipertahankan. Bahkan, jika ada peluang, posisi Presiden IPU yang belum pernah diduduki Indonesia juga perlu untuk diraih. Hal tersebut tidak saja strategis bagi eksistensi parlemen Indonesia di fora internasional, tetapi juga akan memperlancar dan memperkuat perjuangan diplomasi Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Anggota DPR yang akan menjalankan peran diplomasi, sudah seharusnya juga memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan peran itu. Keberadaan sistem pendukung yang memadai dalam bentuk tersedianya database dan tenaga ahli, termasuk peneliti, untuk mendukung aktivitas diplomasi DPR ke depan dari sisi substansi juga penting untuk diperhatikan dan terus diperkuat.







clear

2

3

/

*

7

8

9

4

5

6

2

3

7



Anggaran dan Realisasi BKSAP 2014 - 2019

Tahun	Anggaran
2014	Rp.151.915.572.000
2015	Rp.129.013.410.000
2016	Rp.151.915.572.000
2017	Rp.185.496.767.000
2018	Rp.185.087.733.000
2019	Rp.106.559.712.000

Tahun	Realisasi
2014	Rp.101.378.486.407
2015	Rp.52.386.457.306
2016	Rp.101.378.486.407
2017	Rp.134.162.509.672
2018	Rp.125.453.681.667
2019	Kegiatan sedang berjalan





Mereka yang
Datang dan Pergi



Merdeka Yang Datang Dan Pergi

- PIMPINAN BKSAP TAHUN 2015 -



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

MEUTYA VIADA HAFID

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 235



IR. H. TEGUH JUWARNO, M.SI

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL /A - 484

H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115





- PIMPINAN BKSAP PER TANGGAL 15 MARET 2016 -



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

TANTOWI YAHYA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 252



JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/
NO. 196



H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115



H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/
NO. A - 538



-PIMPINAN BKSAP PER TANGGAL 20 JULI 2017-



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/
NO. 196



SITI HEDIATI SOEHARTO, SE

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 281



H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115



H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/
NO. A - 538





- PIMPINAN BKSAP PER TANGGAL 24 JANUARI 2018 -



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/
NO. 196



SITI HEDIATI SOEHARTO, SE

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 281



H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115



HJ. NURHAYATI

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 521





-PIMPINAN BKSAP PER TANGGAL 25 JULI 2018-



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A – 432

JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/
NO. 196



DR. IR. FADEL MUHAMMAD

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 317



H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115



DRS. H. HASRUL AZWAR, MM

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A – 507





- PIMPINAN BKSAP PER TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 -



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/
NO. 196



DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 264

H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115



DRS. H. HASRUL AZWAR, MM

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 507



- PIMPINAN BKSAP PER TANGGAL 9 JULI 2019 -



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/
NO. 196



DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 264



DR. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA/ NO. A - 107



H. ACHMAD FARIAL

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 517







Anggota BKSAP Periode 2014 - 2019



- ANGGOTA BKSAP PERIODE TAHUN 2015-2019 -

PIMPINAN



DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI

KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT /NO. A - 432

MUTYA VIADA HAFID

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 235



IR. H. TEGUH JUWARNO, M.SI

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL /A - 484

H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOK DAN)

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115



JULIARI P. BATUBARA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. 196

TANTOWI YAHYA

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 252



H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 538

HJ. NURHAYATI

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 521



SITI HEDIATI SOEHARTO, SE

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 281



DR. IR. FADEL MUHAMMAD

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 317



DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 264



DR. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA/A - 107



DRS. H. HASRUL AZWAR, MM

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 507



H. ACHMAD FARIAL

WAKIL KETUA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 517



ANGGOTA BKSAP

DRA. SB. WIRYANTI SUKAMDANI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 144



IR.H. DARYATMO MARDIYANTO

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 170



DR. EVITA NURSANTY, M.SC (KAPOKDAN)

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 171





IR. NAZARUDIN KIEMAS, MM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 134

VANDA SARUNDAJANG

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 224



DR. EFFENDI M.S. SIMBOLON, M.IPOL.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 147

DR. IR. PRAMONO ANUNG WIBAWA, M.M.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 196



JULIARI P. BATUBARA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 168

JUNICO BP SIAHAAN, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 151



CHARLES HONORIS

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 149

SUDIN, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 139



DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.SI.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 162



IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS, M.COMM&MEDIA ST

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 229



HERMAN HERY

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 215



KH. JALALUDIN RAKHMAT

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 152



MERCY CHRISTY BAREND, ST

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 228



DONY MARYADI OEKON, ST

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 167



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. A - 174



ONO SURONO, ST

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. 163



DWI RIA LATIFA, SH, M.SC

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN/NO. 143



IR. FAYAKHUN ANDRIAJI, M.KOM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 251



H. ANDI ACHMAD DARA, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 295

GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 296



DWIE AROEM HADIATIE, S.I.KOM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 247

H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 310



MUTYA VIADA HAFID

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 235

H. INDRU HANANTO

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 305



DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 264

DRG. HJ. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. A - 315



SITI HEDIATI SOEHARTO, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 281



BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE, AK, MM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 239

H. HASNURYADI SULAIMAN

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 306



H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 285

DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 237



H. SYAMSUL BACHRI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 312

DR. JERRY SAMBUAGA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 309



ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHUM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 275

BAMBANG ATMANTO WIYOGO, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 250



HJ. SANIATUL LATIVA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA/NO. 243



TANTOWI YAHYA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 252

PDT. ELION NUMBERI, STH

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 322



ZAINUDIN AMALI, S.E.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 292

H. DITO GANINDUTO, M.B.A.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GOLKAR/NO. A - 278



H. BIEM TRIANI BENJAMIN, BSC, MM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 341

RACHEL MARIAM SAYIDINA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 344



DRS. WENNY WAROUW

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 387

MOHAMAD HEKAL, MBA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 361



RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 356



AMRULLAH AMRI TUASIKAL, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 395

IR. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 334



ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.PSI., M.SI, M.SC.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 363

KATHERINE ANGGELA OENDOEN

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 382



IR. SUMAIL ABDULLAH

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 366

DR. H. AZIKIN SOLTHAN, M.SI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 366



DR. H. SAREH WIYONO M., SH, MH

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 371

IR. NUROJI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 348



RITA ZAHARA, SH

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 332



HERI GUNAWAN, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 346



H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 390



ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 342



IR. DWITA RIA GUNADI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 339



G. BUDISATRIO DJIWANDONO

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 366



H. NURZAHEDI, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 333



MOHAMAD HEKAL, MBA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 361



SUSI MARLENY BACHSIN, SE, MM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 337



SARTONO, SE., MM.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT/ NO. A - 435



HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT/ NO. A - 413

H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT/ NO. A - 407



VENA MELINDA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 342

DR. H. SYARIEF HASAN, MBA, M.M

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT/ NO. A - 416



PUTU SUPADMA RUDANA, MBA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT/ NO. A - 442

KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 333



H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/ NO. A - 361

IR. ALIMIN ABDULLAH

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 469



H. MUHAMMAD SYAFRUDDIN, S.T., M.M.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 496



HJ. DESY RATNASARI, M.SI, M.PSI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 472

LUCKY HAKIM



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 474



TJATUR SAPTO EDY

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 481

H. JON ERIZAL, SE, MBA



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 463



AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 471

BARA K. HASIBUAN



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 500



INDIRA CHUNDA THITA SYARUL, SE.,MM

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 501

AHMAD YOHAN, M.SI



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 497



DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/ NO. A - 78



HJ. NIHAYATUL WAFIROH, MA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/ NO. A - 65

KRISNA MUKTI



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 474



H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI, M.SI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/ NO. A - 55

DRA. HJ. SITI MASRIFAH, MA



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/ NO. A - 77



H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.AG

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/ NO. A - 44

DRS. FATHAN



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/ NO. A - 52



JAZILUL FAWAID, S.Q. MA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL/ NO. A - 501

DR. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A.



ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/ NO. A - 96



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. SOS.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/ NO. A - 117



H. MA'MUR HASANUDDIN, MA

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/ NO. A - 99

DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/ NO. A - 117



DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, M.SC

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/ NO. A - 116

DRS. H. MAHFUZ SIDIK, M.SI.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/ NO. A - 105



H. ROFI' MUNAWAR, LC (KAPOKDAN)

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera/A - 115

ANDI MUHAMMAD GHALIB, SH.,MH.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 542



HJ. KARTIKA YUDHISTI, B, ENG, M.SC

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 534

DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.SI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 513



H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 538



HJ. NURHAYATI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 521



H. ACHMAD FARIAL

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 517



H. MUKHLISIN

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 522



PRANANDA SURYA PALOH

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI NASDEM/NO. A - 3



H. HAMDANI, S.IP. (KAPOKDN)

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI NASDEM/NO. A - 30



AMELIA ANGGRAINI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI NASDEM/NO. A - 17



H. AHMAD SAHRONI, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI NASDEM/NO. A - 11



DRS. T. TAUFIQULHADI, M.SI.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI NASDEM/NO. A - 558



DRS. FADHOLI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/NO. A - 538



M. ARIEF SUDITOMO, SH.,MA (KAPOKDAN)

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 550



DRS. SUDIRO ASNO, AK

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 553



DEWI YASIN LIMPO, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI NASDEM/NO. A - 560



FERRY KASE, SH.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 558



ZAIRINA, S.IP.

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 555



LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 557



MUKHTAR TOMPO, S.PSI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 560



DR. H. MUHAMMAD FARID AL FAUZI

ANGGOTA BKSAP DPR RI
FRAKSI PARTAI HATI NURAINI RAKYAT/NO. A - 555



WORLD
PROJECTION.

ANTARCTIC



BKSAP in Frame



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Italia
Tanggal 22 - 28 November 2015





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Lebanon
Tanggal 10 - 16 Desember 2015





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Iran
Tanggal 12 - 18 Desember 2015



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Austria
Tanggal 13 - 19 Desember 2015



Kunjungan Teknis Pimpinan BKSAP
dengan Parlemen Polandia
Tanggal 19 - 25 November 2015





Kunjungan Teknis Pimpinan BKSAP
dengan Parlemen Kazakhstan
Tanggal 2 - 8 Desember 2016



Kunjungan Teknis Pimpinan BKSAP
dengan Parlemen Zimbabwe
Tanggal 4 - 10 Desember 2016



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Azerbaijan
Tanggal 18 - 24 Februari 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Hongaria
Tanggal 25 - 31 Maret 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Kuba Tanggal 20 - 26 Mei 2017





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Slovakia
Tanggal 9 - 15 September 2017





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen India Tanggal 24 - 27 September 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Serbia Tanggal 3 - 9 Oktober 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Australia
Tanggal 14 - 20 Oktober 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Rusia
Tanggal 14 - 20 Oktober 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Ukraina
Tanggal 21 - 27 Oktober 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Polandia
Tanggal 18 - 24 November 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Madagaskar
Tanggal 25 November - 1 Desember 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Rumania
Tanggal 27 November - 3 Desember 2017



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Makedonia
Tanggal 2 - 8 Desember 2017

Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Sudan
Tanggal 2 - 8 Desember 2017





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Korea Tanggal 17 - 23 Maret 2018





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Uni Eropa
Tanggal 7 - 13 April 2018





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Lithuania Tanggal 21 - 27 April 2018





Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Ceko
Tanggal 27 September - 3 Oktober 2018

Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Sudan
Tanggal 24 - 30 November 2018



29/11/2018 23:4



Kunjungan Kerja Grup Kerja Sama
Bilateral dengan Parlemen Belarusia
Tanggal 15 - 21 September 2018





the 131st Inter-Parliamentary Union (IPU)
Tanggal 12 - 16 Oktober 2014
Di Swiss

the Seminar for Asia Pacific Parliaments
Tanggal 23 - 24 September 2014
Di Bangladesh





Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post 2015 Agenda
Tanggal 12 - 13 November 2014
Di Indonesia



the 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU)
Tanggal 17 - 25 Oktober 2015
Di Swiss



the 4th Parliamentary Days OECD
Tanggal 3 - 5 Februari 2016
Di Perancis



the 135th Inter-Parliamentary Union (IPU)
Tanggal 23 - 27 Oktober 2016
Di Swiss



the 2nd High Level Meeting
the Global Partnership for Effective
Development Cooperation
Tanggal 26 November - 2 Desember 2016
Di Kenya



Regional Seminar
the Sustainable Development Goals
for the Parliaments in the Asia-Pacific
Tanggal 11 - 13 Mei 2017 di Vietnam



the 1st World Parliamentary Forum on Sustainable Development
Tanggal 6 - 7 September 2017 di Indonesia

the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development
Tanggal 12 - 13 September 2018
Di Indonesia



THE 2ND WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT



the 4th MIKTA Speakers Consultation
Tanggal 15 - 17 September 2018
Di Indonesia



Arab Region Parliamentary Forum
on the 2030 Agenda
Tanggal 24 - 25 Januari 2019 di Lebanon



the 140th Inter-Parliamentary Union (IPU)
Tanggal 6 - 10 April 2019
Di Qatar

Seminar International Womens Day
Tanggal 2 April 2019
Di Indonesia



INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2019



BKSAP DPR RI
"Empowering Women
in Politics and Economics
for Reducing Gaps"

Malang, April 2nd 2019

ayati Ali Assegaf M.Si

for Inter-Parliamentary Cooperation
Representatives of the Republic of Indonesia



Mobilizing Global Voices
Tanggal 15 - 17 April 2019
Di Inggris



the 14th Session of the PUIC Conference
Tanggal 11 - 14 Maret 2019
Di Maroko



the Organisation for Economic Co-operation
OECD, Tanggal 20 - 21 Mei 2019
Di Perancis



PRANESTUTI
INDONESIA

Generalia BUDSATRIO DUBANDONO
INDONESIA

INDONESIE

Juliari Peter BATUBARA
INDONESIA

Amelia AGGRAINI
INDONESIA

ERIKSSON
SWEDEN

Jakob FORSSMED
SWEDEN



the United Nation (UN) Hearing
Tanggal 28 - 29 April 2019
Di Amerika Serikat



Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Sustainable Development Goals (SDGs)
Tanggal 22 - 28 Juli 2019 di Kolombia

Embassy Briefing The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development

*"Combating Inequality through Social
and Financial Inclusion"*



4-5 September 2019 | Bali - Indonesia

the 3rd World Parliamentary Forum
on Sustainable Development
Tanggal 4 - 5 September 2019 di Bali





The House of Representatives
of the Republic of Indonesia

THE 3rd WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Combating Inequality through Social and Financial Inclusion

4 - 5 September 2019 | Bali-Indonesia

#aksapdprri

#WPFSDBAU2019

@aksapdpr



The House of Representatives
of the Republic of Indonesia

THE 3rd WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Combating Inequality through
Social and Financial Inclusion

4 - 5 September 2019 | Bali - Indonesia

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS





PARLIAMENT OF MALAYSIA



"Empowering The Peoples For A Drug-Free Asean Post 2015"

12th MEETING OF THE AIPA FACT FINDING COMMITTEE (AIFOCOM) TO COMBAT THE DRUG MENACE

KUALA LUMPUR, MALAYSIA • 7 - 11 JUNE 2015



ASEAN - INTER PARLIAMENTARY ASSEMBLY

THE AIPA FACT FINDING COMMITTEE (AIFOCOM) TO COMBAT THE DRUG MENACE

Hotel Le Méridien, Kuala Lumpur Malaysia
7 - 11 June 2015



the 12th Meeting of AIPA Fact Finding
Committee (AIFOCOM)
Tanggal 7 - 11 Juni 2015 di Malaysia

the 8th Plenary Session
Asian Parliamentary Assembly (APA)
Tanggal 9 - 11 Desember 2015 di Kamboja



8th PLenary SESSION
ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY
PROMOTING PEACE, RECONCILIATION AND DIALOGUE IN ASIA
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
9- 11 Dec 2015





the 36th General Assembly
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
Tanggal 6 - 12 September 2015 di Malaysia





the ASEAN - AIPA Interface Dialog
Tanggal 25 - 26 April 2015
Di Malaysia





APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development
Tanggal 19 - 20 Agustus 2015 di Indonesia



WELCOME TO
ASIAN PARLIAM
STAN COMMITTEE MEETING ON E
“Linking Economic Growth to Sustainable
Hon. Dr. Nurh
Cha
The Committee for Inte
the House of Representa
Jakarta, 19



the 23th Asia Pacific Parliamentary Forum
Tanggal 10 - 15 Januari 2015
Di Ekuador





Kunjungan Kerja Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Bali Tanggal 16 - 17 September 2015





Kunjungan Kerja Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Bangkok Tanggal 17 - 20 November 2015





Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Beijing
Tanggal 17 - 20 November 2015





the 9th Asia - Europe
Parliamentary Partnership (ASEP)
Tanggal 21 - 22 April 2016 di Mongolia





the 8th AIPA Caucus Meeting
Tanggal 8 - 12 Agustus 2016
di Lao PDR



the AIPA - ASEAN Interface Dialogue
Tanggal 6 - 8 September 2016
di Lao PDR



the 38th General Assembly of AIPA
Tanggal 29 September - 3 Oktober 2016
Myanmar





لجنة كميته دائم امور اجتماعي و فرهنگي مجمع مجالي آسيائي

تهران، جمهوري اسلامي ايران ۷ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵



Asian Parliamentary Assembly Standing Committee Meeting on Social and Cultural Affairs

26-27 April 2016 Tehran-Islamic Republic of Iran



the APA Standing Committee on
Social and Cultural Affairs
Tanggal 26 - 27 April 2016 di Iran



the APA Standing Committee on
Political Affairs
Tanggal 1 - 2 Juni 2016 di Jordan



the APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development
Tanggal 26 - 27 Juli 2016 di Pakistan





the 9th APA Plenary Session
Tanggal 29 November - 1 Desember 2016
di Kamboja





the 24th Asia Pacific Parliamentary Forum
Tanggal 16 - 22 Januari 2016
di Kanada







the 1st Meeting of Speakers of Eurasian Countries` Parliament (MSEAP)
Tanggal 19 - 20 April 2016 di Rusia





Kunjungan Kerja Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Riau Tanggal 26 - 28 Juli 2016





Kunjungan Kerja Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Medan Tanggal 23 - 25 Februari 2016



PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero)





Kunjungan Kerja Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Jerman Tanggal 17 - 21 Oktober 2016





Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Belgia
Tanggal 28 Agustus - 2 September 2016





the 13th Meeting of AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM)
Tanggal 4 - 6 Juli 2017 di Filipina





the 38th General Assembly of AIPA
Tanggal 14 - 20 September 2017
Di Filipina





the 9th AIPA Caucus Meeting
Tanggal 17 - 20 Juli 2017
Di Indonesia





the 10th APA Plenary Session
Tanggal 19 - 25 November 2017
Di Turki





the APA Standing Committee
Social and Cultural Affairs
31 Agustus - 2 September 2017 di Bhutan





the APA Standing Committee
Staff and Financial Regulation
Tanggal 21 - 24 Mei 2017 di Uni Emirat Arab





the APA Standing Committee
Economic and Sustainable Development
Tanggal 24 - 27 April 2017 di Bahrain





ate of Pakistan Welcomes
Delegates of

the APA Standing Committee
Staff and Financial Regulation
Tanggal 13 - 17 Maret 2017 di Pakistan



INDONESIA



the 25th Asia Pacific Parliamentary Forum
Tanggal 15 - 19 Januari 2017
Di Fiji





BKSAP Day
ke Universitas Lambung Mangkurat
Tanggal 9 - 11 April 2017





the 2nd Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments (MSEAP)
Tanggal 15 - 19 Juni 2017 di Korea





Kunjungan Panitia Kerja
Kerjasama Ekonomi Regional
Tanggal 25 - 27 April 2017 ke Makassar





Kunjungan Pantia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Tanggal 23 - 25 Juli 2017 ke Pontianak





Kunjungan Panitia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Tanggal 3 - 9 Desember 2017 ke Swedia





AIPA Awards
DR. Nurhayati Ali Assegaf
Tanggal 13 Desember 2018





the 39th General Assembly
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
Tanggal 3 - 7 September 2018 ke Singapura





BKSAP DAY ke Universitas Diponegoro
Tanggal 7 Maret 2018, Semarang





The House of Representatives
of the Republic of Indonesia



INDONESIA - PACIFIC PARLIAMENTS PARTNERSHIP

HUMAN DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH

23 - 24 July 2018 | Grand Ballroom, DPR-RI



Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)
Tanggal 23 - 24 Juli 2018 ke Indonesia



CHAIR

CO-CHAIR



LIAMMENTARY PARTNERSHIP

ND MARITIME SUSTAINABILITY

Grand Hyatt Jakarta - Indonesia





Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Tanggal 18 - 24 Maret 2018 ke Rumania





Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Kerjasama Ekonomi Regional
Tanggal 20 - 26 Mei 2018, Austria





BKSAP Day ke Universitas Pelita Harapan
Tanggal 30 Oktober 2018 di Tangerang





the APA Standing Committee
Political Affairs
Tanggal 25 - 28 Juni 2019, Iran





the APA Standing Committee
Social and Cultural Affairs
Tanggal 13 - 14 Februari 2019 di Thailand





the 27th Annual Meeting
Asia - Pacific Parliamentary Forum (APPF)
Tanggal 13 - 18 Januari 2019 di Kamboja





Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Tanggal 11 - 17 Maret 2019 ke Hungaria





Kunjungan Kerja Panitia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Tanggal 11 - 17 Mei 2019 ke Italia





**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 4
Komplek Gedung MPR / DPR / DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5715814, 5715907
Faksimil : 021-5734460

